

P E D O M A N

TEKNIK ANALISIS ASPEK FISIK & LINGKUNGAN, EKONOMI SERTA SOSIAL BUDAYA DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.20/PRT/M/2007



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG**

PEDOMAN

TEKNIK ANALISIS ASPEK FISIK & LINGKUNGAN, EKONOMI, SERTA SOSIAL BUDAYA DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.20/PRT/M/2007



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG**



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 20 /PRT/M/2007**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS ANALISIS ASPEK FISIK DAN LINGKUNGAN,
EKONOMI, SERTA SOSIAL BUDAYA
DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang diperlukan adanya Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
- b. bahwa Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang diperlukan agar pengembangan wilayah dan kawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah penataan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KTPS/M12002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN TEKNIS ANALISIS ASPEK FISIK DAN LINGKUNGAN, EKONOMI, SERTA SOSIAL BUDAYA DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis aspek fisik dan lingkungan adalah analisa untuk mengenali

karakteristik sumber daya alam dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem.

2. Analisis aspek ekonomi adalah analisa untuk mengenali potensi lokasi, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan agar dengan usaha yang minimum dapat memperoleh hasil optimum yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, serta terjadinya investasi dan mobilisasi dana.
3. Analisis aspek sosial budaya adalah analisa struktur sosial budaya serta prasarana dan sarana budaya untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersifat lahiriah, batiniah, atau spiritual.
4. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang dimaksudkan sebagai pelengkap Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KTPS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.
- (2) Pengaturan Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang bertujuan untuk memberikan arahan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan analisis sebagai salah satu tahapan yang diperlukan dalam penyusunan rencana tata ruang.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan tentang teknis analisis penyusunan rencana tata ruang ditinjau dari aspek fisik dan lingkungan, aspek ekonomi, serta aspek sosial budaya.
- (2) Pengaturan tentang teknis analisis penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2007



[Handwritten signature]
SILOKO KIRMANTO

Lampiran : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 20 /PRT/M/2007
Tanggal : 12 Juli 2007
Tentang : PEDOMAN TEKNIS ANALISIS ASPEK FISIK DAN LINGKUNGAN, EKONOMI, SERTA SOSIAL BUDAYA DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

Kata pengantar

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah dan pemerintah daerah berkepentingan dalam penyusunan rencana tata ruang sebagai arahan pelaksanaan pembangunan sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunan rencana tata ruang salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah analisis aspek fisik dan lingkungan, aspek ekonomi, serta aspek sosial budaya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan acuan mengenai teknik analisis dalam penyusunan rencana tata ruang.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum telah menyusun suatu pedoman teknik analisis dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan/atau kawasan. Penyusunan pedoman ini bertujuan memberi arah bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, dan para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah.

Upaya fasilitasi ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan penyebarluasan agar dapat dimanfaatkan secara luas dan diikuti upaya perbaikan melalui saran, masukan, maupun kritik untuk penyempurnaan pedoman ini.

Semoga pedoman ini bermanfaat dalam mempercepat terwujudnya pemanfaatan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan di persada Nusantara. Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

Daftar isi

Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar tabel	xiii
Daftar gambar	xvii
 Bab I Pendahuluan	 1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Sasaran	1
1.4 Manfaat	2
1.5 Ruang lingkup	2
1.6 Sistematika pedoman	2
 Bab II Analisis aspek fisik dan lingkungan	 3
2.1 Umum	3
2.2 Pengumpulan data	5
2.2.1 Klimatologi	6
2.2.1.1 Curah hujan	7
2.2.1.2 Hari hujan	7
2.2.1.3 Intensitas hujan	8
2.2.2 Topografi	8
2.2.2.1 Peta morfologi	9
2.2.2.2 Peta kemiringan lereng	12
2.2.3 Geologi	14
2.2.3.1 Geologi umum	14
2.2.3.2 Geologi wilayah	15
2.2.3.3 Geologi permukaan	17
2.2.4 Hidrologi	19
2.2.4.1 Air permukaan	20

	2.2.4.2 Air tanah	21
	2.2.5 Sumber daya mineral/bahan galian	26
	2.2.6 Bencana alam	27
	2.2.7 Penggunaan lahan	29
	2.2.8 Studi fisik / lingkungan yang ada atau pernah dilakukan .	32
	2.2.9 Kebijakan Pengembangan Fisik Yang Ada	34
2.3	Analisis kemampuan lahan	35
	2.3.1 SKL morfologi	35
	2.3.2 SKL kemudahan dikerjakan	38
	2.3.3 SKL kestabilan lereng	41
	2.3.4 SKL kestabilan pondasi	44
	2.3.5 SKL ketersediaan air	47
	2.3.6 SKL untuk drainase	50
	2.3.7 SKL terhadap erosi	53
	2.3.8 SKL pembuangan limbah	56
	2.3.9 SKL terhadap bencana alam	59
	2.3.10 Analisis Kemampuan Lahan	62
2.4	Analisis kesesuaian lahan	68
	2.4.1 Arahana tata ruang pertanian	68
	2.4.2 Arahana rasio tutupan	70
	2.4.3 Arahana ketinggian bangunan	73
	2.4.4 Arahana pemanfaatan air baku	75
	2.4.5 Perkiraan daya tampung lahan	77
	2.4.6 Persyaratan dan pembatas pengembangan	79
	2.4.7 Evaluasi pemanfaatan lahan yang ada terhadap kesesuaian lahan	81
	2.4.8 Analisis kesesuaian lahan	83
2.5	Rekomendasi kesesuaian lahan	86
Bab III	Analisis aspek ekonomi	89
3.1	Umum	89
3.2	Identifikasi potensi sumber daya	91
	3.2.1 Analisis aspek lokasi	91
	3.2.2 Analisis aspek sumber daya alam	97
	3.2.3 Analisis aspek sumber daya buatan	102
	3.2.4 Analisis aspek sumber daya manusia	109

3.3	Analisis perekonomian	116
3.3.1	Struktur ekonomi dan pergeserannya	118
3.3.2	Sektor basis	120
3.3.3	Komoditi sektor basis yang memiliki keunggulan dan komparatif berpotensi ekspor	122
3.4	Penentuan sektor basis/komoditas potensial	124
3.5	Penentuan sektor basis/komoditas unggulan	129
3.5.1	Analisis pengaruh kebijakan pemerintah	131
3.5.2	Analisis pasar unggulan (<i>market trend</i>) dan pola aliran komoditas unggulan	133
3.5.3	Analisis potensi pengembangan kegiatan/komoditas unggulan	135
3.5.4	Analisis pemilihan sektor/komoditas unggulan	137
3.6	Penilaian kelayakan pengembangan komoditas unggulan	140
3.6.1	Analisis kebutuhan teknologi untuk mengolah komoditas unggulan	140
3.6.2	Analisis kebutuhan infrastruktur untuk pengembangan komoditas unggulan	142
Bab IV	Analisis aspek sosial budaya	145
4.1	Umum	145
4.1.1	Pengumpulan data	146
4.2	Indikator sosial budaya	146
4.2.1	Indikator sosial budaya	149
4.3	Analisis aspek sosial budaya	150
4.3.1	Analisis kependudukan	152
4.3.2	Analisis pendidikan	156
4.3.3	Analisis ketenagakerjaan	160
4.3.4	Analisis kesehatan	165
4.3.5	Analisis perumahan dan lingkungan	169
4.3.6	Analisis sosial budaya	175
4.4	Analisis potensi pengembangan wilayah dan/atau kawasan berdasarkan aspek sosial budaya	178
4.5	Pemilihan rencana tindak pengembangan wilayah dan/atau kawasan berkaitan dengan aspek sosial budaya	181
4.6	Rekomendasi pengembangan sosial budaya melalui pemberdayaan masyarakat	183

Daftar tabel

Tabel	2.1	Curah hujan wilayah dan/atau kawasan	7
Tabel	2.2	Curah hujan wilayah dan/atau kawasan menurut hari hujan	7
Tabel	2.3	Curah hujan wilayah dan/atau kawasan menurut intensitas hujan	8
Tabel	2.4	Susunan stratigrafi geologi umum	15
Tabel	2.5	Susunan stratigrafi geologi permukaan	17
Tabel	2.6	Susunan tanah	19
Tabel	2.7	Debit sungai-sungai	21
Tabel	2.8	Sumber daya mineral/bahan galian	27
Tabel	2.9	Penggunaan lahan	31
Tabel	2.10	Pembobotan satuan kemampuan lahan	66
Tabel	3.1	Laju pertumbuhan ekonomi menurut daerah wilayah	92
Tabel	3.2	Total biaya pembangunan dan total pengeluaran di wilayah dan/atau kawasan (dalam ribu rupiah dan harga berlaku)	93
Tabel	3.3	Data volume ekspor dan impor di wilayah dan/atau kawasan	93
Tabel	3.4	Tata jenjang pusat pengembangan/perkotaan di wilayah dan/atau kawasan	94
Tabel	3.5	Luas setiap jenis penggunaan lahan wilayah perencanaan (Ha)	94
Tabel	3.6	Kepadatan penduduk pada tahun t	95
Tabel	3.7	Produksi pertanian di wilayah dan/atau kawasan pada tahun t	99
Tabel	3.8	Produksi hasil hutan (dalam m ³) di wilayah dan/atau kawasan	99
Tabel	3.9	Populasi ternak di wilayah dan/atau kawasan tahun t	99
Tabel	3.10	Produksi sumber daya laut pada tahun t di wilayah dan/atau kawasan	100
Tabel	3.11	Produksi sumber daya pertambangan di wilayah dan/atau kawasan	100

Tabel	3.12	Luas setiap jenis penggunaan lahan perkotaan di wilayah dan/atau kawasan (pada tahun t)	103
Tabel	3.13	Panjang jaringan transportasi utama di wilayah perencanaan	104
Tabel	3.14	Penilaian potensi pengembangan dari kondisi jaringan jalan	104
Tabel	3.15	Potensi pelayanan utilitas di wilayah dan/atau kawasan	105
Tabel	3.16	Analisis potensi pengembangan dari keberadaan prasarana dan sarana ekonomi	106
Tabel	3.17	Mata pencaharian penduduk wilayah perencanaan dan provinsi	110
Tabel	3.18	Perkembangan keadaan industri di wilayah dan/atau kawasan	111
Tabel	3.19	Kemampuan pengembangan perdagangan/wiraswasta wilayah	112
Tabel	3.20	Struktur penduduk menurut kelompok umur di wilayah dan/atau kawasan	112
Tabel	3.21	Struktur penduduk menurut tingkat pendidikan di wilayah dan/atau kawasan	113
Tabel	3.22	Tingkat kesejahteraan yang telah dicapai	113
Tabel	3.23	Distribusi pendapatan per 20 % (kuartil) kelompok rumah tangga	114
Tabel	3.24	PDRB kegiatan sektor ekonomi primer wilayah kabupaten/kota dan provinsi	126
Tabel	3.25	Kontribusi nilai PDRB pada kegiatan sektor ekonomi sekunder di wilayah kabupaten/kota dan provinsi	127
Tabel	3.26	Kontribusi nilai PDRB pada kegiatan sektor ekonomi tersier di wilayah kabupaten/kota dan provinsi	128
Tabel	4.1	Jumlah penduduk, jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif, penduduk menurut daerah tempat tinggal, penduduk menurut daerah asal	153
Tabel	4.2	Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990	153
Tabel	4.3	Luas daerah dan kepadatan penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990	154

Tabel 4.4	Proyeksi penduduk menurut kelompok umur Tahun 1993 - 1996	154
Tabel 4.5	Estimasi proporsi penduduk menurut kelompok usia produktif dan tidak produktif	154
Tabel 4.6	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut partisipasi sekolah	157
Tabel 4.7	Perbandingan banyak murid, rasio jumlah guru, rasio murid-guru, rasio murid-kelas dalam beberapa tahun 1987, 1990, 1993	158
Tabel 4.8	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf menurut daerah tempat tinggal, tahun 1987, 1990, 1993	158
Tabel 4.9	Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut daerah tempat tinggal dan pendidikan tertinggi, yang ditamatkan tahun 1987, 1990, 1993	159
Tabel 4.10	Penduduk yang bekerja, penduduk yang mencari pekerjaan, penduduk bukan angkatan kerja	162
Tabel 4.11	Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut golongan umur dan daerah tempat tinggal tahun 1991 - 1993	162
Tabel 4.12	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut daerah tempat tinggal dan status pekerjaan	163
Tabel 4.13	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut daerah tempat tinggal dan lapangan pekerjaan utama	163
Tabel 4.14	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran menurut jenis kelamin dan wilayah/kawasan perencanaan, tahun 1971, 1980 dan 1990	166
Tabel 4.15	Angka kematian balita per 1000 kelahiran menurut jenis kelamin dan wilayah/kawasan tahun 1971, 1980, 1990	166
Tabel 4.16	Angka harapan hidup pada waktu lahir menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal, tahun 1971, 1980 Dan 1990	166
Tabel 4.17	Banyaknya rumah sakit, tempat tidur, puskesmas, dan apotek	167

Tabel	4.18	Banyaknya jenis tenaga kesehatan	167
Tabel	4.19	Persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas perumahan dan daerah tempat tinggal	171
Tabel	4.20	Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis penerangan yang digunakan.....	171
Tabel	4.21	Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan sumber penerangan	171
Tabel	4.22	Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan sumber air minum	172
Tabel	4.23	Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan fasilitas air minum	172
Tabel	4.24	Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan tempat buang air besar	172
Tabel	4.25	Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis bahan bakar untuk memasak	173
Tabel	4.26	Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan luas lantai	173
Tabel	4.27	Persentase banyaknya rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis dinding terbanyak	173
Tabel	4.28	Persentase banyaknya rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis atap terbanyak.....	173
Tabel	4.29	Persentase banyaknya rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis lantai terluas	174
Tabel	4.30	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mendengarkan radio, menonton televisi, membaca surat kabar selama seminggu yang lalu menurut daerah tempat tinggal	176
Tabel	4.31	Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan menurut daerah tempat tinggal	176
Tabel	4.32	Indeks pembangunan manusia di wilayah dan/atau kawasan	179

Daftar gambar

Gambar 2.1	Bagan alir tata cara analisis aspek fisik dan lingkungan ..	4
Gambar 2.2	Contoh peta topografi	10
Gambar 2.3	Contoh peta morfologi	11
Gambar 2.4	Contoh peta kemiringan lereng	13
Gambar 2.5	Contoh peta geologi umum	16
Gambar 2.6	Contoh peta geologi permukaan	18
Gambar 2.7	Contoh peta pola aliran sungai	22
Gambar 2.8	Contoh peta potensi air tanah	24
Gambar 2.9	Contoh peta isofreatis tanah	25
Gambar 2.10	Contoh peta sumber daya mineral	28
Gambar 2.11	Contoh peta rawan bencana	30
Gambar 2.12	Contoh peta tata guna lahan	33
Gambar 2.13	Contoh peta morfologi	37
Gambar 2.14	Contoh peta SKL kemudahan penggalian	40
Gambar 2.15	Contoh peta SKL kestabilan lereng	43
Gambar 2.16	Contoh peta SKL kestabilan pondasi	46
Gambar 2.17	Contoh peta SKL kemampuan lahan tata air	49
Gambar 2.18	Contoh peta SKL drainase	52
Gambar 2.19	Contoh peta SKL terhadap erosi	55
Gambar 2.20	Contoh peta SKL pembuangan limbah	58
Gambar 2.21	Contoh peta SKL bencana alam	61
Gambar 2.22	Contoh peta nilai kemampuan lahan	64
Gambar 2.23	Contoh peta klasifikasi kemampuan lahan	65
Gambar 2.24	Contoh peta arahan kesesuaian lahan pertanian	69
Gambar 2.25	Contoh peta kesesuaian rasio tutupan lahan	72
Gambar 2.26	Contoh peta arahan ketinggian bangunan	74
Gambar 2.27	Contoh peta kesesuaian lahan	85
Gambar 2.28	Contoh peta rekomendasi kemampuan lahan	88
Gambar 3.1	Bagan alir analisis aspek ekonomi	90
Gambar 4.1	Bagan alir proses pengumpulan data aspek sosial budaya	147
Gambar 4.2	Bagan alir analisis aspek sosial budaya	151

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang dalam penyusunan rencana tata ruang sebagai arahan pelaksanaan pembangunan sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunan rencana tata ruang salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah analisis aspek fisik dan lingkungan, aspek ekonomi, serta aspek sosial budaya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan acuan mengenai teknis analisis dalam penyusunan rencana tata ruang.

1.2 Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan analisis sebagai salah satu tahapan yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang.

1.3 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai diantaranya adalah:

- 1) Teringkatkannya kemampuan aparat daerah dalam melakukan analisis dalam penyusunan rencana tata ruang;
- 2) Tersedianya petunjuk tentang unit kebutuhan data yang digunakan pada tahap analisis dalam penyusunan rencana tata ruang;
- 3) Tersedianya acuan dan petunjuk tentang proses dan tata cara dalam melakukan analisis dalam penyusunan rencana tata ruang;

1.4 Manfaat

Pedoman ini bermanfaat bagi pemerintah dan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan yang terkait dalam penyusunan rencana tata ruang.

1.5 Ruang lingkup

Lingkup Pedoman Teknis Analisis Penyusunan Rencana Tata Ruang terdiri dari:

- 1) Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan,
- 2) Analisis Aspek Ekonomi,
- 3) Analisis Aspek Sosial Budaya.

1.6 Sistematika pedoman

Pedoman ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup dan sistematika dari Pedoman Teknis Analisis Penyusunan Rencana Tata Ruang.

Bab II Analisis aspek fisik dan lingkungan

Bab ini berisikan mengenai tata cara, unit analisis, serta kebutuhan data dalam melakukan analisis aspek fisik dan lingkungan.

Bab III Analisis aspek ekonomi

Bab ini berisikan mengenai tata cara, unit analisis, serta kebutuhan data dalam melakukan analisis aspek ekonomi.

Bab IV Analisis aspek sosial budaya

Bab ini berisikan mengenai tata cara, unit analisis, serta kebutuhan data dalam melakukan analisis aspek sosial budaya.

Bab II

Analisis aspek fisik dan lingkungan

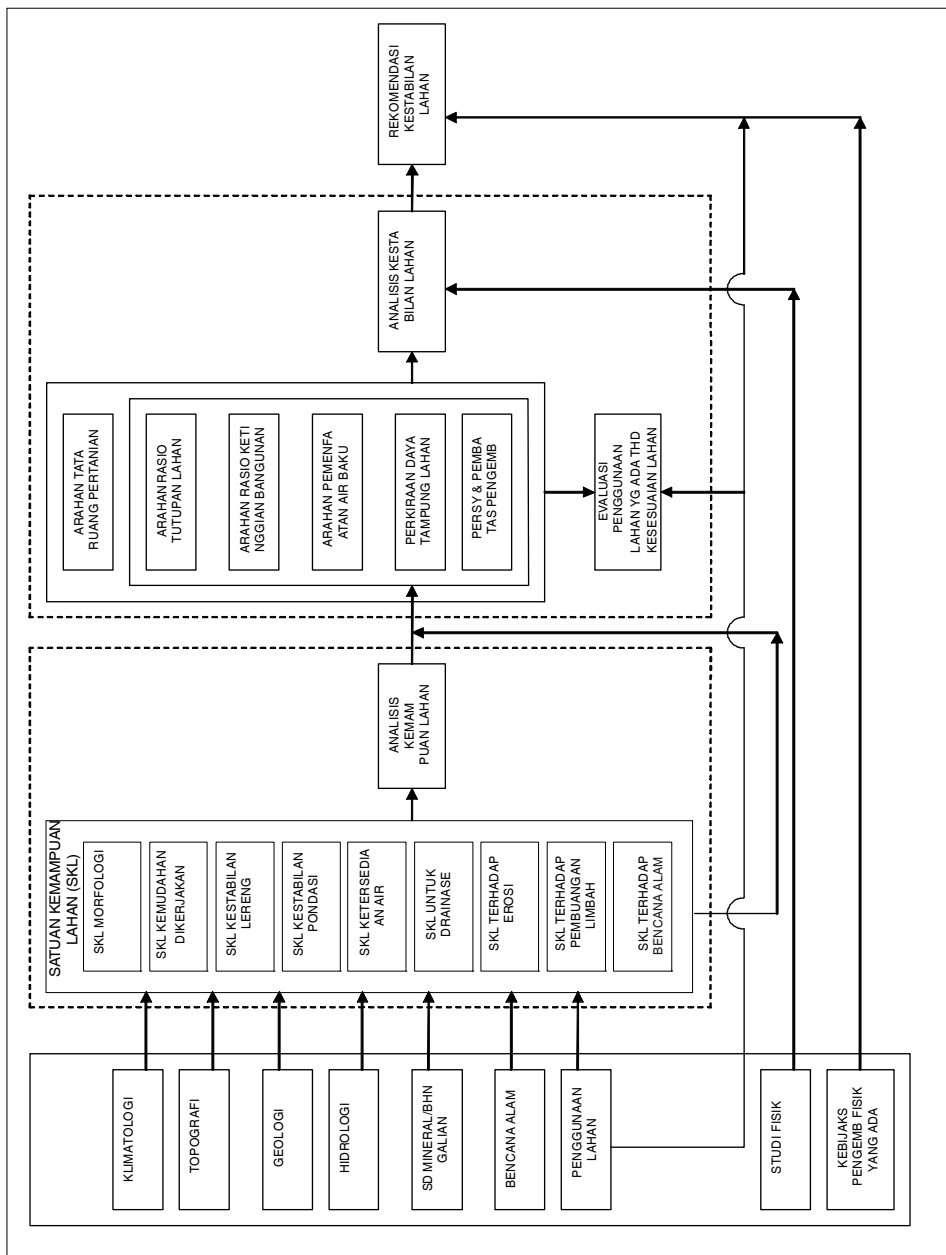
2.1 Umum

Lahan pengembangan wilayah merupakan sumber daya alam yang memiliki keterbatasan dalam menampung kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Banyak contoh kasus kerugian ataupun korban yang disebabkan oleh ketidaksesuaian penggunaan lahan yang melampaui kapasitasnya. Untuk itulah perlu dikenali sedini mungkin karakteristik fisik suatu wilayah maupun kawasan untuk dikembangkan, baik potensi sumber daya alamnya maupun kerawanan bencana yang dikandungnya, yang kemudian diterjemahkan sebagai potensi dan kendala pengembangan wilayah atau kawasan.

Analisis fisik dan lingkungan wilayah atau kawasan ini adalah untuk mengenali karakteristik sumber daya alam tersebut, dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan, agar penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah dan/atau kawasan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem.

Hasil studi analisis fisik dan lingkungan ini akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana tata ruang maupun rencana pengembangan wilayah dan/atau kawasan (rencana tindak, rencana investasi, dan lain-lain), karena akan memberikan gambaran kerangka fisik pengembangan wilayah dan/atau kawasan. Secara garis besar tata cara analisis kelayakan fisik atau dikenal juga sebagai studi kesesuaian lahan wilayah dan/atau kawasan ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan alir berikut (Gambar 2.1)

Gambar 2.1 Bagan Alir tata cara analisis aspek fisik dan lingkungan

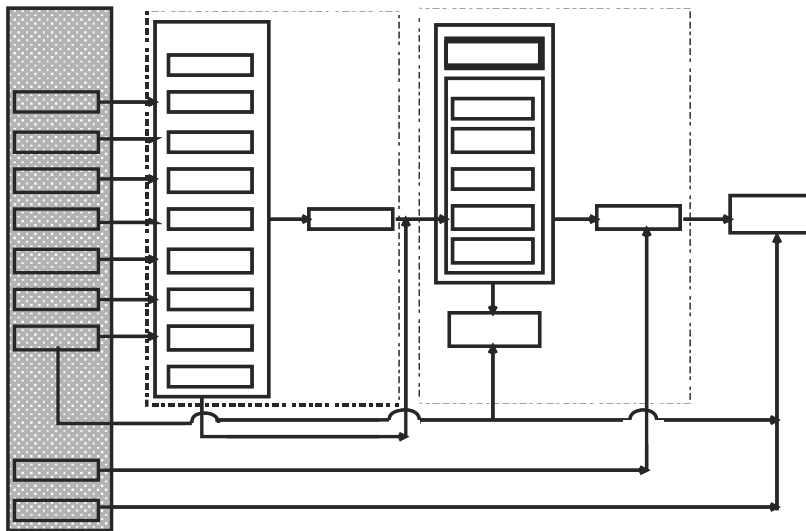


Pengumpulan data, dengan cakupan data yang dikehendaki adalah seperti terlihat pada bagan alir tersebut. Sedangkan tahap analisis terdiri dari dua, yakni analisis kemampuan lahan dan analisis kesesuaian lahan. Hasil akhir dari studi ini adalah berupa rekomendasi kesesuaian lahan, yang akan menjadi masukan pada pengembangan wilayah dan/atau kawasan.

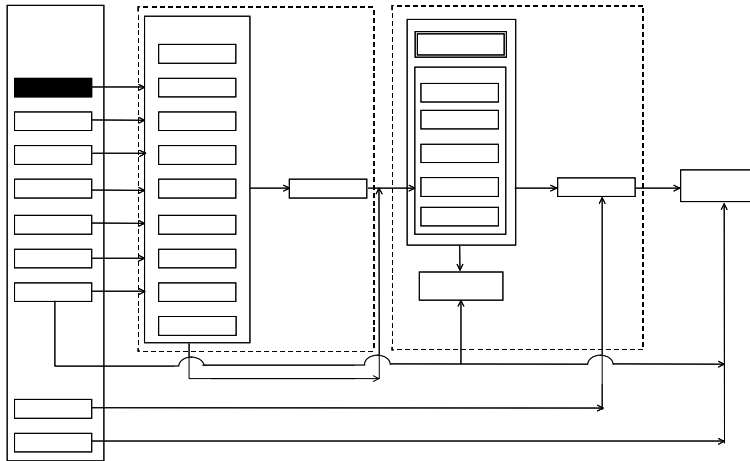
2.2 Pengumpulan data

Data-data yang dibutuhkan dalam aspek analisis fisik dan lingkungan dalam pedoman ini adalah:

- 1) Klimatologi;
- 2) Topografi;
- 3) Geologi;
- 4) Hidrologi;
- 5) Sumber Daya Mineral/ Bahan Galian;
- 6) Bencana Alam; dan
- 7) Penggunaan Lahan.



2.2.1 Klimatologi



Data klimatologi adalah data iklim berdasarkan hasil pengamatan pada stasiun pengamat di wilayah yang bersangkutan dan/atau daerah sekitarnya, meliputi:

- 1) Curah hujan,
- 2) Hari hujan,
- 3) Intensitas hujan,
- 4) Temperatur rata-rata,
- 5) Kelembaban relatif,
- 6) Kecepatan dan arah angin,
- 7) Lama penyinaran (durasi) matahari.

Data klimatologi ini dapat diperoleh pada stasiun meteorologi dan geofisika di wilayah dan/atau kawasan atau daerah sekitarnya yang terdekat, atau pada kabupaten dalam bentuk laporan, atau dapat juga diperoleh pada Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat di Jakarta.

Kedalaman data adalah pengamatan selama 10 tahun (bila tersedia). Bila data yang diperoleh tidak mencapai kedalaman tersebut, sebaiknya dikumpulkan data semaksimal yang tersedia, dengan contoh penyajian seperti yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, pada sub-sub bab sebagai berikut:

2.2.1.1 Curah hujan

**Tabel 2.1 Curah hujan wilayah dan/atau kawasan..... *)
(mm) tahun 1985 – 1994
(stasiun pengamat*))**

No.	Tahun Pengamatan	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Ags.	Sep.	Okt.	Nov.	Des.	Jumlah
1.	1965													
2.	1966													
10.	1994													
	Rata - Rata													

Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan

2.2.1.2 Hari hujan

**Tabel 2.2 Curah hujan wilayah dan/atau kawasan.....*) (hari)
tahun 1985 – 1994
(stasiun pengamat.....*))**

No.	Tahun Pengamatan	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Ags.	Sep.	Okt.	Nov.	Des.	Jumlah
1.	1965													
2.	1966													
10.	1994													
	Rata - Rata													

Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan

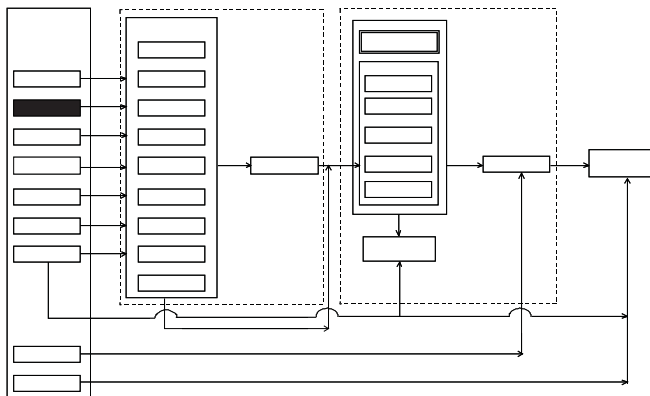
2.2.1.3 Intensitas hujan

**Tabel 2.3 Curah hujan wilayah dan/atau kawasan.....*)(mm)
tahun 1985 - 1994
(stasiun pengamat*)**

No.	Tahun Pengamatan	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Ags.	Sep.	Okt.	Nov.	Des.	Jumlah
1.	1965													
2.	1966													
10.	1994													
	Rata - Rata													

Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan

2.2.2 Topografi



Data topografi berupa peta topografi dengan skala terbesar yang tersedia, yang dapat diperoleh pada instansi: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Topografi - TNI Angkatan Darat, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan instansi terkait lainnya.

Contoh Peta Topografi dalam analisis aspek fisik dan lingkungan adalah seperti pada Gambar 2.2.

Dari peta topografi ini dapat diturunkan beberapa peta yang berkaitan dengan bentuk bentang alam dan kemiringannya, yakni peta morfologi dan peta kemiringan lereng/lahan, yang dalam hal ini dikelompokkan sebagai peta data, karena penganalisisan berikutnya berpijak pada peta morfologi dan kemiringan lereng ini, bukan peta topografi yang merupakan data mentahnya.

2.2.2.1 Peta morfologi

Peta morfologi adalah pengelompokan bentuk bentang alam berdasarkan rona, kemiringan lereng secara umum, dan ketinggiannya, pada beberapa satuan morfologi. Contoh Peta Morfologi lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Satuan morfologi dataran

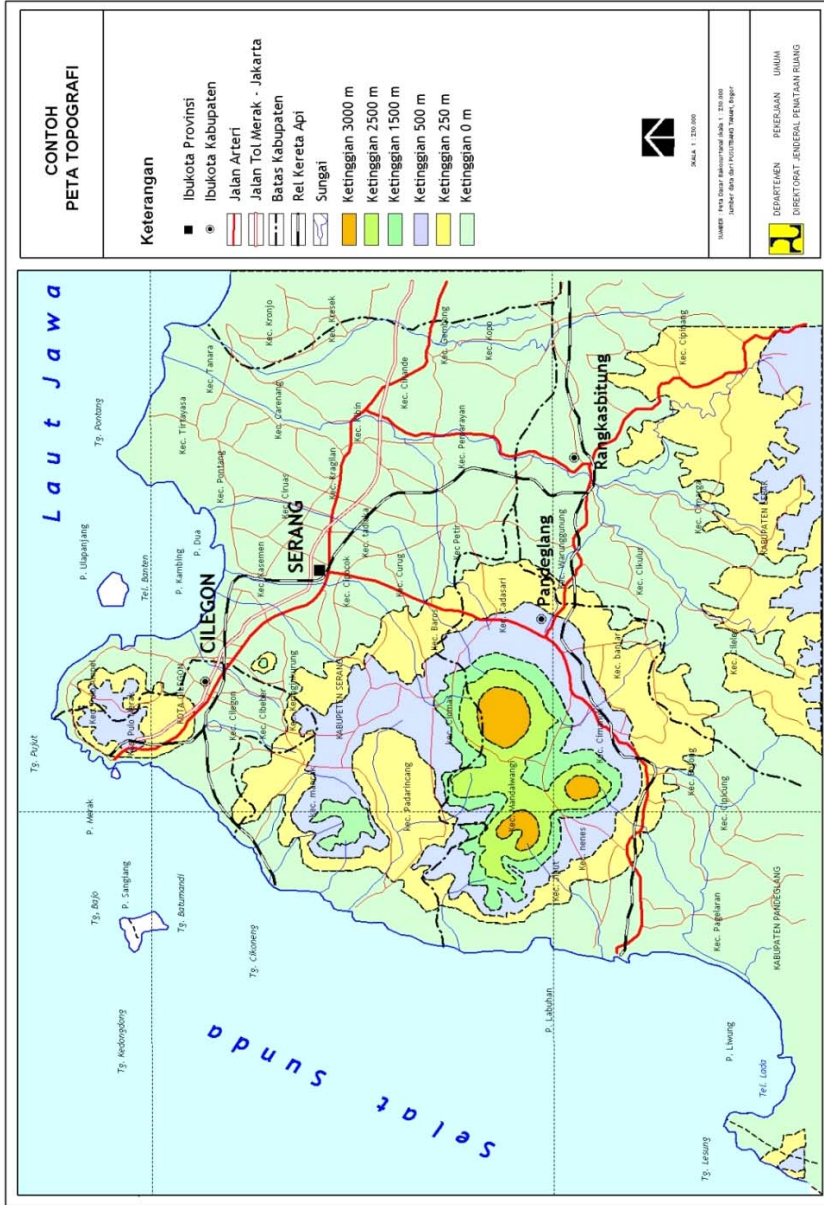
Satuan morfologi dataran adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relatif datar atau sedikit bergelombang, dengan kisaran kemiringan lereng 0% - 5%.

Lebih rinci lagi satuan morfologi dataran ini dapat dibedakan atas dua subsatuan, yakni subsatuan morfologi dataran berkisar antara 0% - 2%; dan subsatuan morfologi medan bergelombang dengan kisaran kemiringan lereng lebih dari 2% hingga 5%.

Satuan morfologi perbukitan

Satuan morfologi perbukitan adalah bentuk bentang alam yang memperlihatkan relief baik halus maupun kasar, membentuk bukit-bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi.

Gambar 2.2 Contoh peta topografi



**CONTOH
PETA MORFOLOGI**

Keterangan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- ▬ Jalan Arteri
- ▬ Jalan Tol Merak - Jakarta
- ▬ Batas Kabupaten
- ▬ Rel Kereta Api
- ▬ Sungai
- Dataran yang datar
- Dataran
- Pegunungan

1:100.000

DEPARTEMEN PERENCANAAN

DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN RUANG

Secara lebih rinci satuan morfologi perbukitan dapat dibagi lagi atas tiga subsatuan, yakni: subsatuan morfologi perbukitan landai dengan kemiringan lereng antara 5% - 15% dan memperlihatkan relief halus; subsatuan morfologi perbukitan sedang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15% - 40% dan memperlihatkan relief sedang, dan subsatuan morfologi perbukitan terjal dengan kemiringan lebih dari 40% dan memperlihatkan relief kasar.

Satuan morfologi tubuh gunung berapi

Satuan tubuh gunung berapi ini hampir sama dengan satuan morfologi perbukitan, dan umumnya merupakan subsatuan perbukitan sedang hingga terjal, namun membentuk kerucut tubuh gunung berapi.

Satuan tubuh gunung berapi ini perlu dipisahkan dari satuan perbukitan, karena tubuh gunung berapi mempunyai karakteristik tersendiri dan berbeda dari perbukitan umumnya, seperti banyak dijumpai mata air, kandungan-kandungan gas beracun, dan sumber daya mineral lainnya yang khas gunung berapi.

2.2.2.2 Peta kemiringan lereng

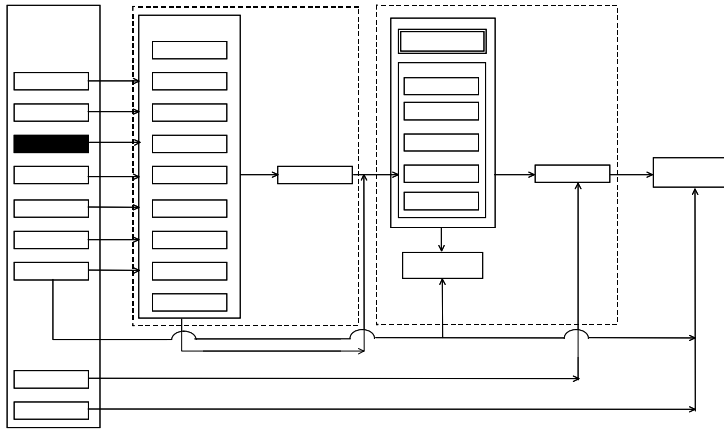
Peta kemiringan lereng diturunkan dari peta topografi, karena penataan ruang dan peruntukannya banyak sekali ditentukan oleh kondisi kemiringan suatu wilayah, demikian juga pengembangan jaringan utilitas sangat dipengaruhi oleh besarnya kemiringan lereng ini. Peta ini memuat pembagian atau klasifikasi kemiringan lereng di wilayah dan/atau kawasan perencanaan atas beberapa kelas sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------|-------------|
| 1) | Kemiringan lereng | 0 % - 2% |
| 2) | Kemiringan lereng | > 2% - 5% |
| 3) | Kemiringan lereng | > 5% - 15% |
| 4) | Kemiringan lereng | > 15% - 40% |
| 5) | Kemiringan lereng | > 40% |

Pada peta topografi dengan skala dan kelengkapan yang memungkinkan, selang kemiringan > 5% - 15%, dibagi lagi atas: > 5% - 8%, dan > 8% - 15%. Untuk lebih jelasnya contoh peta kemiringan lereng ini dapat dilihat pada Gambar 2.4.

[illegible]

2.2.3 Geologi






Untuk mengetahui kondisi geologi regional wilayah dan/atau kawasan perencanaan dan daerah sekitarnya, maka diperlukan data fisiografi daerah yang lebih luas. Fisiografi ini akan memperlihatkan gambaran umum kondisi fisik secara regional baik menyangkut morfologi, pola pembentuknya, pola aliran sungai, serta kondisi litologi dan struktur geologi secara umum. Gambaran umum kondisi geologi atau fisiografi ini dapat dilihat pada Peta Geologi Indonesia. Data geologi yang diperlukan dalam analisis aspek fisik dan lingkungan terdiri dari tiga bagian, yakni data geologi umum, geologi wilayah, dan data geologi permukaan.

2.2.3.1 Geologi umum

Data geologi umum ini diperlukan untuk mengetahui kondisi fisik secara umum, terutama pada batuan dasar yang akan menjadi tumpuan dan sumber daya alam wilayah ini, serta beberapa kemungkinan bencana yang bisa timbul akibat kondisi geologinya atau lebih dikenal dengan bencana alam beraspek geologi.

Data geologi umum wilayah perencanaan dan sekitarnya yang diperlukan pada analisis kelayakan fisik kawasan ini adalah peta dan data geologi, dalam skala terbesar yang tersedia. Data geologi ini mencakup stratigrafi dan uraian litologinya, struktur geologi, serta penampang-penampang geologi. Untuk contoh peta geologi lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.5, sedangkan untuk contoh penyajian susunan stratigrafi secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Susunan stratigrafi wilayah.....*)

Umur	Formasi/ Satuan Batuan	Simbol Pada Peta	Litologi
Kuarter	Batuan Vulkanik		
	Batuan Sedimen		
	Aluvium		
Tersier dst.			

*Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan*

Data geologi umum ini dapat diperoleh pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, atau pada instansi lain yang pernah melakukan penelitian geologi terinci di wilayah yang diperlukan.

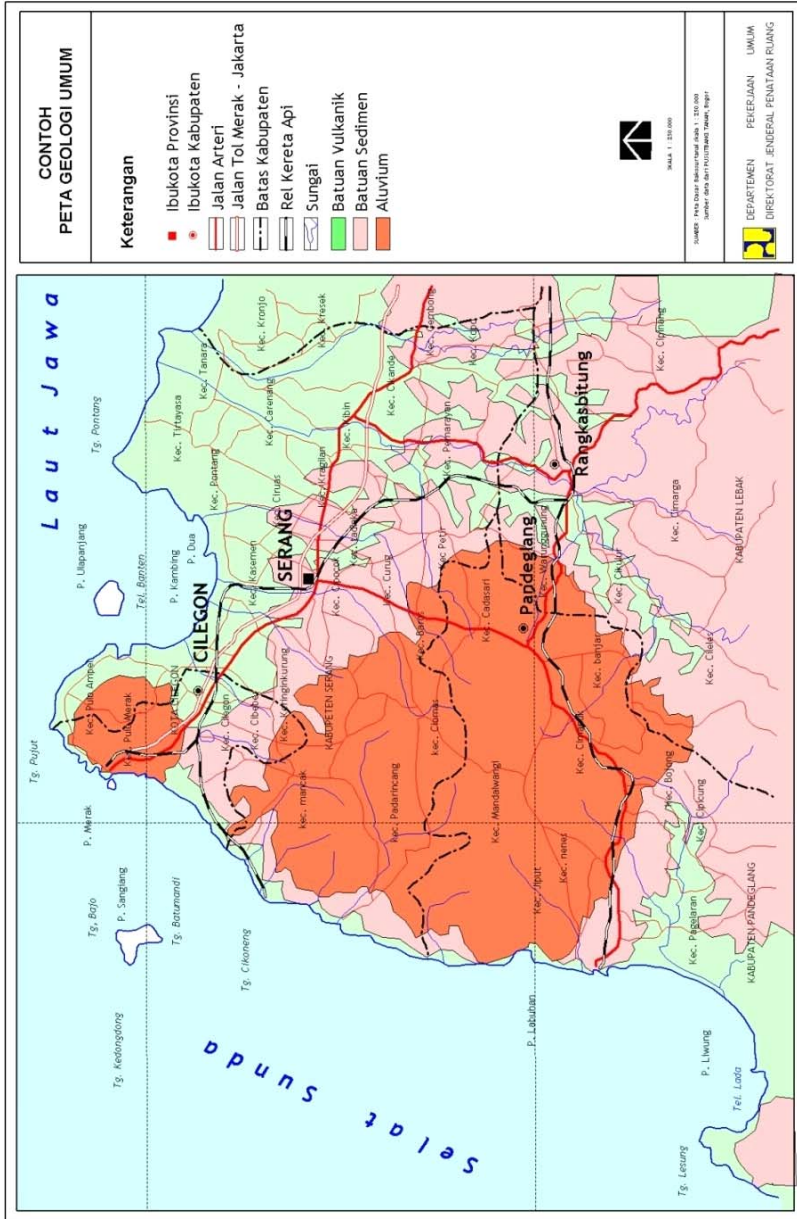
Selain instansi tersebut, data geologi umum dapat diperoleh pada instansi-instansi yang berkaitan dengan bidang geologi seperti Pertamina, perusahaan-perusahaan minyak dan perusahaan tambang baik logam maupun bahan galian lainnya, serta perguruan-perguruan tinggi yang memiliki jurusan geologi yang mungkin pernah melakukan penelitian di wilayah bersangkutan.

2.2.3.2 Geologi wilayah

Khusus untuk wilayah dan/atau kawasan perencanaan perlu dilakukan telaahan geologi lebih terinci, disesuaikan dengan skala penelitian yang dilakukan, yang diperoleh berdasarkan peta geologi umum dan dilakukan pengecekan di lapangan.

Peta geologi wilayah ini memuat semua unsur geologi seperti yang dikehendaki pada geologi umum, hanya lebih terinci yang kemungkinan akan berbeda dari peta geologi umum, karena dilakukan penelitian pada skala lebih besar. Mengingat keterbatasan waktu dan biaya, maka peta geologi wilayah




Gambar 2.5 Contoh peta geologi umum



perencanaan ini lebih bersifat geologi tinjau yang berpegang pada geologi umum, dan lebih menekankan pada rincian karakteristik litologi dan struktur geologinya, dan tentunya dengan tidak mengabaikan stratigrafi serta unsur-unsur geologi lainnya.

Susunan stratigrafi wilayah perencanaan seperti terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Susunan stratigrafi wilayah.....*)

Umur	Formasi/ Satuan Batuan	Simbol Pada Peta	Litologi
Kuarter	Holosen		
	Plistosen		
	Pliosen		
Tersier			
dst.			

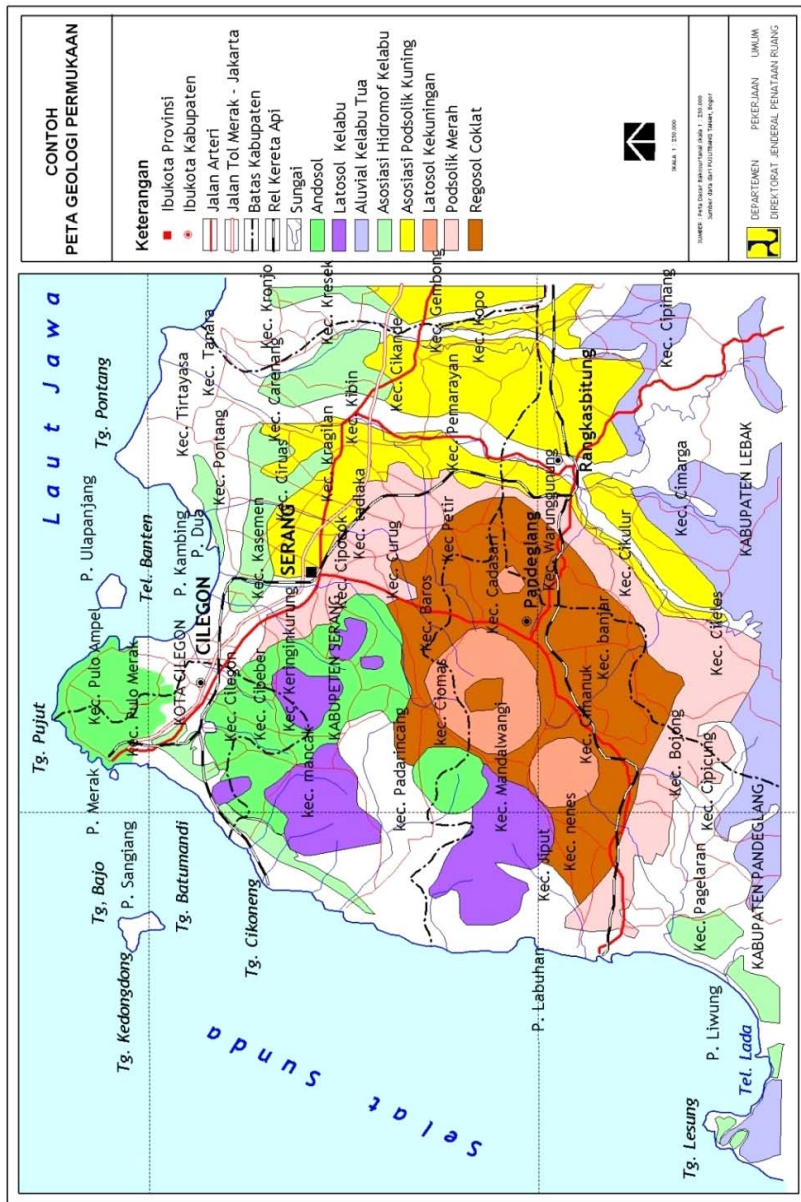
Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan

2.2.3.3 Geologi permukaan

Geologi permukaan adalah kondisi geologi tanah/batu yang ada di permukaan dan sebarannya baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman batuan dasar serta sifat-sifat keteknikan tanah/batu tersebut, dalam kaitannya untuk menunjang pengembangan kawasan. Data geologi permukaan hanya dapat diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), dengan penyebaran vertikal diperoleh berdasarkan hasil pemboran dangkal. Sifat keteknikan dengan keterbatasan biaya dan waktu penelitian hanya dapat disajikan berupa pengamatan megaskopis, kecuali daya dukung tanah/batu yang dapat dipertajam dari hasil pengujian sondir.

Peta geologi permukaan yang memuat sebaran lateral tanah/batu ini (Gambar 2.6), juga diikuti dengan susunan tanah/batu hingga batuan dasar yang diperoleh dari hasil pemboran dangkal yang menunjukkan penyebaran vertikal dari tanah/batu tersebut (Tabel 2.6).

Gambar 2.6 Contoh peta geologi permukaan

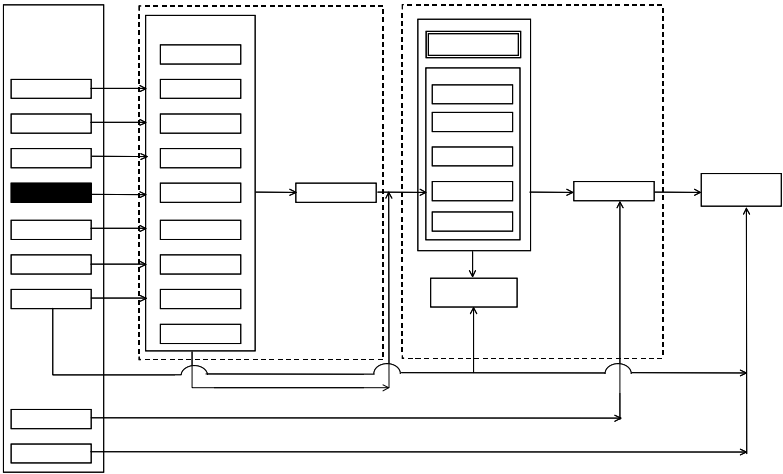


Tabel 2.6 Susunan tanah.....*)

Kedalaman (m)	Simbol	Jenis Tanah	Deskripsi (Deskripsi)

Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan

2.2.4 Hidrologi



Data hidrologi yang dimaksud di sini adalah data yang berkaitan dengan kondisi keairan, baik air permukaan maupun air tanah. Untuk itu penyajian data hidrologi ini dibedakan atas air permukaan dan air tanah, seperti yang akan diuraikan pada sub bab di bawah ini.

2.2.4.1 Air permukaan

Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan seperti: mata air, danau, sungai, dan rawa. Pada data air permukaan ini masing-masing jenis sumber air tersebut hendaknya diikuti besaran atau debitnya, sehingga dapat terlihat potensi air permukaan secara umum.

Khusus untuk sungai disajikan lengkap dengan Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) nya, karena masing-masing WS umumnya mempunyai karakteristik berbeda, demikian juga dengan DAS yang diharapkan dapat memberikan gambaran potensi sungai sampai orde yang terkecil. Data sungai ini juga dilengkapi dengan pola aliran, arah aliran air permukaan pada masing-masing DAS serta kerapatan sungai yang secara tidak langsung akan memperlihatkan aktivitas sungai tersebut baik pengaliran maupun pengikisannya.

Data air permukaan ini dapat diperoleh pada instansi pengairan setempat ataupun pusat, dilengkapi dengan pengamatan lapangan yang menunjukkan kondisi keairan sesaat pada waktu pengamatan yang akan menunjukkan potensi air pada musim tertentu (penghujan atau kemarau, tergantung waktu pengamatan). Sedangkan untuk data mata air kemungkinan juga dapat diperoleh dari peta hidrologi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Peta air permukaan secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.7, dengan debit sungai-sungai tersebut selain dicantumkan pada peta juga dibuat tabulasi yang menunjukkan debit pada bulan kering (debit minimal) dan debit pada bulan basah (debit maksimal) seperti disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Debit sungai-sungai di*)

No	Sungai	Debit Maksimal	Debit Minimal	Debit Rata-Rata
1.				
2.				
...				
Dst				

*Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan*

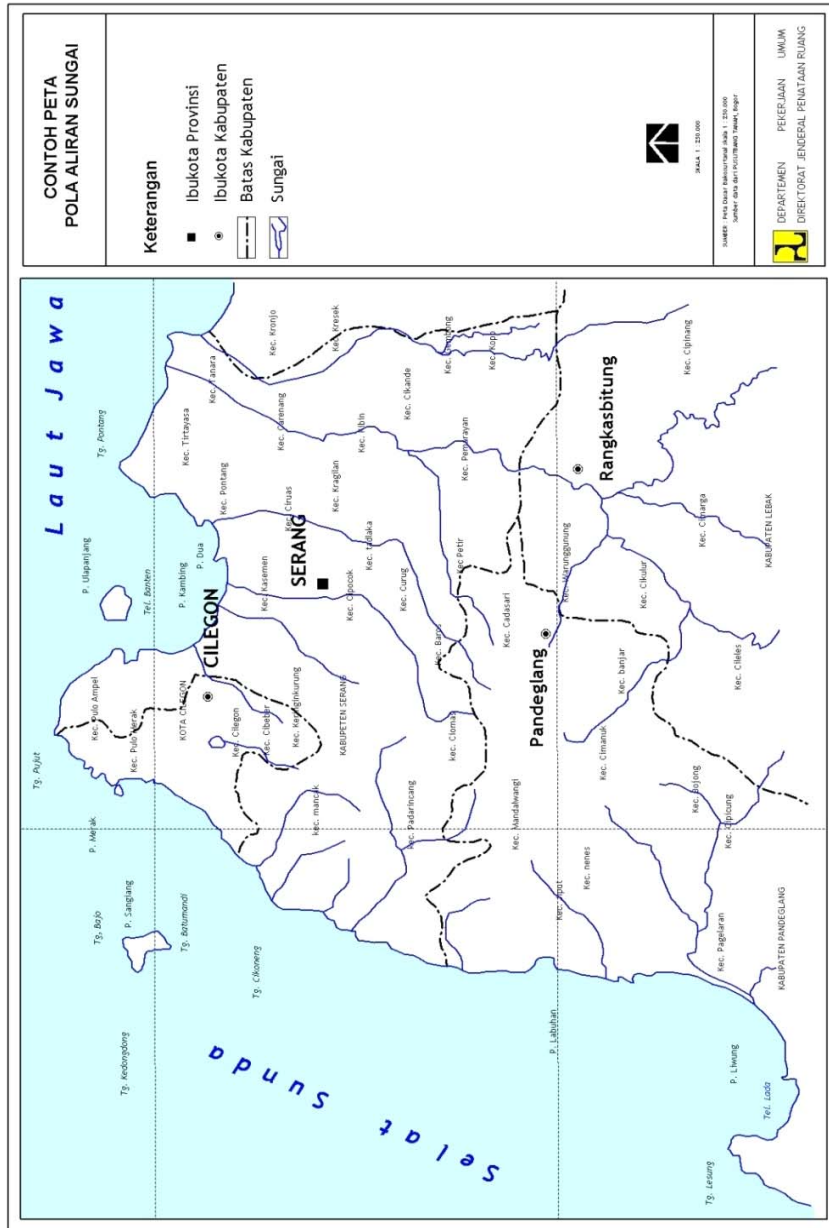
2.2.4.2 Air tanah

Data air tanah dapat dipisahkan atas air tanah dangkal dan air tanah dalam, yang masing-masing diupayakan diperoleh besaran potensinya. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur, sehingga untuk mengetahui potensi air tanah bebas ini perlu diketahui kedalaman sumur-sumur penduduk, dan kemudian dikaitkan dengan sifat fisik tanah/batunya dalam kaitannya sebagai pembawa air. Selain besarnya air tanah ini perlu diketahui mutunya secara umum, dan kalau memungkinkan hasil pengujian mutu air dari laboratorium.

Sedangkan air tanah dalam yakni air tanah yang memerlukan teknologi tambahan untuk pengadaannya, secara umum dapat diketahui dari kondisi geologinya, yang tentunya memerlukan pengamatan struktur geologi yang cermat.

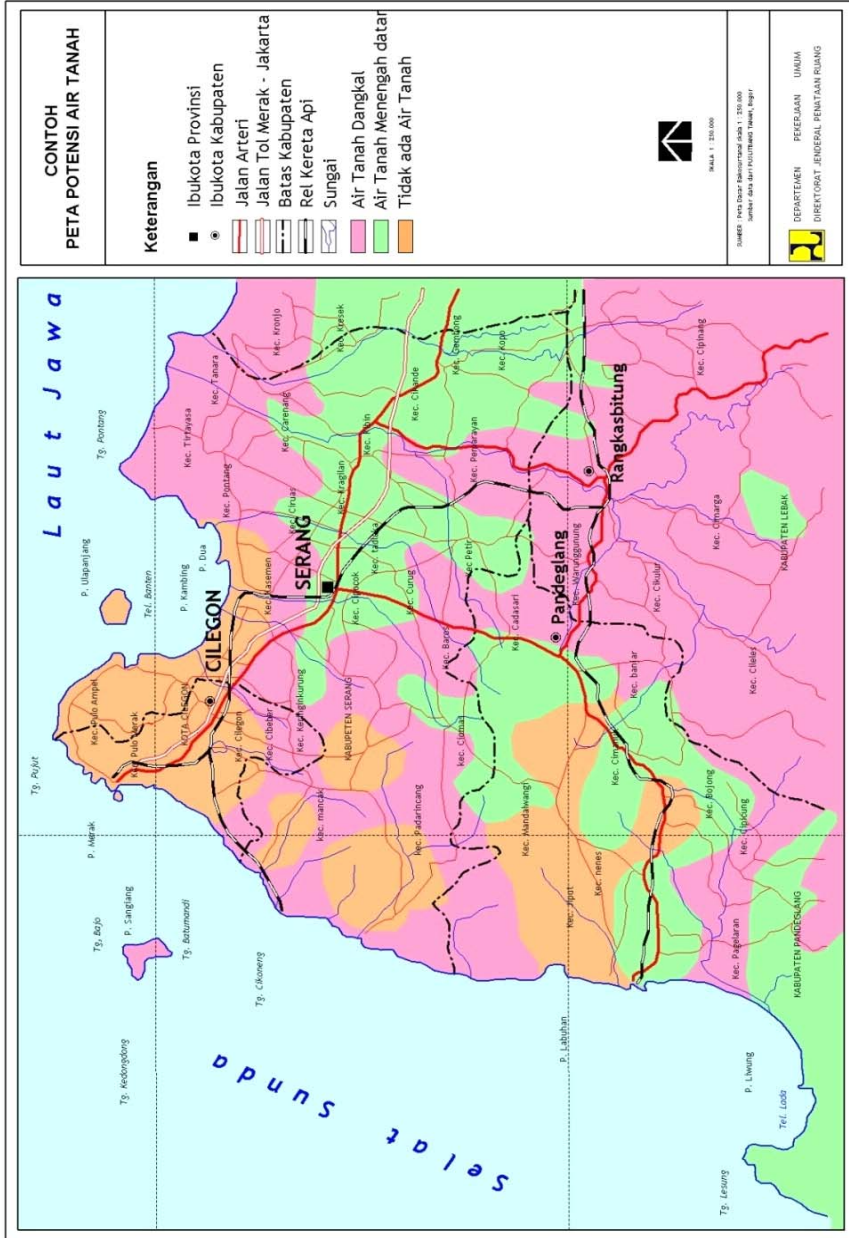
Kondisi air tanah ini dapat diperoleh dari penelitian hidro-geologi baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun instansi lainnya yang berkaitan dengan keairan seperti Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, ataupun juga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi.

Gambar 2.7 Contoh peta pola aliran sungai

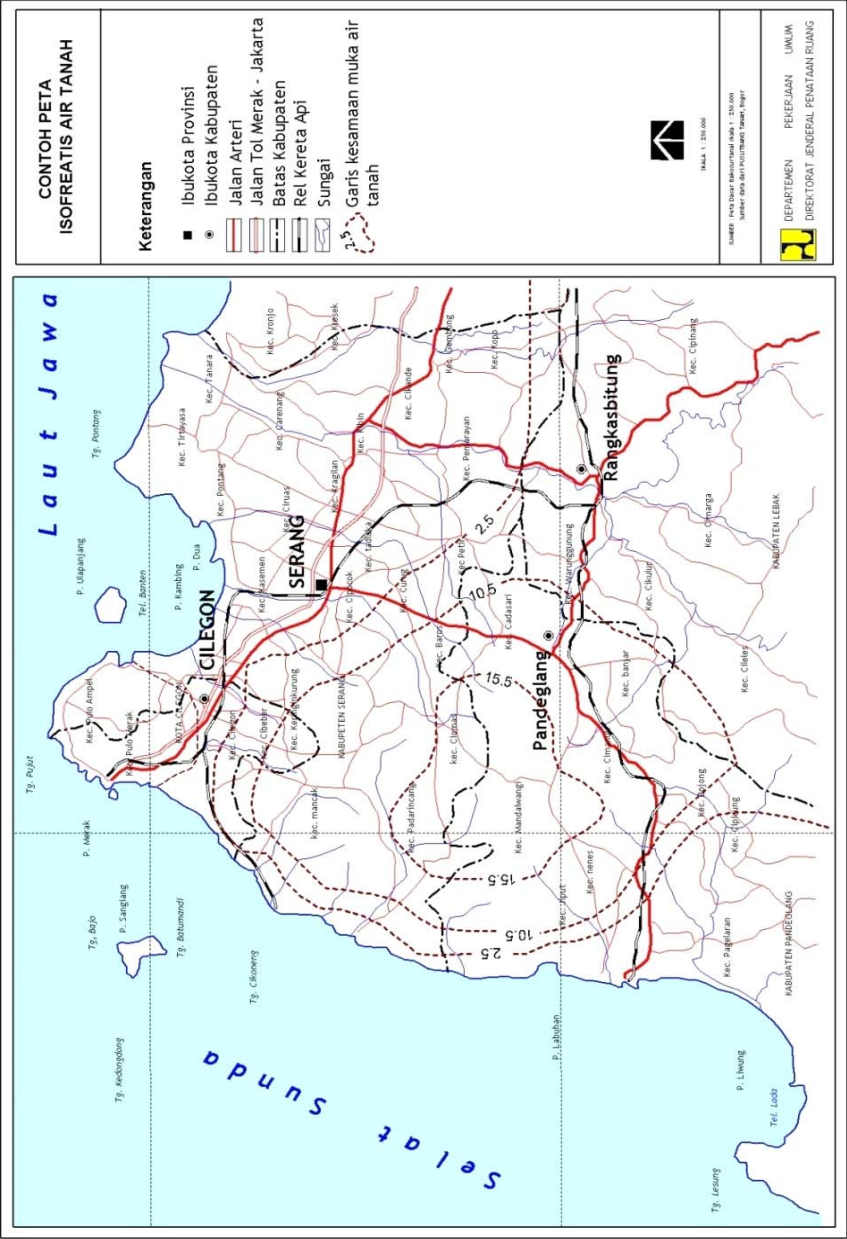


Khusus untuk air tanah bebas, data kedalaman sumur penduduk pada beberapa lokasi telah dipetakan berupa Peta Hidrologi yang memuat juga kedalamannya pada musim kering dan musim basah seperti pada Gambar 2.8. Dari data kedalaman sumur dan peta topografi dapat digambarkan peta isofreatis yang menunjukkan ketinggian muka air tanah dari muka laut seperti terlihat pada Gambar 2.9.

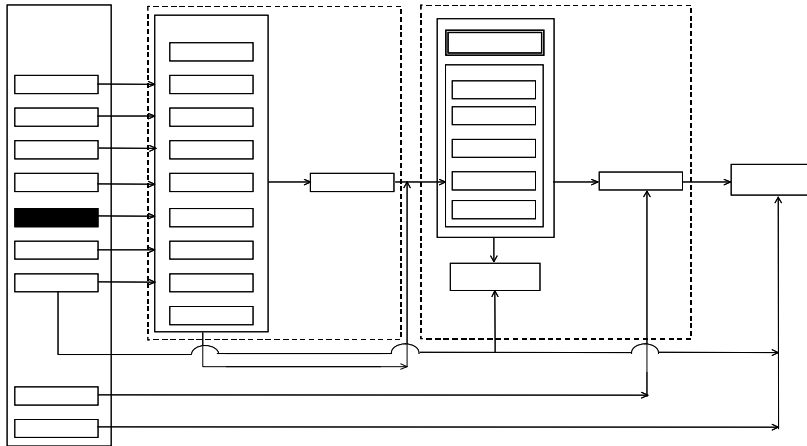
Gambar 2.8 Contoh peta potensi air tanah



Gambar 2.9 Contoh peta isofreatis tanah



2.2.5 Sumber daya mineral/bahan galian



Sumber daya mineral/bahan galian dalam penyusunan rencana tata ruang pun perlu diketahui, mengingat dalam proses pembangunan nantinya akan banyak diperlukan bahan bangunan berupa batu, pasir, dan tanah urug yang kesemuanya ini termasuk bahan galian golongan C.

Sebaran potensi bahan galian golongan C ini untuk daerah-daerah tertentu telah dilakukan pemetaannya oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau instansi lainnya yang berwenang. Namun untuk daerah yang belum dipetakan dapat dikenali di lapangan dan dipertegas dengan kondisi geologinya, juga informasi dari pemerintah daerah setempat mengenai aktivitas penambangan bahan galian golongan C ini di wilayahnya.

Sumber daya mineral lainnya yang tidak termasuk bahan galian golongan C seperti minyak bumi, batubara, dan mineral logam, juga perlu diketahui di wilayah dan/atau kawasan bilamana ada, karena akan menyangkut kemungkinan pengembangan penambangan di wilayah dan/atau kawasan dan kaitannya dengan penataan ruang.

Sumber daya mineral ini disajikan baik dalam bentuk peta seperti Gambar 2.10, maupun dalam bentuk tabel berupa jenis bahan galian, lokasi, sumber bahan galian, dan perkiraan cadangan seperti terlihat pada Tabel 2.8.

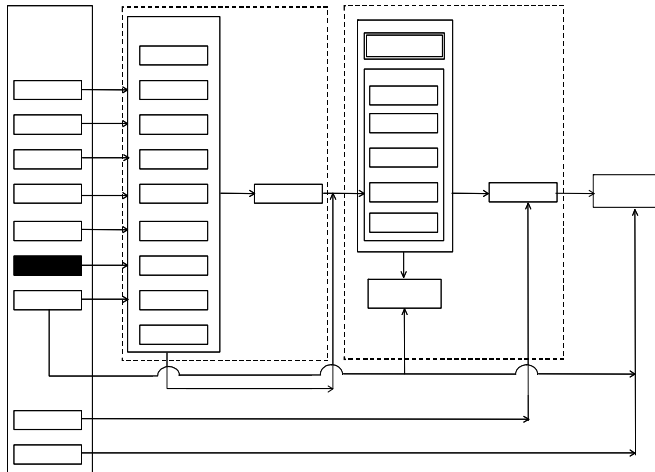
Tabel 2.8 Sumber daya mineral/bahan galian di*)

No.	Jenis Bahan Galian	Lokasi	Sumber/ Batuan Induk	Perkiraan Cadangan	Keterangan
1.					
2.					
dst					

Sumber :

*Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan*

2.2.6 Bencana alam



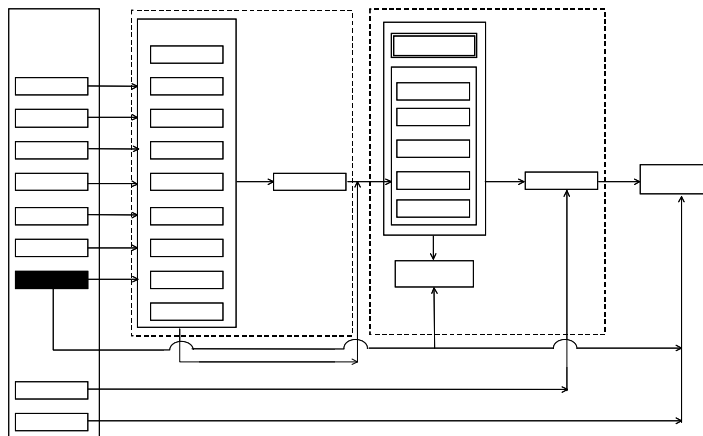
Bencana alam pada dasarnya adalah gejala atau proses alam yang terjadi akibat upaya alam mengembalikan keseimbangan ekosistem yang terganggu baik oleh proses alam itu sendiri ataupun akibat ulah manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini.

Kemungkinan bencana alam yang akan timbul di suatu daerah, dalam hal ini bencana alam beraspek geologi, seperti: banjir, longsor/gerakan tanah, amblesan, letusan gunung berapi, gempa bumi, kekeringan, dan lainnya, pada dasarnya dapat dikenali dari kondisi geologi, sejarah bencana alam yang pernah terjadi di wilayah tersebut, dan gejala bencana alam dalam bentuk lokal atau mikro yang kemungkinan akan meluas atau merupakan indikasi terjadinya bencana yang lebih makro.

Kemungkinan bencana atau daerah rawan bencana alam ini tentunya perlu dikenali sedini mungkin, agar tindakan pengamanan bila daerah tersebut memang akan dikembangkan, telah disiapkan, atau sejak dini dihindari pengembangan pada daerah rawan bencana ini.

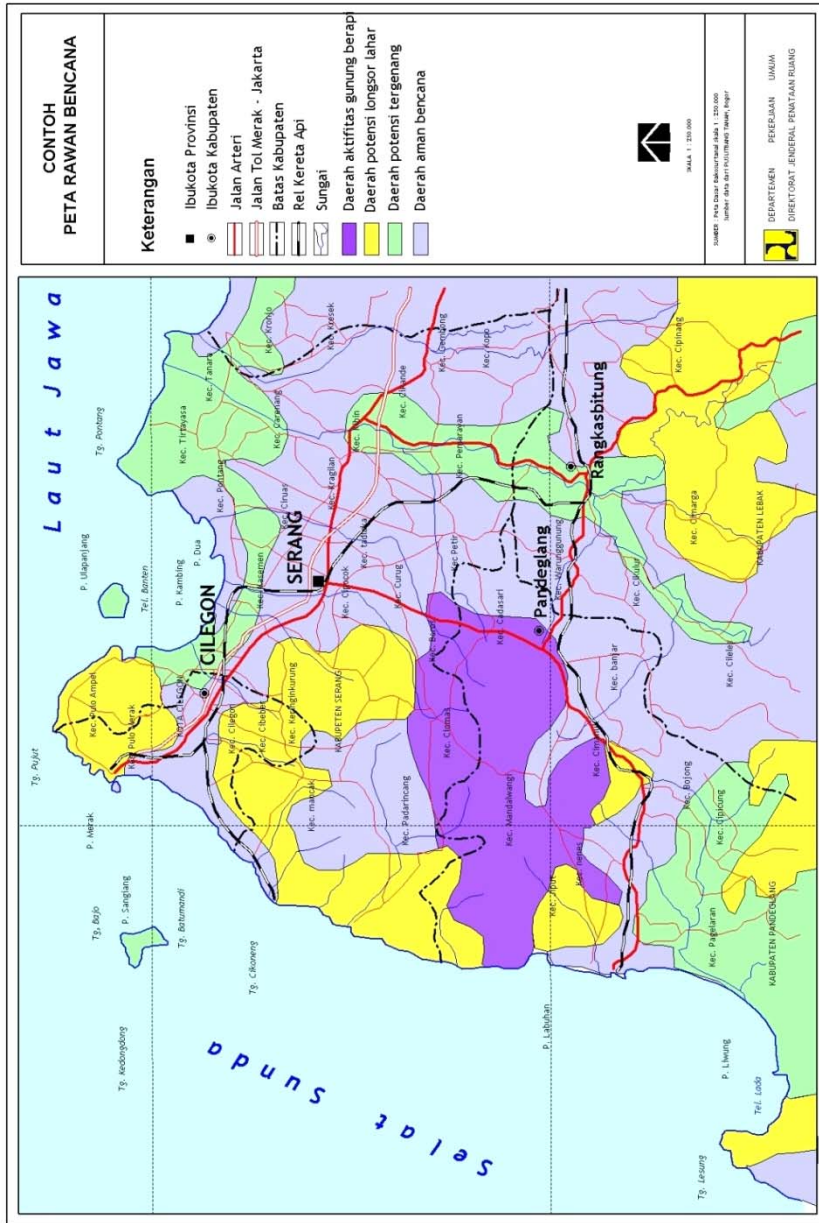
Berbagai jenis bencana alam dan daerah pengaruhnya adalah data bencana alam yang dimintakan dalam studi ini, dan bila perlu masing-masing jenis bencana disajikan dalam peta terpisah sesuai dengan ketersediaan datanya, seperti terlihat pada Gambar 2.11.

2.2.7 Penggunaan lahan



Penggunaan lahan di wilayah dan/atau kawasan perencanaan perlu diketahui secara terinci, terutama sebaran bangunan yang bersifat tidak meluluskan air/ kedap air. Hal ini berkaitan erat dengan rasio tutupan lahan yang ada saat ini yang nantinya digunakan dalam penghitungan ketersediaan air tanah bebas.

Gambar 2.11 Contoh peta rawan bencana



Selain untuk mengetahui rasio tutupan lahan, data penggunaan lahan juga diperlukan untuk mengetahui pengelompokan peruntukan lahan, termasuk aglomerasi fasilitas yang akan membentuk pusat kota serta bangunan-bangunan yang memerlukan persyaratan kemampuan lahan tinggi, yang akan digunakan dalam penentuan rekomendasi kesesuaian lahan.

Di samping itu dengan mengetahui sebaran penggunaan lahan di wilayah ini, maka akan terlihat pada daerah-daerah mana penggunaan lahan yang ternyata menyimpang dari kesesuaiannya atau melampaui kemampuannya, sehingga dapat dijadikan masukan juga dalam memberikan rekomendasi kesesuaian lahan ini.

Data penggunaan lahan disajikan berupa peta penggunaan lahan/tata guna lahan seperti terlihat pada Gambar 2.12, dan tabel luas penggunaan lahan seperti terlihat pada Tabel 2.9.

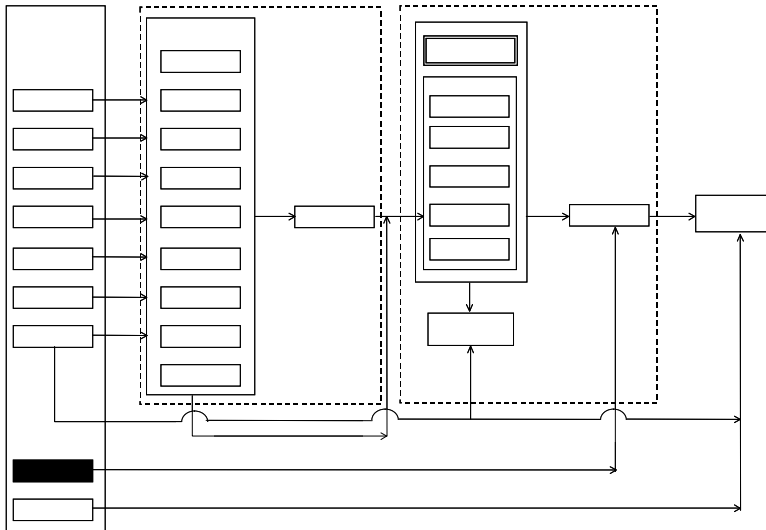
Tabel 2.9 Penggunaan lahan di*)

No	Desa	Luas (Ha)	Jenis Penggunaan Lahan				
			Permukiman	Sawah	Kebun	Hutan	DII
1.							
2.							
dst							

Sumber :

*Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan*

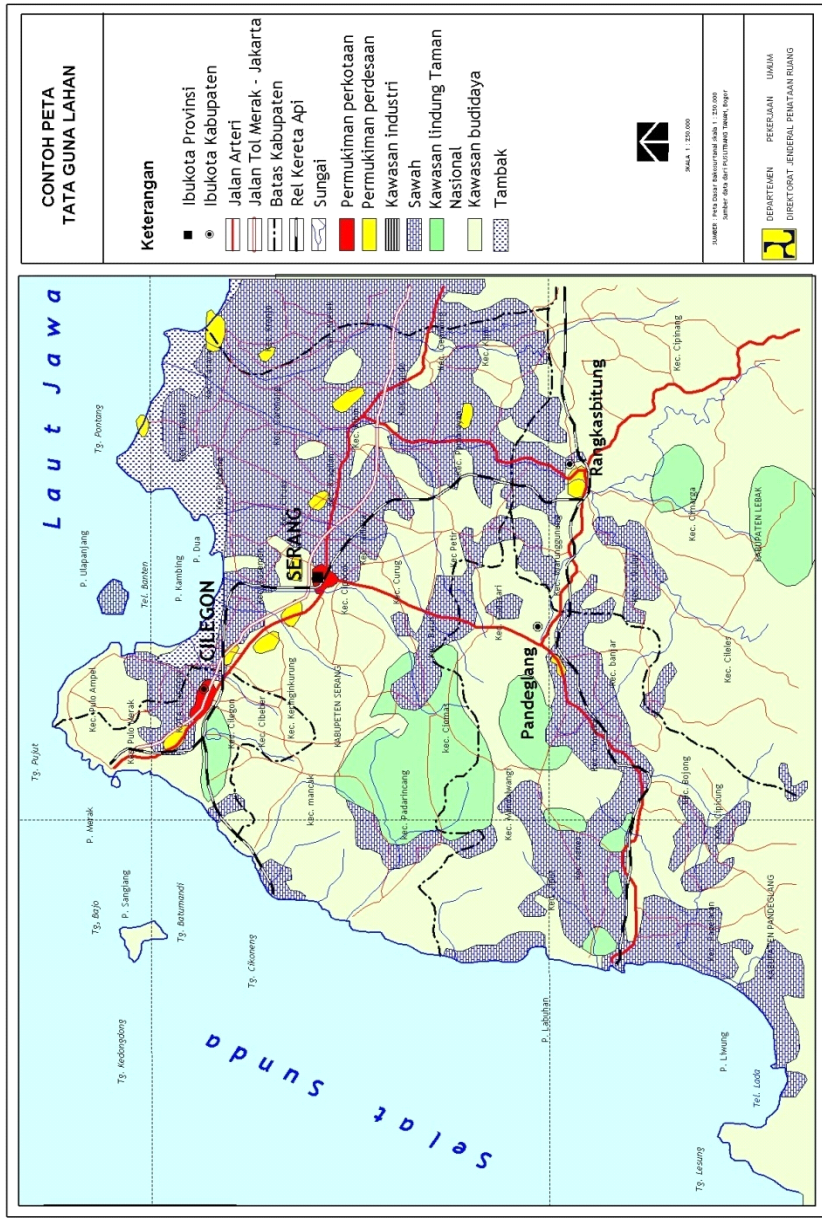
2.2.8 Studi fisik/lingkungan yang ada atau pernah dilakukan



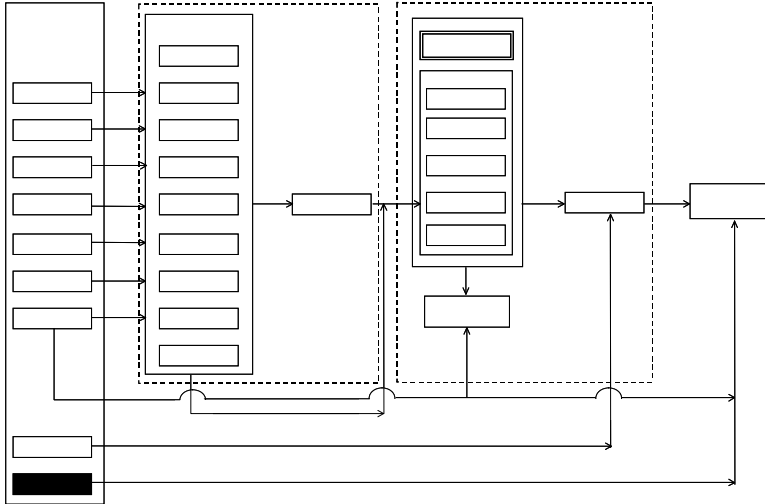
Studi-studi fisik yang pernah dilakukan menyangkut fisik ataupun lingkungan dapat diperoleh sebagai masukan data dalam analisis kelayakan fisik kawasan ini, dan harus dicantumkan sumbernya.

Studi-studi ini sangat membantu dalam penentuan arahan kesesuaian peruntukan lahan, ataupun dalam rekomendasi, karena daerah yang sudah disarankan peruntukannya dari studi terdahulu bila dalam analisis kelayakan fisik kawasan ini tidak termasuk pengembangan perkotaan dapat diperuntukan sebagaimana usulan semula. Sedangkan untuk daerah yang masuk pengembangan perkotaan tetapi arahan dari studi terdahulu sudah ada dan bukan untuk perkotaan, dapat dilakukan penyesuaian yang tentunya telah melalui pertimbangan dari berbagai sektor, yang kemudian diakomodasikan dalam hasil studi ini sebagai optimasi terakhir dalam bentuk rekomendasi kesesuaian lahan.

Gambar 2.12 Contoh peta penggunaan lahan



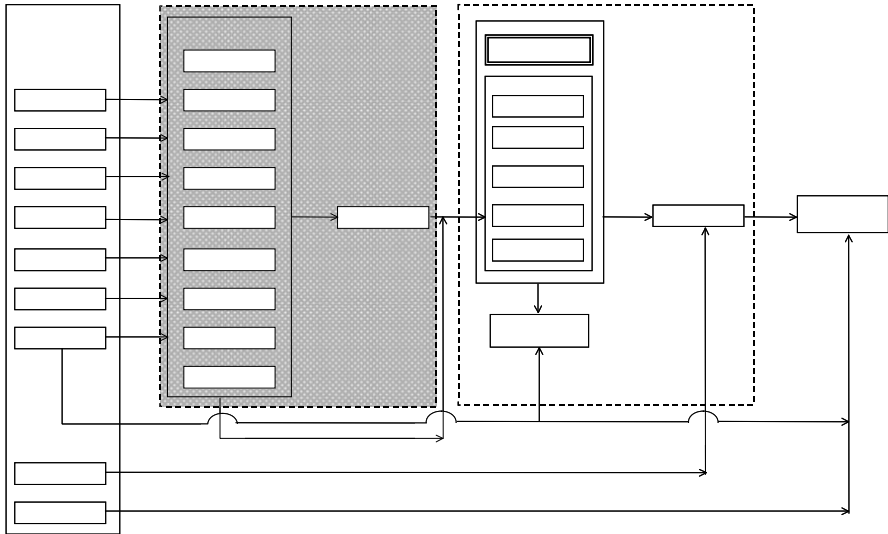
2.2.9 Kebijakan pengembangan fisik yang ada



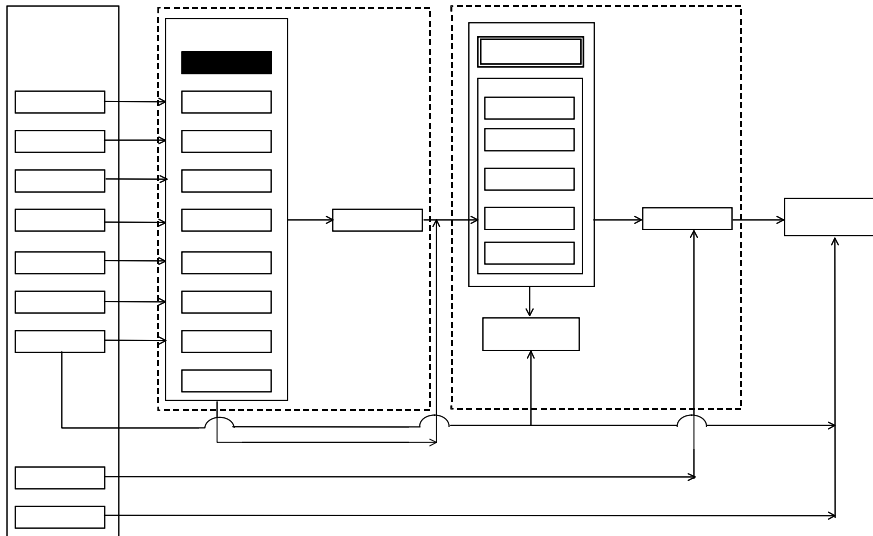
Kebijakan pengembangan fisik yang ada di wilayah dan/atau kawasan perlu diketahui, terutama kebijakan penggunaan lahan. Hal ini diperlukan dalam penentuan rekomendasi kesesuaian lahan, karena kebijakan penggunaan lahan yang telah digariskan baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah tentunya dalam rekomendasi dicoba dipenuhi dengan memberikan persyaratan-persyaratan khusus sesuai dengan kendala dan potensi yang dimilikinya.

Dengan demikian data mengenai kebijakan pengembangan fisik baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam analisis kelayakan fisik pengembangan kawasan ini harus disertakan, agar tidak menimbulkan pertentangan antara rekomendasi kesesuaian lahan dengan kebijakan yang ada dan sudah berjalan.

2.3 Analisis kemampuan lahan



2.3.1 Satuan kemampuan lahan (SKL) morfologi



Lingkup pekerjaan

Melakukan pemilahan bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah dan/atau kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya.

Sasaran

- 1) Memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan dilihat dari segi morfologinya.
- 2) Mengetahui potensi dan kendala morfologi masing-masing tingkatan kemampuan lahan terhadap morfologi.

Masukan

- 1) Peta morfologi skala terbesar yang tersedia,
- 2) Peta kemiringan lereng bila ada,
- 3) Peta morfologi bila sudah pernah dilakukan studi sejenis,
- 4) Hasil pengamatan lapangan mengenai morfologi ini.

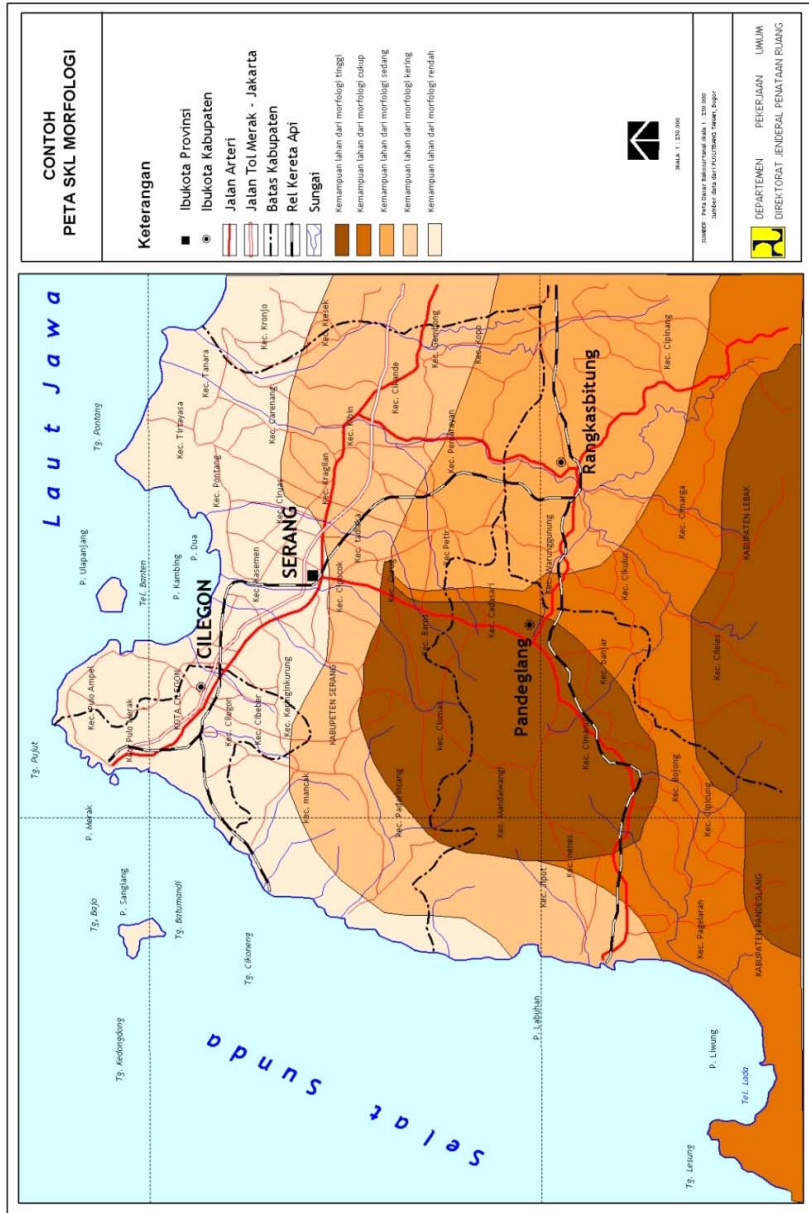
Keluaran

- 1) Peta Satuan Kemampuan Lahan Morfologi. Contoh Peta Satuan Kemampuan Lahan Morfologi dapat dilihat pada Gambar 2.13.
- 2) Potensi dan kendala morfologi masing-masing tingkatan dalam SKL Morfologi.

Langkah-langkah

- 1) Hitung kemiringan lereng wilayah perencanaan secara terinci dari peta topografi, dan sesuaikan/pertajam dengan hasil pengamatan lapangan, dengan pembagian seperti yang disyaratkan pada kompilasi data.
- 2) Dalam kasus tidak tersedia peta topografi yang memadai, kemiringan lereng ditentukan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan plotting pada peta dasar (peta ini adalah merupakan peta sketsa kemiringan lereng).
- 3) Tentukan satuan-satuan morfologi yang membentuk wilayah perencanaan berdasarkan peta topografi dan atau peta kemiringan lereng tersebut.
- 4) Tentukan tingkatan kemampuan lahan morfologi berdasarkan peta-peta hasil analisis di atas, dan persyaratan atau batasan yang diharapkan pada pengembangan kawasan.

Gambar 2.13 Contoh peta SKL morfologi

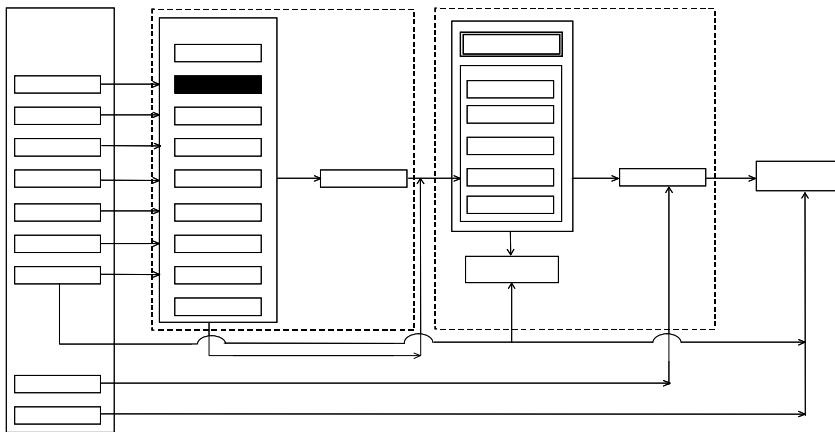


- 5) Deskripsikan potensi dan kendala morfologi masing-masing tingkatan SKL Morfologi tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Penghitungan/pengamatan kemiringan lereng dilakukan dengan teliti, karena beberapa analisis satuan kemampuan lahan menggunakan kemiringan lereng ini sebagai salah satu masukannya.

2.3.2 Satuan kemampuan lahan (SKL) kemudahan dikerjakan



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis guna mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah dan/atau kawasan untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/pengembangan kawasan.

Sasaran

- 1) Memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk digali, ditimbun, ataupun dimatangkan dalam proses pembangunan untuk pengembangan kawasan,
- 2) Mengetahui potensi dan kendala dalam pengerjaan masing-masing tingkatan kemampuan lahan kemudahan dikerjakan,

- 3) Mengetahui metode pengerjaan yang sesuai untuk masing-masing tingkatan kemampuan lahan.

Masukan

- 1) Peta Topografi,
- 2) Peta Morfologi,
- 3) Peta Kemiringan Lereng,
- 4) Peta Geologi,
- 5) Peta Geologi Permukaan,
- 6) Peta Penggunaan Lahan yang ada saat ini.

Keluaran

- 1) Peta Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan,
- 2) Deskripsi masing-masing tingkatan kemudahan dikerjakan.

Contoh Peta Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.14.

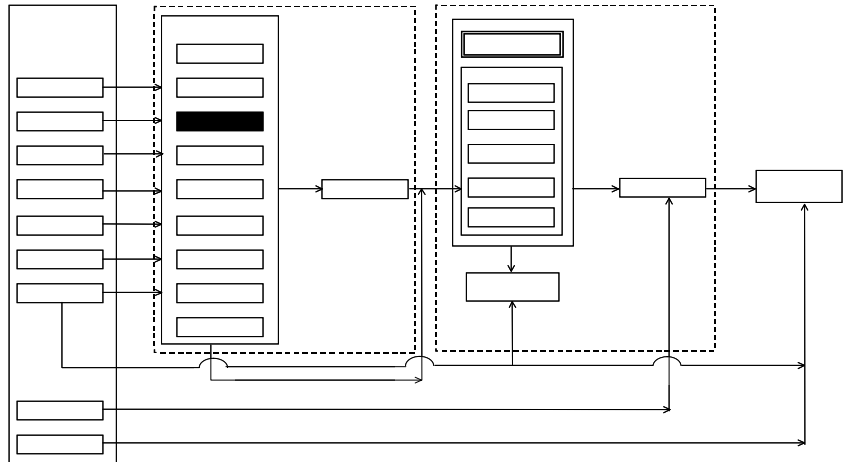
Langkah-langkah

- 1) Tentukan tingkat kekerasan batuan berdasarkan peta topografi, peta geologi, peta penggunaan lahan yang ada saat ini, dan sesuaikan dengan data geologi permukaan yang merupakan hasil pengamatan langsung di lapangan.
- 2) Tentukan kemudahan pencapaian berdasarkan peta morfologi, peta kemiringan lereng, dan penggunaan lahan yang ada saat ini.
- 3) Tentukan tingkat kemudahan dikerjakan berdasarkan kedua hal tersebut di atas, lengkap dengan deskripsi masing-masing tingkatan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Ketelitian data geologi permukaan serta penentuan lokasi pengeboran sangat menentukan ketepatan analisis tingkat kemudahan dikerjakan ini.

2.3.3 Satuan kemampuan lahan (SKL) kestabilan lereng



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah dan/atau kawasan dalam menerima beban pada pengembangan wilayah dan/atau kawasan.

Sasaran

- 1) Memperoleh gambaran tingkat kestabilan lereng untuk pengembangan wilayah dan/atau kawasan.
- 2) Mengetahui daerah-daerah yang berlereng cukup aman untuk dikembangkan sesuai dengan fungsi kawasan.
- 3) Mengetahui batasan-batasan pengembangan pada masing-masing tingkatan kestabilan lereng.

Masukan

- 1) Peta Topografi,
- 2) Peta Morfologi,
- 3) Peta Kemiringan Lereng,
- 4) Peta Geologi,
- 5) Peta Geologi Permukaan,
- 6) Karakteristik Air Tanah Dangkal,

- 7) Besar Curah Hujan,
- 8) Penggunaan lahan yang ada saat ini,
- 9) Data Bencana Alam (bahaya gerakan tanah, kegempaan, gunung berapi, dan pengikisan).

Keluaran

- 1) Peta Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng,
- 2) Deskripsi masing-masing tingkatan kestabilan lereng.

Contoh Peta Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.15.

Langkah-langkah

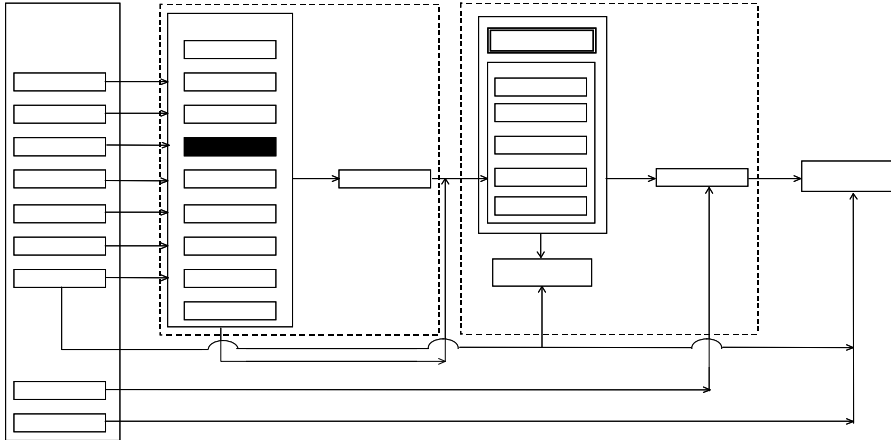
- 1) Tentukan dahulu daerah yang diperkirakan mempunyai lereng tidak stabil dari peta topografi, morfologi, dan kemiringan lereng.
- 2) Pertajam perkiraan di atas dengan memperhatikan kondisi geologi daerah-daerah tersebut.
- 3) Kaitkan hasil analisis di atas dengan kondisi geologi permukaan serta pengamatan lapangan, dan karakteristik air tanah dangkalnya.
- 4) Perhatikan penggunaan lahan yang ada saat ini pada daerah tersebut apakah bersifat memperlemah lereng atau tidak.
- 5) Bila sudah ada hasil penelitian mengenai bencana gerakan tanah di wilayah ini, maka daerah yang rawan bencana adalah daerah yang mempunyai lereng tidak stabil, dan ini merupakan masukan langsung bagi SKL Kestabilan Lereng.
- 6) Amati kondisi kegempaan di wilayah ini, karena gempa akan memperlemah kestabilan lereng.
- 7) Tentukan tingkat kestabilan lereng di wilayah ini serta deskripsi masing-masing tingkat tersebut berdasarkan tahapan-tahapan di atas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Kecermatan pengamatan lapangan dan penelitian tanah (bor dan sondir) sangat menentukan dalam SKL Kestabilan Lereng ini.
- 2) Pola dan sebaran mata air-mata air yang muncul di kaki bukit/lereng, karena kehadiran mata air yang cukup banyak pada lereng yang sama dan ketinggian tidak jauh berbeda merupakan tanda adanya bidang gelincir.

[illegible]

2.3.4 Satuan kemampuan lahan (SKL) kestabilan pondasi



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan.

Sasaran

- 1) Mengetahui gambaran daya dukung tanah secara umum,
- 2) Memperoleh gambaran tingkat kestabilan pondasi di wilayah dan/atau kawasan,
- 3) Mengetahui perkiraan jenis pondasi dari masing-masing tingkatan kestabilan pondasi.

Masukan

- 1) Peta Kestabilan Lereng,
- 2) Peta Geologi,
- 3) Peta Geologi Permukaan,
- 4) Karakteristik Air Tanah Dangkal,
- 5) Penggunaan Lahan yang ada saat ini.

Keluaran

- 1) Peta SKL Kestabilan Pondasi,
- 2) Deskripsi masing-masing tingkatan kestabilan pondasi, yang memuat juga perkiraan jenis pondasi untuk masing-masing tingkatan kestabilan pondasi.

Contoh Peta Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.16.

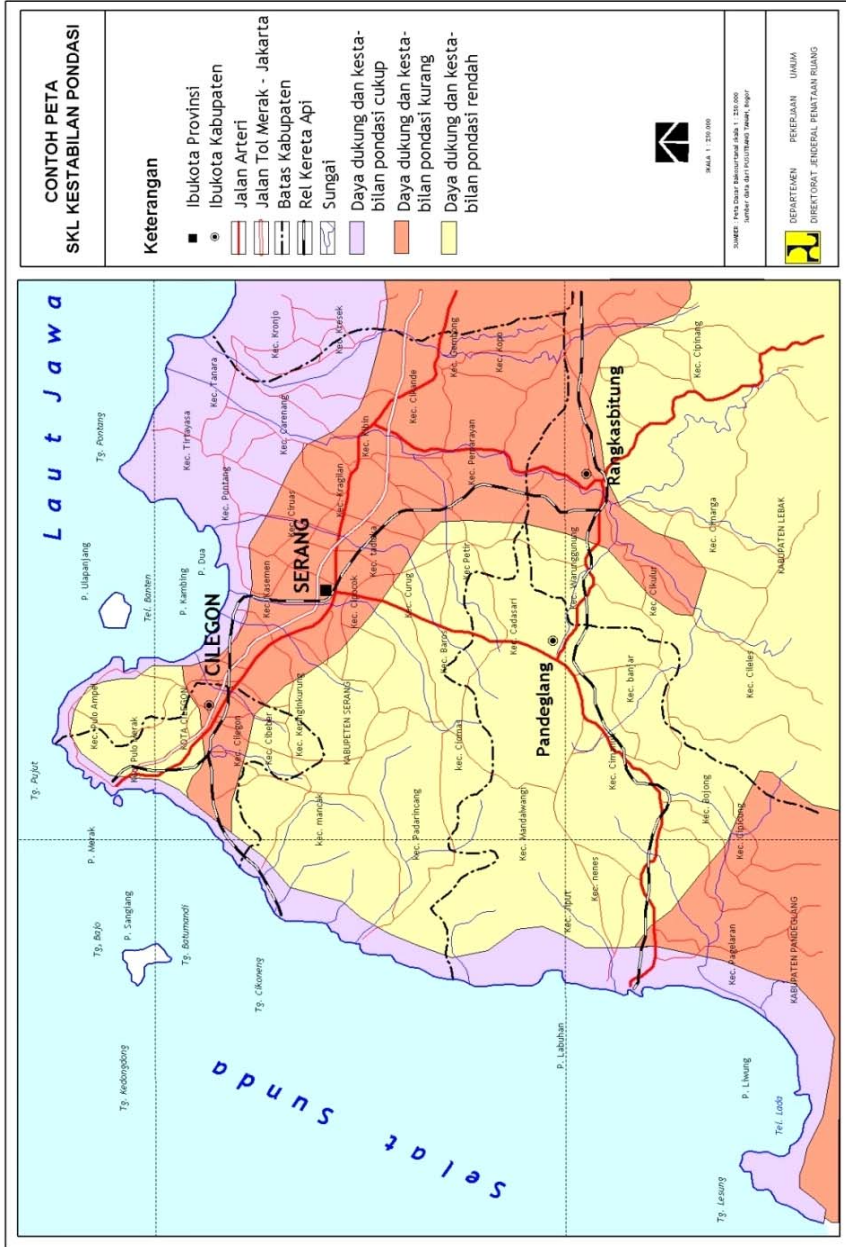
Langkah-langkah

- 1) Pisahkan daerah-daerah yang berlereng tidak stabil, karena daerah ini merupakan juga daerah yang memiliki kestabilan pondasi rendah.
- 2) Perhatikan kondisi geologi yang akan memperlemah daya dukung tanah, seperti: struktur geologi, dan bantuan yang mempunyai daya dukung lemah (gambut, batu gamping, dan lain-lain).
- 3) Kaitkan dengan kondisi geologi permukaan, yang memperlihatkan sifat fisik dan nilai konus/daya dukung masing-masing jenis tanah.
- 4) Perhatikan karakteristik air tanah dangkal, terutama kedalaman muka air tanah, dan pengaruh penyusupan air laut (terjadi salinasi).
- 5) Perhatikan penggunaan lahan yang ada saat ini, apakah ada yang bersifat memperlemah daya dukung tanah, seperti penggalian bahan galian C yang tidak beraturan.

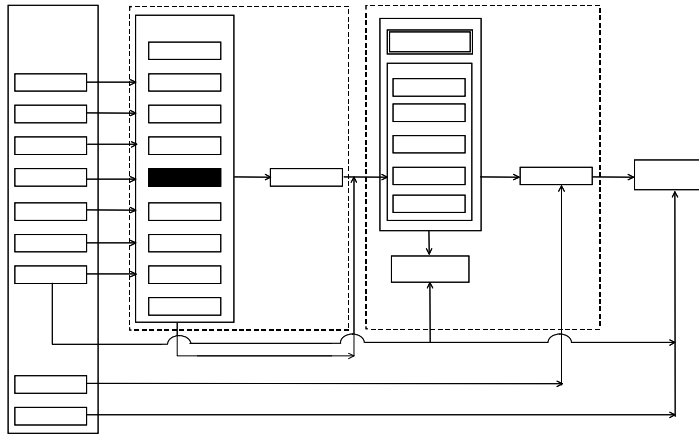
Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Penentuan lokasi pemboran dan sondir yang tepat akan membantu ketelitian analisis kestabilan pondasi ini.
- 2) Bangunan berat/tinggi yang sudah ada di salah satu tempat bukan merupakan indikasi daerah tersebut mempunyai kestabilan pondasi tinggi.

Gambar 2.16 Contoh peta SKL kestabilan pondasi



2.3.5 Satuan kemampuan lahan (SKL) ketersediaan air



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat ketersediaan air guna pengembangan kawasan, dan kemampuan penyediaan air masing-masing tingkatan.

Sasaran

- 1) Mengetahui kapasitas air untuk pengembangan kawasan,
- 2) Mengetahui sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pengembangan kawasan, dengan tidak mengganggu keseimbangan tata air,
- 3) Memperoleh gambaran penyediaan air untuk tiap tingkatan ketersediaan air, dan pengolahan secara umum untuk air dengan mutu kurang memenuhi persyaratan kesehatan.

Masukan

- 1) Data Hidrologi dan Data Klimatologi,
- 2) Peta Morfologi,
- 3) Peta Kemiringan Lereng,
- 4) Peta Geologi dan Peta Geologi Permukaan,
- 5) Penggunaan Lahan yang ada saat ini.

Keluaran

- 1) Peta SKL Ketersediaan Air.
- 2) Deskripsi masing-masing tingkatan kemampuan ketersediaan air.
- 3) Perkiraan kapasitas air permukaan dan air tanah.
- 4) Metode pengolahan sederhana untuk air yang mutunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
- 5) Sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.

Contoh Peta Satuan Kemampuan Lahan kestabilan air lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.17.

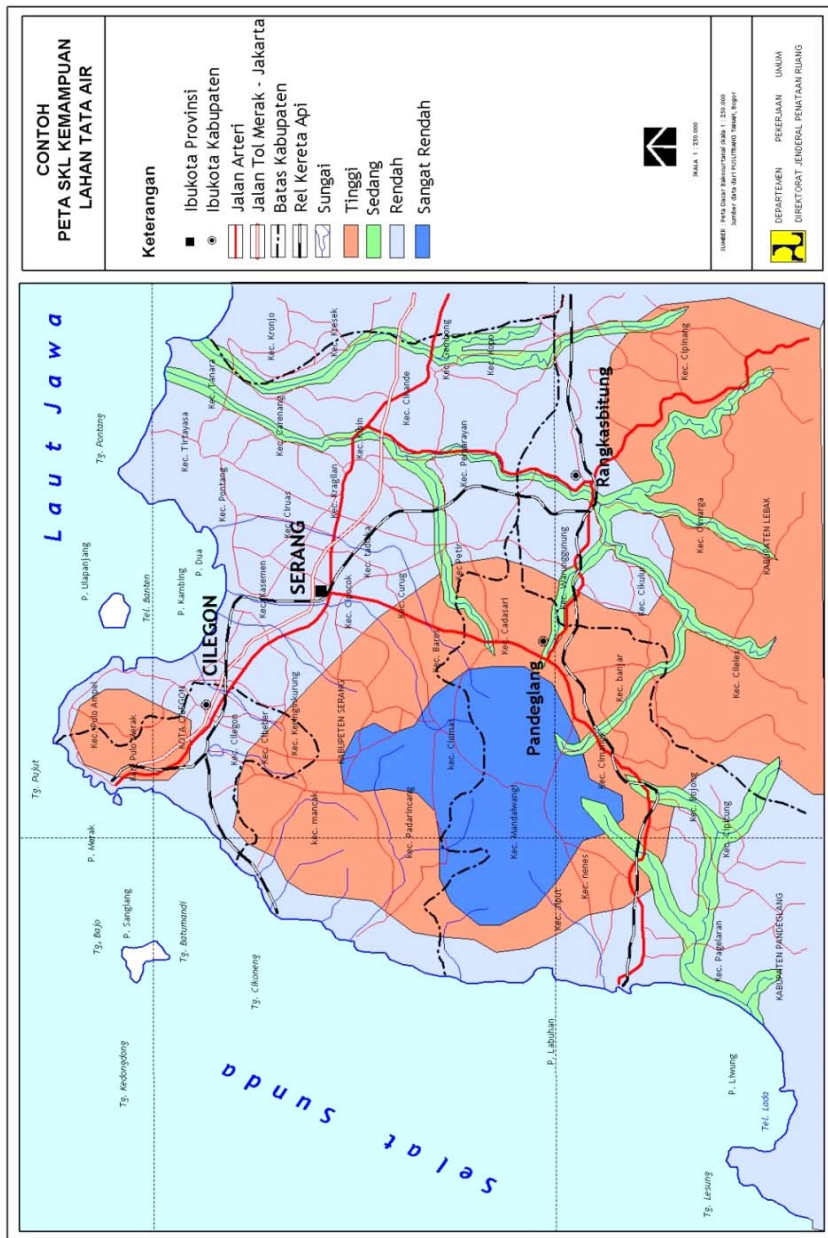
Langkah-langkah

- 1) Tentukan tingkatan ketersediaan air berdasarkan data hidrologi.
- 2) Pertajam analisis tersebut dengan melihat kondisi geologi serta geologi permukaan.
- 3) Hitung kapasitas air berdasarkan data klimatologi dan morfologi, kemiringan lereng, dengan memperhatikan juga tingkat peresapan berdasarkan kondisi geologi, geologi permukaan, serta penggunaan lahan yang ada saat ini.
- 4) Perhatikan pemanfaatan air yang ada saat ini sehingga kapasitas air hasil perhitungan pada butir 3 dapat diperluas lagi.
- 5) Uraikan kendala dan potensi masing-masing tingkatan kemampuan ketersediaan air.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

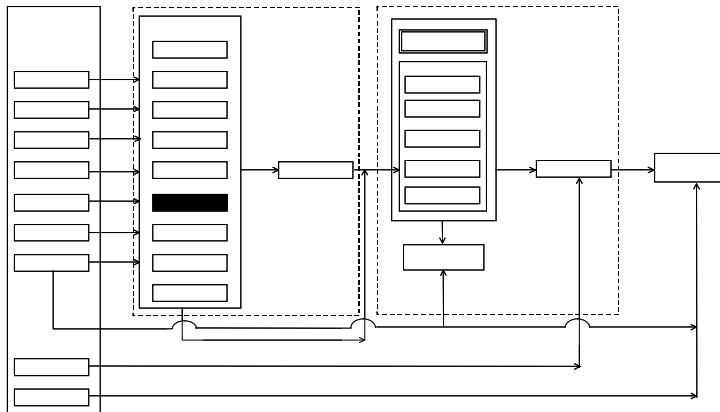
- 1) Hati-hati dalam merekomendasikan air tanah dalam atau artesis, karena tanah artesis ini pengisiannya lambat dan daerah peresapannya perlu pengaman. Eksploitasi air tanah dalam yang melebihi kapasitasnya akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti amblesan di permukaan, dan penyusupan air laut pada daerah pantai.
- 2) Data curah hujan yang digunakan dalam penghitungan ketersediaan air adalah data curah hujan minimal rata-rata (10 tahunan), karena penghitungan ini didasarkan pada ketersediaan air minimal, sehingga pada musim kering pun masih bisa disediakan air sebesar yang diperhitungkan tersebut.

Gambar 2.17 Contoh peta SKL kemampuan lahan tata air



- 3) Untuk air tanah yang mutunya kurang atau tidak memenuhi persyaratan, digolongkan dalam kemampuan yang rendah, dan tidak diperhitungkan dalam perhitungan kapasitas air. Dalam kasus air yang tersedia hanya dengan mutu demikian, maka analisis harus dilengkapi dengan pengolahan air secara sederhana untuk dapat digunakan langsung oleh penduduk.
- 4) Kondisi geologi yang perlu diperhatikan juga adalah kemungkinan adanya gejala mineralisasi baik di tempat maupun di bagian hulu, karena proses tersebut akan menimbulkan pengayaan unsur kimia tertentu yang bersifat beracun seperti Sulfur, Arsen, dan lainnya.
- 5) Penggunaan lahan yang ada saat ini yang kemungkinan bersifat mencemari air seperti: industri, pembuangan sampah, dan lainnya perlu diperhatikan dalam merekomendasikan ketersediaan air tanah ini.

2.3.6 Satuan kemampuan lahan (SKL) untuk drainase



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mematuskan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal ataupun meluas dapat dihindari.

Sasaran

- 1) Mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam proses pematusan.

- 2) Memperoleh gambaran karakteristik drainase alamiah masing-masing tingkatan kemampuan drainase.
- 3) Mengetahui daerah-daerah yang cenderung tergenang di musim penghujan.

Masukan

- 1) Peta Morfologi,
- 2) Peta Kemiringan Lereng,
- 3) Peta Topografi,
- 4) Peta Geologi,
- 5) Peta Geologi Permukaan,
- 6) Data Hidrologi dan Klimatologi,
- 7) Penggunaan Lahan yang ada saat ini.

Keluaran

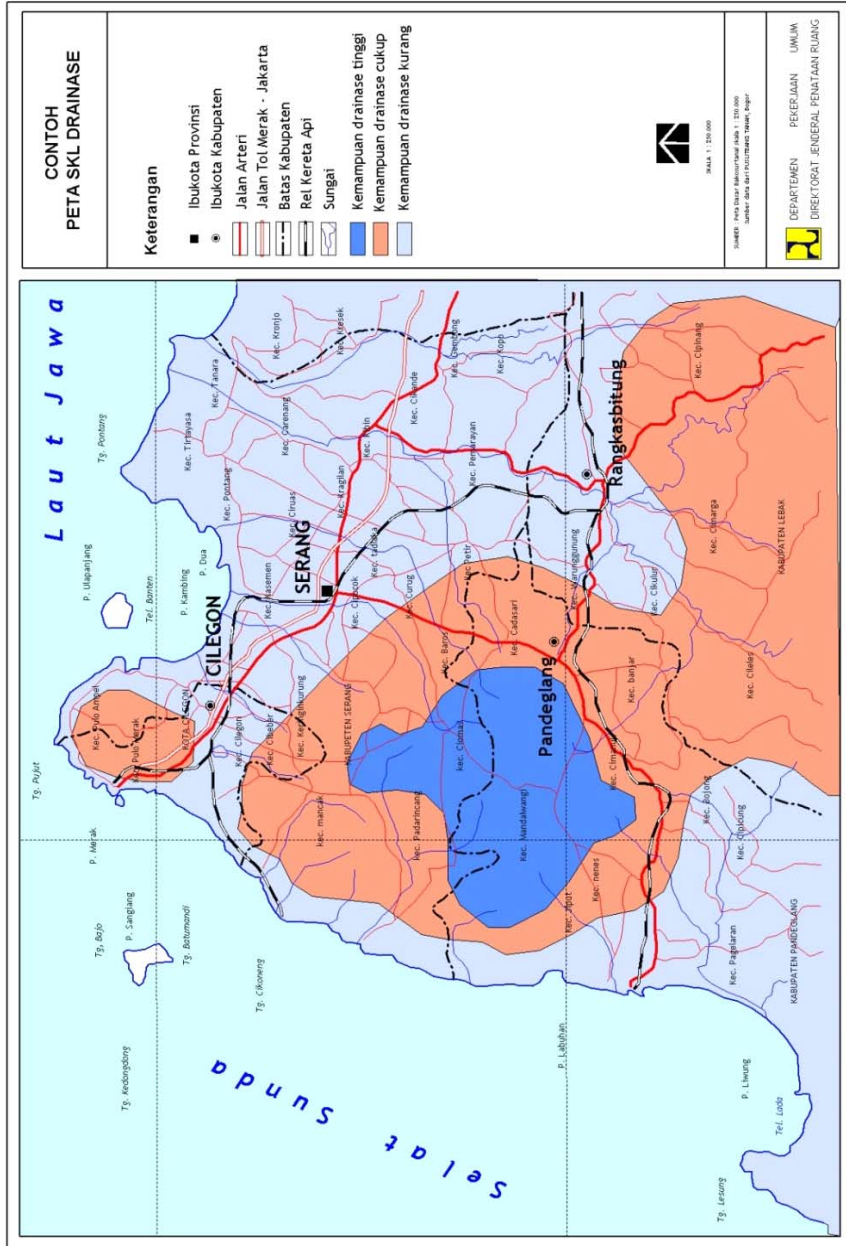
- 1) Peta SKL Drainase.
- 2) Deskripsi masing-masing tingkatan kemampuan drainase.

Contoh Peta Satuan Kemampuan Lahan Drainase lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.18.

Langkah-langkah

- 1) Tentukan tingkat kemudahan pematusan berdasarkan peta morfologi, kemiringan lereng, dan topografi.
- 2) Pertajam penentuan pada butir 1 dengan melihat kemampuan batuan/tanah dalam menyerap air guna mempercepat proses pematusan berdasarkan kondisi geologi dan geologi permukaan.
- 3) Perhatikan kondisi hidrologi yang berpengaruh dalam proses pematusan ini seperti: kedalaman muka air tanah, pola aliran sungai, dan lainnya.
- 4) Kaitkan juga analisis kemampuan drainase ini dengan kondisi klimatologi setempat.
- 5) Perhitungkan juga penggunaan lahan yang berpengaruh pada proses pematusan, seperti pengupasan bukit, kepadatan bangunan yang tinggi, penggalian bahan galian Golongan C yang tidak tersistem, dan lainnya.
- 6) Deskripsikan masing-masing tingkatan kemampuan drainase setelah memperhatikan semua hal tersebut di atas.

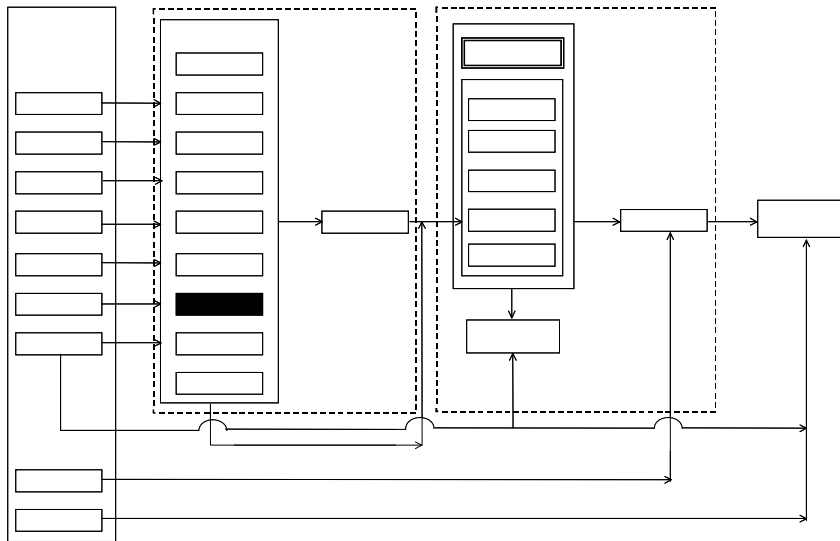
Gambar 2.18 Contoh peta SKL drainase



Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Pengaruh kondisi hidrologi penting sekali diperhitungkan, terutama mengenai pola aliran dan karakteristik sungai, dan kedalaman muka air tanah.
- 2) Tingkat kemampuan drainase yang ditekankan di sini adalah proses pematuran alamiah, bukan dalam pengertian jaringan drainase.

2.3.7 Satuan kemampuan lahan (SKL) terhadap erosi



Sasaran

- 1) Mengetahui tingkat keterkikisan tanah di wilayah dan/atau kawasan perencanaan.
- 2) Mengetahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi.
- 3) Memperoleh gambaran batasan pada masing-masing tingkatan kemampuan terhadap erosi.
- 4) Mengetahui daerah yang peka terhadap erosi dan perkiraan arah pengendapan hasil erosi tersebut pada bagian hilirnya.

Masukan

- 1) Peta Permukaan,
- 2) Peta Geologi,
- 3) Peta Morfologi,
- 4) Peta Kemiringan Lereng,
- 5) Data Hidrologi dan Klimatologi,
- 6) Penggunaan Lahan yang ada saat ini.

Keluaran

- 1) Peta SKL Terhadap Erosi.
- 2) Deskripsi masing-masing tingkatan kemampuan lahan terhadap erosi tersebut.

Contoh Peta Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.19.

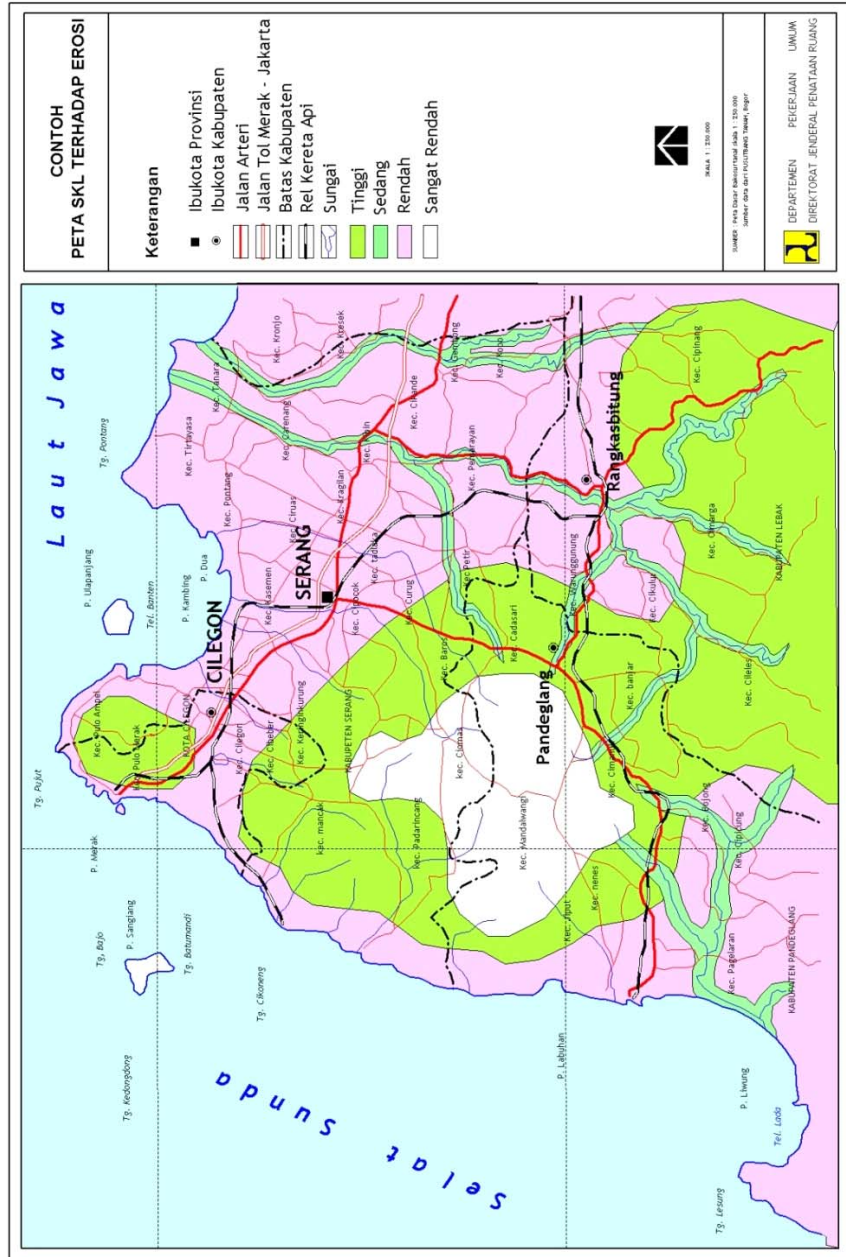
Langkah-langkah

- 1) Tentukan tingkat keterkikisan berdasarkan peta geologi permukaan, peta geologi, peta morfologi, dan peta kemiringan lereng.
- 2) Pertajam batasan tersebut dengan memperhatikan kondisi hidrologi dan klimatologi seperti: pola aliran dan karakteristik sungai, debit sungai, curah hujan, kecepatan dan arah angin.
- 3) Perhatikan juga penggunaan lahan yang mempengaruhi aktivitas erosi tersebut seperti: pengupasan lahan terutama pada perbukitan, penggalian bahan galian Golongan C yang tidak tersistem, dan lainnya.
- 4) Tentukan tingkat ketahanan terhadap pengikisan ini setelah diperoleh tingkat keterkikisan di atas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

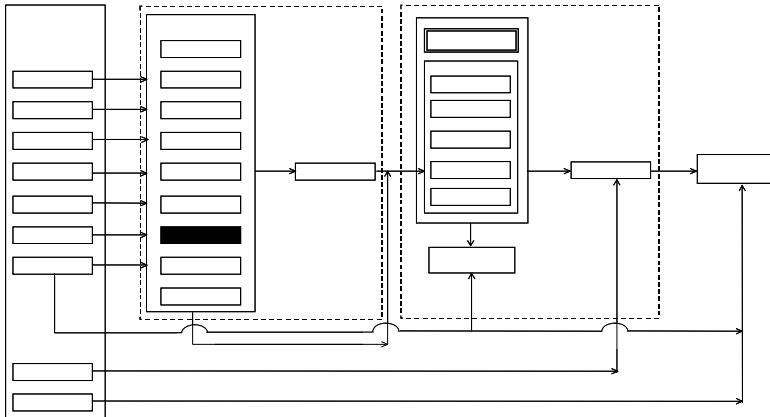
- 1) Peta geologi permukaan yang memuat juga sifat fisik tanah/batu merupakan penentu untuk SKL Terhadap Erosi ini, oleh karenanya diperlukan sekali ketelitian data ini.
- 2) SKL Terhadap Erosi ini seringkali berlawanan dengan SKL Untuk Drainase, namun demikian tidak berarti berlaku umum dengan menganggap SKL

Gambar 2.19 Contoh peta SKL terhadap erosi



Terhadap Erosi ini adalah kebalikan dari SKL Untuk Drainase, dan tidak berarti pula pada waktu di-*superimpose*-kan akan saling menghilangkan, karena kedua SKL ini berbeda bobotnya dalam suatu wilayah dan/atau kawasan.

2.3.8 Satuan kemampuan lahan (SKL) pembuangan limbah



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair.

Sasaran

- 1) Mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah padat atau sampah.
- 2) Mengetahui daerah yang mampu untuk ditempati lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah cair.
- 3) Mempersiapkan daerah-daerah tersebut dan pengamanannya sebagai lokasi pembuangan akhir limbah.

Masukan

- 1) Peta Morfologi, Kemiringan Lereng dan Topografi,
- 2) Peta Geologi dan Geologi Permukaan,
- 3) Data Hidrologi dan Klimatologi,
- 4) Penggunaan Lahan yang ada saat ini.

Keluaran

- 1) Peta SKL Pembuangan Limbah, contoh Peta SKL Pembuangan Limbah dapat dilihat pada Gambar 2.20.
- 2) Perkiraan prioritas lokasi pembuangan sampah dan daya tampung lokasi.

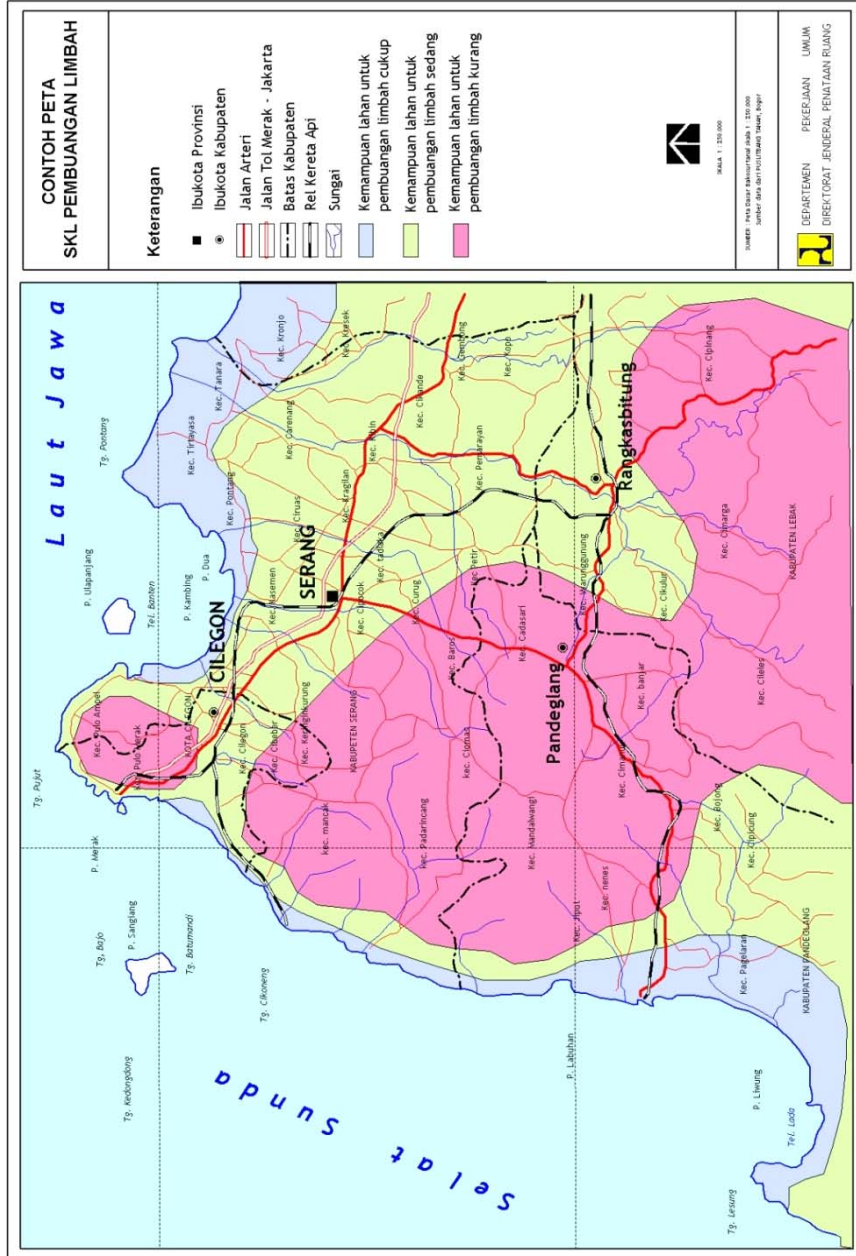
Langkah-langkah

- 1) Menentukan daerah yang mampu sebagai tempat pembuangan akhir sampah berdasarkan morfologi, kemiringan lereng, dan topografinya.
- 2) Mempertajam batasan daerah yang relatif kedap air berdasarkan kondisi geologi dan geologi permukaan.
- 3) Memperhatikan kondisi hidrologi dan klimatologi, yakni: curah hujan, pola aliran air baik permukaan maupun air tanah, dan kedalaman muka air tanah dangkal.
- 4) Memperhalus analisis kemampuan pembuangan limbah ini dengan mempertimbangkan kondisi penggunaan lahan yang ada saat ini, yakni jarak pencapaian, jenis penggunaan lahan di sekitar daerah yang diusulkan, dan kemungkinan jenis limbah yang akan dihasilkan.

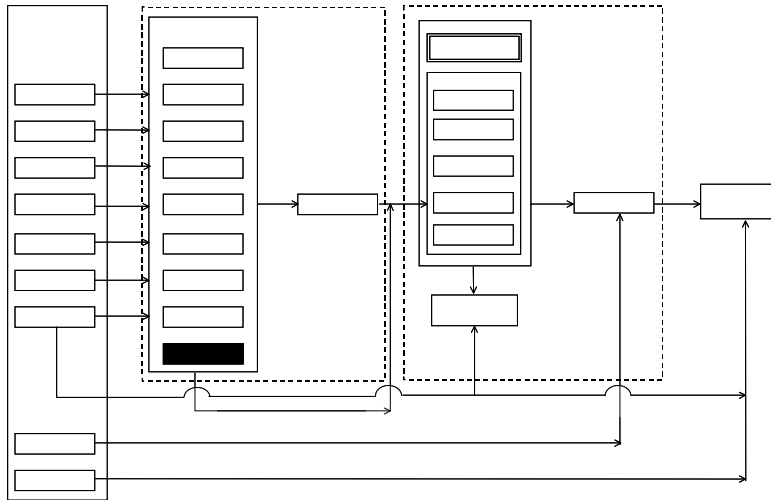
Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Peresapan dan pengaliran air yang melalui penampungan tersebut hendaknya benar-benar diperhitungkan dalam analisis, dikaitkan dengan pemanfaatan air tersebut pada daerah hilirnya. Hal ini tentunya memerlukan ketajaman analisis menurut kondisi hidrologi dan geologinya.
- 2) Jenis limbah yang akan ditempatkan juga harus diperhitungkan untuk menghindari bahan berbahaya dan beracun (B3), karena jenis limbah ini memerlukan lokasi pembuangan khusus.
- 3) Penggunaan lahan yang ada saat ini, terutama permukiman dan prasarana kota lainnya hendaknya jauh dari daerah yang diusulkan, mengingat berbagai kesulitan yang mungkin timbul akibat penampungan tersebut.

Gambar 2.20 Contoh peta SKL pembuangan limbah



2.3.9 Satuan kemampuan lahan (SKL) terhadap bencana alam



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi, untuk menghindari/mengurangi kerugian dan korban akibat bencana tersebut.

Sasaran

- 1) Mengetahui tingkat kemampuan wilayah perencanaan terhadap berbagai jenis bencana alam beraspekkan geologi.
- 2) Mengetahui daerah-daerah yang rawan bencana alam dan mempunyai kecenderungan untuk terkena bencana alam, termasuk bahaya ikutan dari bencana tersebut.
- 3) Mengetahui pola pengembangan dan pengamanan masing-masing tingkat kemampuan lahan terhadap bencana alam.

Masukan

- 1) Data Bencana Alam,
- 2) Peta Topografi, Morfologi, dan Kemiringan Lereng,
- 3) Peta Geologi dan Geologi Permukaan,

- 4) Data Hidrologi dan Klimatologi,
- 5) Penggunaan Lahan yang ada saat ini.

Keluaran

- 1) Peta SKL terhadap bencana alam. Contoh Peta SKL terhadap Bencana Alam dapat dilihat pada Gambar 2.21.
- 2) Deskripsi masing-masing tingkatan kemampuan lahan terhadap bencana alam tersebut.
- 3) Batasan pengembangan pada masing-masing tingkat kemampuan terhadap bencana alam tersebut.

Langkah-langkah

- 1) Menentukan tingkat kemampuan lahan terhadap bencana alam berdasarkan data bencana alam.
- 2) Mempertajam penentuan di atas dengan memperhitungkan kecenderungan untuk terkena bencana berdasarkan peta topografi, morfologi, kemiringan lereng, kondisi geologi, geologi permukaan dan data hidrologi serta klimatologi.
- 3) Menganalisis penggunaan lahan yang ada saat ini yang memperbesar kemungkinan terkena bencana alam, seperti penggalian sumber mineral atau bahan galian golongan C, peningkatan aktivitas perkotaan pada daerah-daerah rawan bencana, pengupasan hutan/bukit, gangguan pada keseimbangan tata air baik air permukaan maupun tanah.
- 4) Menentukan batasan pengembangan pada masing-masing tingkat kemampuan lahan terhadap bencana alam tersebut, yang merupakan deskripsi lengkap setiap tingkatan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Setiap gejala bencana alam hendaknya diperhitungkan dalam analisis, karena data ini merupakan indikasi kehadiran bencana alam tersebut.
- 2) Kehati-hatian dalam melakukan analisis ini, karena akibat bencana yang muncul sangat merugikan. Oleh karenanya ketelitian data sangat diperlukan.
- 3) Kemungkinan suatu jenis bencana alam beraspekkan geologi, hendaknya diperkirakan juga kemungkinan bencana ikutannya seperti kemungkinan longsoran akibat guncangan gempa.

CONTOH
PETA BENCANA ALAM

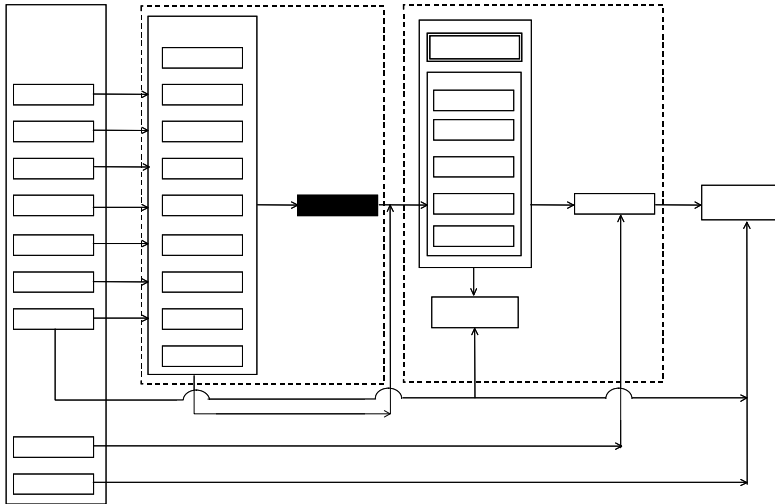
Keterangan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Jalan Arteri
- Jalan Tol Merak - Jakarta
- Batas Kabupaten
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Gerakan tanah: tertiap pada bahan gamping, soil muda dengan kontrol lereng
- Gerakan tanah: tertiap pada bahan sedimen, beku dan ubahan dengan kontrol kesesuaian budidaya
- Gerakan tanah: tertiap pada bahan sedimen, beku dan ubahan dengan kontrol lereng, bukit, dan lereng
- Gerakan tanah: tertiap, area pemukiman
- Gerakan tanah: sangat kecil, erodasi, endapan alluvium dan built gamping erosi, lereng sungai dan lereng tepi pantai
- Rawa

Skala 1 : 500.000

DEPARTEMEN PERENCANAAN UMUM
DIREKTORAT ENJEK, PENANATAN RUANG

2.3.10 Analisis kemampuan lahan



Melakukan analisis untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan, sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya.

Sasaran

- 1) Mendapatkan klasifikasi kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai fungsi kawasan.
- 2) Memperoleh gambaran potensi dan kendala masing-masing kelas kemampuan lahan.
- 3) Sebagai dasar penentuan: arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya dan rekomendasi akhir kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan.

Masukan

Semua data yang dimintakan pada tahap pengumpulan data, kecuali data kebijaksanaan yang sudah ada.

Keluaran

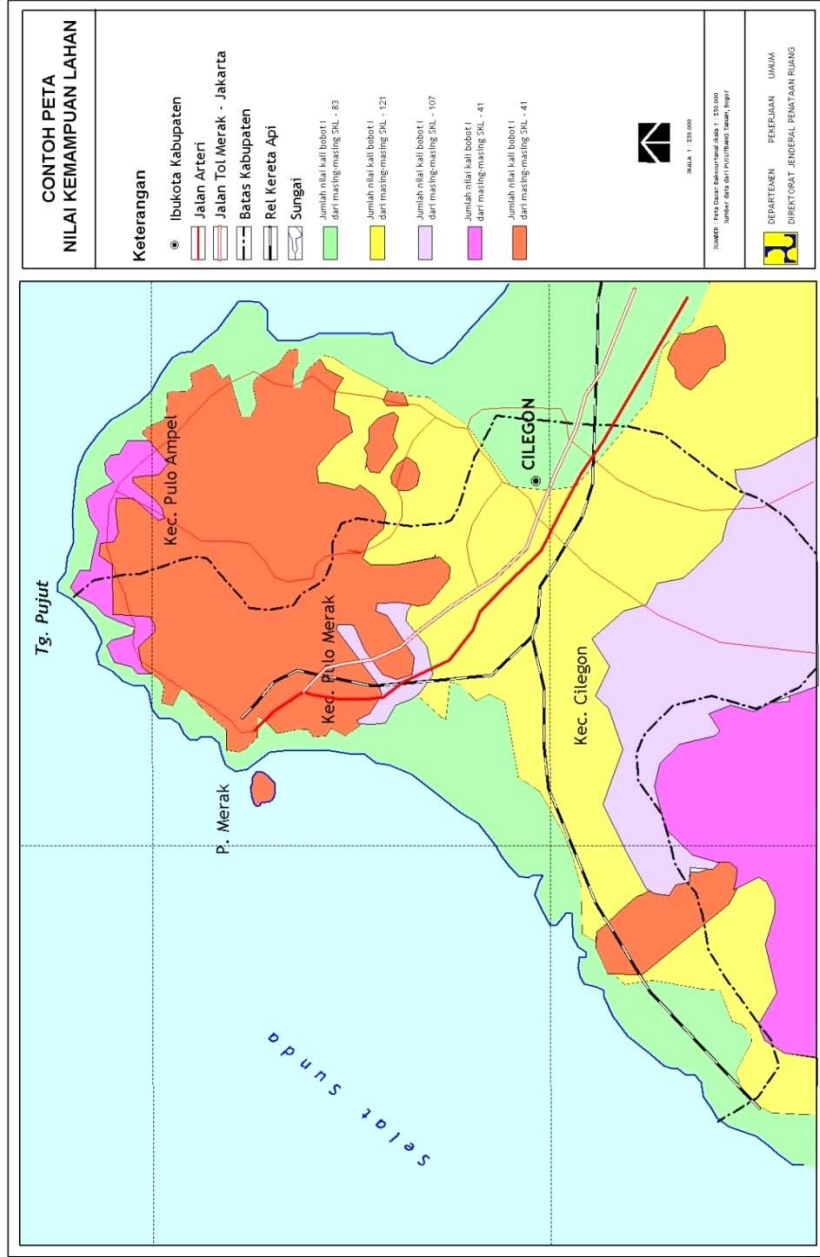
- 1) Peta klasifikasi kemampuan lahan untuk pengembangan kawasan.
- 2) Kelas-kelas atau tingkatan kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai dengan fungsi kawasan.
- 3) Uraian potensi dan kendala fisik masing-masing kelas kemampuan lahan.

Contoh Peta Nilai Kemampuan Lahan dan Peta Arahan Kesesuaian Lahan dapat dilihat pada Gambar 2.22 dan Gambar 2.23.

Langkah-langkah

- 1) Melakukan analisis satuan-satuan kemampuan lahan, untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan pada masing-masing satuan kemampuan lahan.
- 2) Tentukan nilai kemampuan setiap tingkatan pada masing-masing satuan kemampuan lahan, dengan penilaian 5 (lima) untuk nilai tertinggi dan 1 (satu) untuk nilai terendah.
- 3) Kalikan nilai-nilai tersebut dengan bobot dari masing-masing satuan kemampuan lahan. Bobot ini didasarkan pada seberapa jauh pengaruh satuan kemampuan lahan tersebut pada pengembangan perkotaan. Bobot yang digunakan hingga saat ini adalah seperti terlihat pada Tabel 2.10.
- 4) *Superimpose*-kan semua satuan-satuan kemampuan lahan tersebut, dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai kali bobot dari seluruh satuan-satuan kemampuan lahan dalam satu peta, sehingga diperoleh kisaran nilai yang menunjukkan nilai kemampuan lahan di wilayah dan/atau kawasan perencanaan.

Gambar 2.22 Contoh peta nilai kemampuan lahan



**CONTOH
PETA KLASIFIKASI
KEMAMPUAN LAHAN**

Keterangan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Jalan Arteri
- - - Jalan Tol Merak - Jakarta
- - - Batas Kabupaten
- Rel Kereta Api
- Sungai

Zona I - Lahan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk pengembangan perkotaan

Zona II - Lahan yang cukup mempunyai kemampuan untuk pengembangan perkotaan

Zona III - Lahan yang mempunyai kemampuan sedang untuk pengembangan perkotaan

Zona IV - Lahan yang kurang mampu dikembangkan untuk perkotaan

Zona V - Lahan yang tidak mampu dikembangkan untuk perkotaan

SKALA 1 : 250.000

JUMUD 1993 Dikerjakan oleh: 123.000
Sumber data: Kantor Wilayah BPT, BPT

DEPARTEMEN PERRENTAN LUMAH
DIREKTORAT MANEJEMEN PERRENTAN LUMAH

Tabel 2.10 Pembobotan satuan kemampuan lahan

No.	Satuan Kemampuan Lahan	Bobot
1.	SKL Morfologi	5
2.	SKL Kemudahan Dikerjakan	1
3.	SKL Kestabilan Lereng	5
4.	SKL Kestabilan Pondasi	3
5.	SKL Ketersediaan Air	5
6.	SKL Terhadap Erosi	3
7.	SKL Untuk Drainase	5
8.	SKL Pembuangan Limbah	0
9.	SKL Terhadap Bencana Alam	5

- 5) Tentukan selang nilai yang akan digunakan sebagai pembagi kelas-kelas kemampuan lahan, sehingga diperoleh zona-zona kemampuan lahan dengan nilai - yang menunjukkan tingkatan kemampuan lahan di wilayah ini, dan digambarkan dalam satu peta klasifikasi kemampuan lahan untuk perencanaan tata ruang.

Pembuatan peta nilai kemampuan lahan ini yang merupakan penjumlahan nilai dikalikan bobot ini ada dua cara, yakni:

- Men-*superimpose*-kan setiap satuan kemampuan lahan yang telah diperoleh hasil pengalihan nilai dengan bobotnya secara satu persatu, sehingga kemudian diperoleh peta jumlah nilai dikalikan bobot seluruh satuan secara kumulatif.
- Membagi peta masing-masing satuan kemampuan lahan dalam sistem *grid*, kemudian memasukkan nilai dikalikan bobot masing-masing satuan kemampuan lahan ke dalam *grid* tersebut. Penjumlahan nilai dikalikan bobot secara keseluruhan adalah tetap dengan menggunakan *grid*, yakni menjumlahkan hasil nilai dikalikan bobot seluruh satuan kemampuan lahan pada setiap *grid* yang sama.

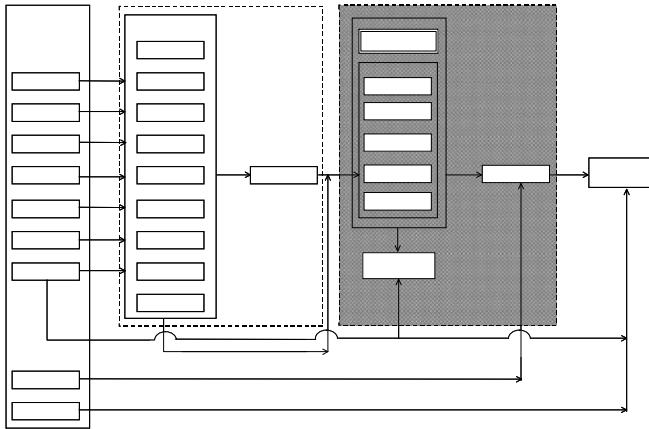
Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Penentuan klasifikasi kemampuan lahan tidak mutlak berdasarkan selang nilai, tetapi memperhatikan juga nilai terendah = 1 dari beberapa satuan kemampuan lahan, yang merupakan nilai penentu apakah selang nilai tersebut berlaku atau tidak. Dengan demikian apabila ada daerah atau zona tertentu yang mempunyai selang nilai cukup tinggi, tetapi karena mempunyai nilai terendah dan menentukan, maka mungkin saja kelas kemampuan lahannya tidak sama dengan daerah lain yang memiliki nilai kemampuan lahan yang sama.

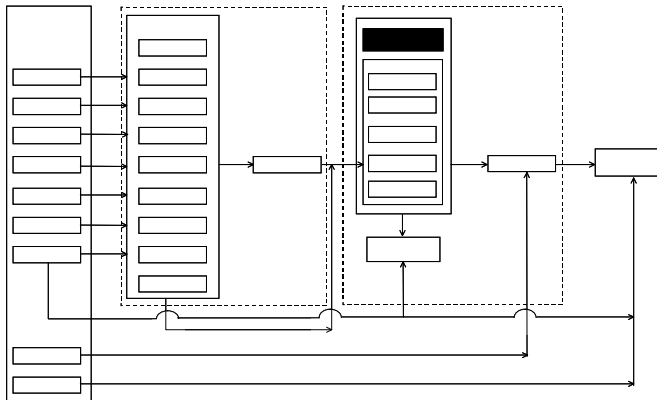
Sebagai contoh, daerah yang secara kumulatif nilainya cukup tinggi atau sedang, namun berada pada daerah rawan longsor, tentunya kelas kemampuan lahannya tidak sama dengan daerah lain yang relatif aman, walaupun nilai kemampuan lahannya sama. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat penjumlahan secara matematis akan menyebabkan ada faktor-faktor yang mengakibatkan jumlah akhir menjadi tinggi.

- 2) Klasifikasi kemampuan lahan yang dihasilkan di sini adalah hanya berdasarkan kondisi fisik apa adanya, belum mempertimbangan hal-hal yang bersifat non-fisik.

2.4 Analisis kesesuaian lahan



2.4.1 Arahan tata ruang pertanian

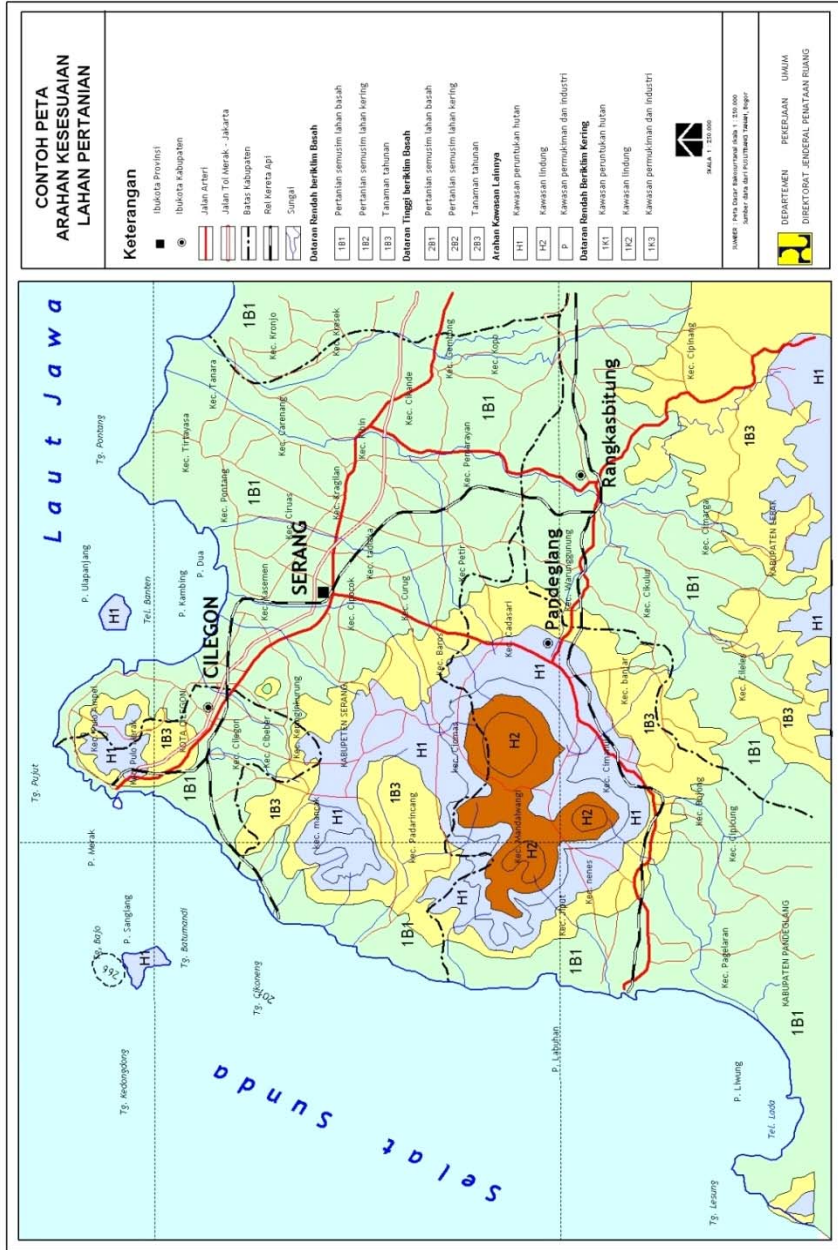


Menggunakan data:

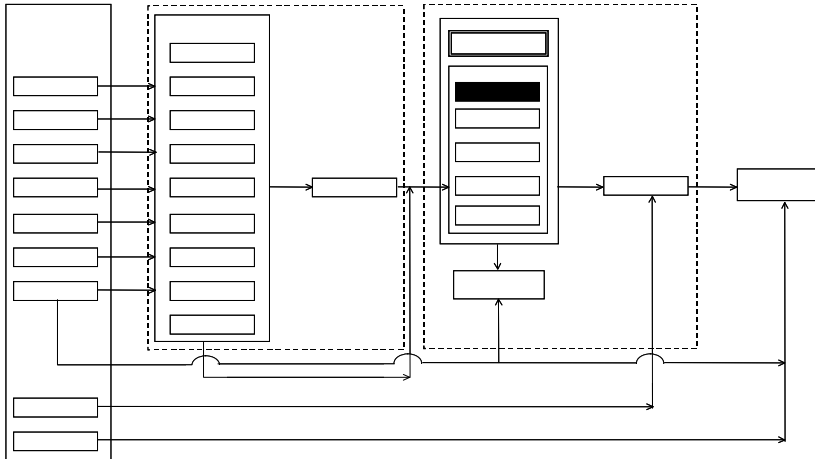
ATLAS Arahan Tata Ruang Pertanian Indonesia Skala 1:1.000.000 oleh Departemen Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, 2001.

Sedangkan contoh peta arahan tata ruang pertanian dapat dilihat pada Gambar 2.24.

Gambar 2.24 Contoh peta arahan kesesuaian lahan pertanian



2.4.2 Arahan rasio tutupan



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk mengetahui gambaran perbandingan daerah yang bisa tertutup oleh bangunan bersifat kedap air dengan luas lahan keseluruhan.

Sasaran

- 1) Mengetahui perbandingan daerah yang boleh dibangun dengan luas lahan keseluruhan.
- 2) Memperoleh tingkatan rasio tutupan lahan sesuai dengan kendala fisik masing-masing tingkatan.
- 3) Memperoleh gambaran arahan dan luas daerah pengembangan sesuai dengan arahan rasio tutupan lahan.

Masukan

- 1) Klasifikasi Kemampuan Lahan,
- 2) SKL Untuk Drainase,
- 3) SKL Kestabilan Lereng,
- 4) SKL Terhadap Erosi,
- 5) SKL Terhadap Bencana Alam.

Keluaran

- 1) Peta Arahan Rasio Tutupan Lahan. Contoh Peta Arahan Rasio Tutupan Lahan dapat dilihat pada Gambar 2.25.
- 2) Batasan rasio tutupan lahan pada masing-masing arahan serta persyaratan pengembangannya.

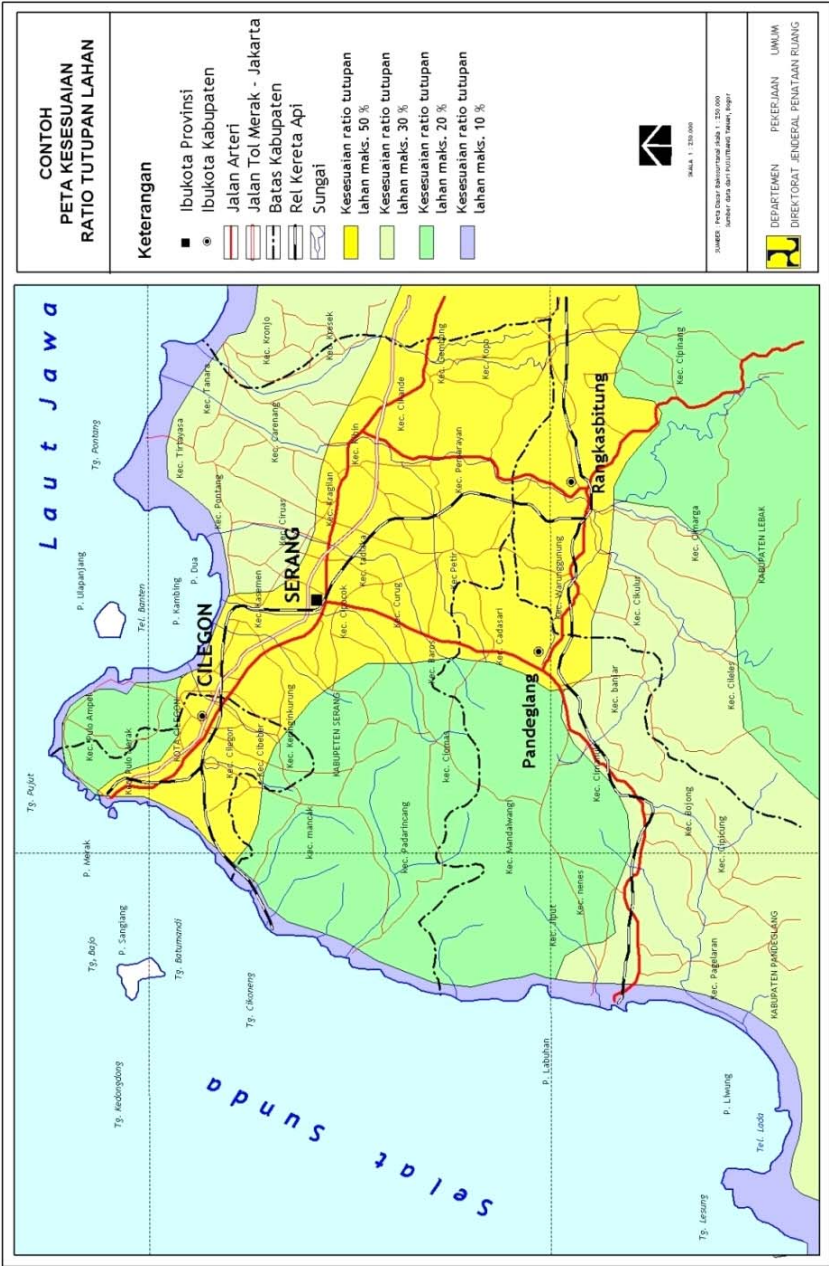
Langkah-langkah

- 1) Tentukan tingkatan rasio tutupan lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan, dan pertajam dengan skala SKL untuk drainase.
- 2) Saring lagi kesesuaian rasio tutupan lahan ini dengan memperhatikan SKL kestabilan lereng, SKL terhadap erosi, dan SKL terhadap bencana alam.
- 3) Gunakan kurva keseimbangan tata air untuk menentukan batasan rasio tutupan lahan, terutama perbandingan peningkatan aliran permukaan akibat peningkatan tutupan lahan.

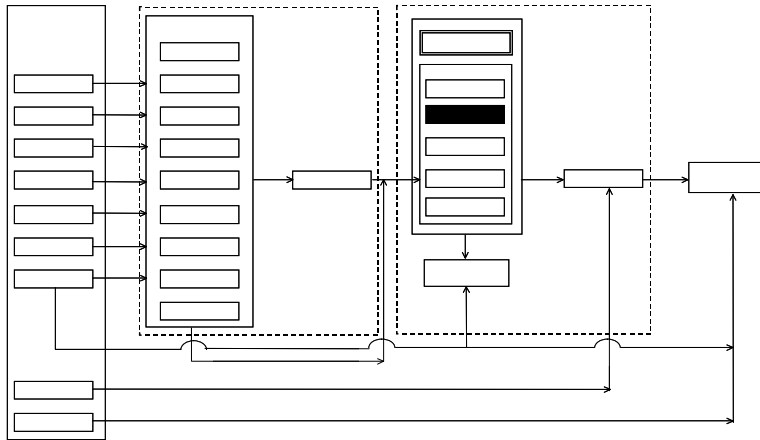
Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Arahan rasio tutupan lahan ini lebih memperhatikan kemungkinan kesulitan drainase dan gangguan kestabilan lereng bila terjadi peningkatan tutupan lahan. Sedangkan untuk penurunan muka air tanah memang terjadi, namun konsekuensi dari mengikuti arahan tutupan lahan maksimum adalah sudah memikirkan sumber air lain guna memenuhi kebutuhan air bersih/baku.
- 2) Arahan rasio tutupan lahan ini adalah merupakan perbandingan bruto, dengan pengertian perbandingan antara luas lahan yang tertutup oleh bangunan bersifat kedap air dengan luas lahan keseluruhan pada tingkat rasio tutupan lahan yang ditekan, terutama dalam satu sistem wilayah sungai atau daerah aliran sungai (DAS).
- 3) Pengembangan yang kemungkinan diperkirakan akan melampaui arahan ini disarankan untuk dikembangkan secara vertikal atau bertingkat.

Gambar 2.25 Contoh peta kesesuaian rasio tutupan lahan



2.4.3 Arahan ketinggian bangunan



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk mengetahui daerah-daerah yang sesuai untuk dikembangkan dengan bangunan berat/tinggi pada pengembangan kawasan.

Sasaran

- 1) Mengetahui daerah-daerah yang sesuai untuk dikembangkan bangunan tinggi.
- 2) Mengetahui perkiraan batasan/persyaratan pengembangan bangunan tinggi pada daerah-daerah yang sesuai ataupun sesuai bersyarat.

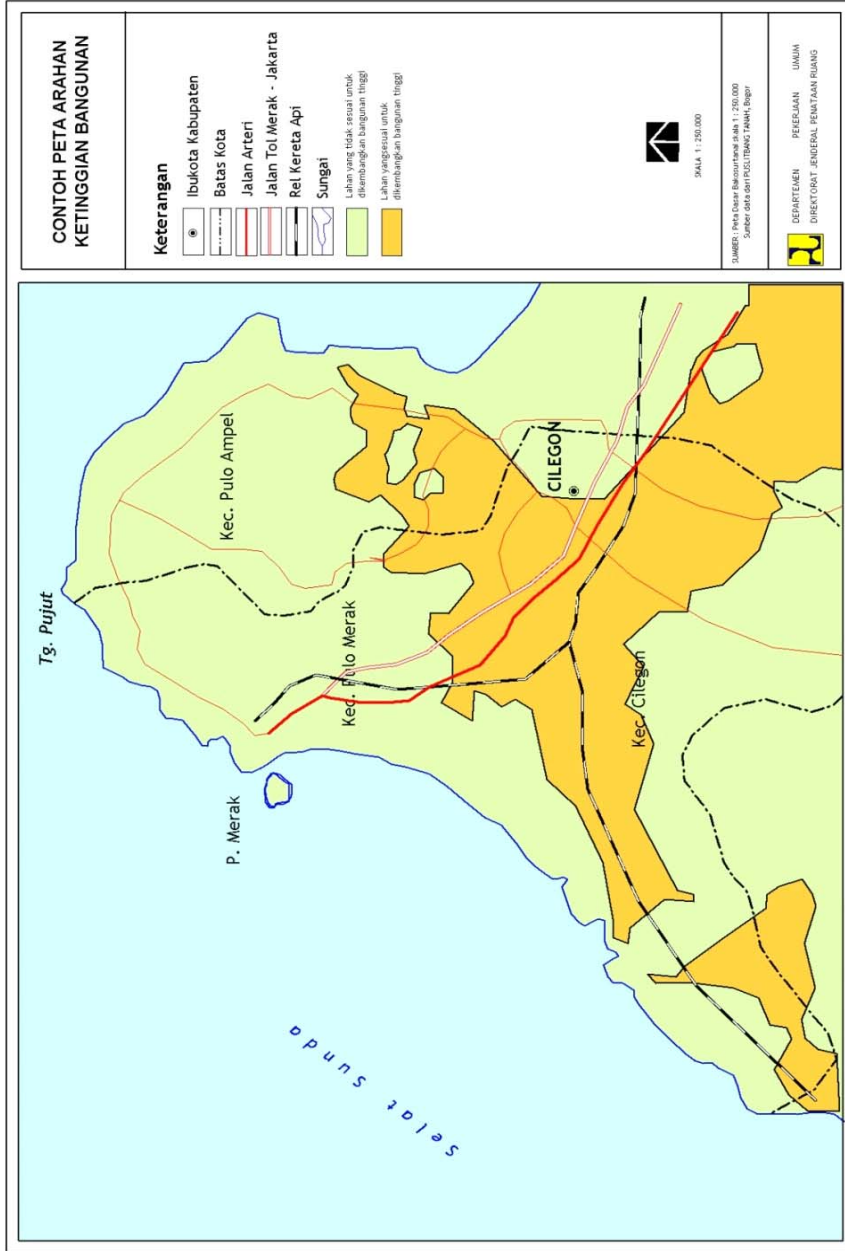
Masukan

- 1) Klasifikasi Kemampuan Lahan,
- 2) SKL Kestabilan Pondasi,
- 3) SKL Terhadap Bencana Alam,
- 4) Penggunaan Lahan yang ada saat ini.

Keluaran

- 1) Peta Arahan Ketinggian Bangunan. Contoh Peta Arahan Ketinggian Bangunan dapat dilihat pada Gambar 2.26.
- 2) Batasan/persyaratan pengembangan bangunan tinggi.

Gambar 2.26 Contoh peta arahan ketinggian bangunan



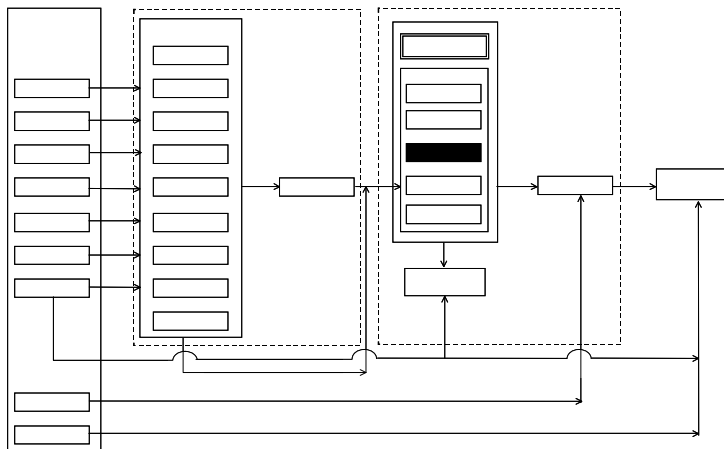
Langkah-langkah

- 1) Menentukan arahan ketinggian bangunan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan dan memperhatikan SKL kestabilan pondasi dan SKL terhadap bencana alam.
- 2) Memperhatikan penggunaan lahan yang ada saat ini yang kemungkinan akan memperlemah kekuatan bangunan, seperti penggalian bahan galian golongan C, atau daerah bekas penambangan/pengurukan.
- 3) Menentukan batasan atau pasyaratan pengembangan bangunan tinggi pada masing-masing arahan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Arahan Ketinggian Bangunan Bersifat Umum, Yakni Sesuai Untuk pengembangan bangunan tinggi (4 lantai ke atas), sesuai dengan persyaratan tertentu, dan tidak sesuai.

2.4.4 Arahan pemanfaatan air baku



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk mengetahui sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku dalam perencanaan tata ruang.

Sasaran

- 1) Mengetahui sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku wilayah dan/atau kawasan.
- 2) Memperoleh gambaran kapasitas masing-masing sumber yang diarahkan untuk keperluan perencanaan tata ruang.
- 3) Memperoleh gambaran prioritas pengembangan sumber-sumber air baku sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan, serta teknis pemanfaatannya.

Masukan

- 1) SKL Ketersediaan Air.
- 2) Hasil Perhitungan Ketersediaan Air.
- 3) Penggunaan Lahan yang ada saat ini.

Keluaran

- 1) Arahan pemanfaatan air baku.
- 2) Kapasitas sumber-sumber air yang disarankan untuk dikembangkan.

Langkah-langkah

Mempelajari SKL ketersediaan air, dan tentukan sumber-sumber air yang paling memungkinkan sebagai sumber air baku untuk pusat-pusat kegiatan dalam wilayah dan/atau kawasan (termasuk memperhitungkan jarak) berdasarkan SKL tersebut.

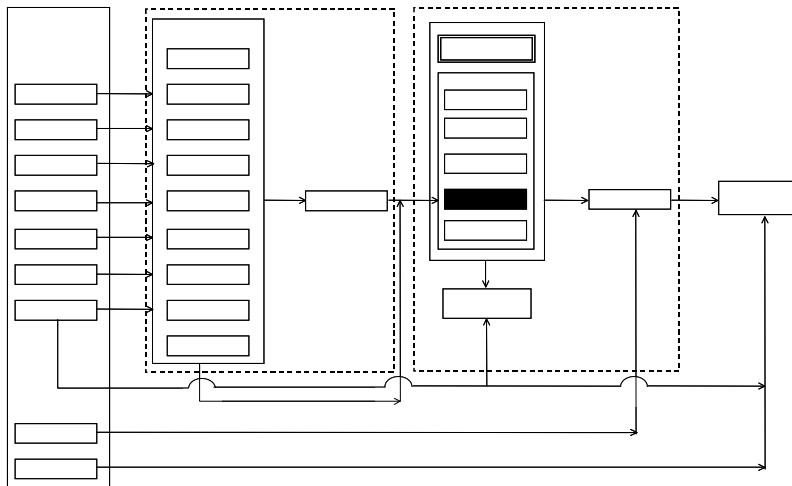
Memperhatikan juga penggunaan lahan yang ada saat ini, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan air seperti pertanian, industri, dan lainnya.

Menentukan prioritas pemanfaatan sumber-sumber yang telah diarahkan tersebut sesuai dengan tingkat kebutuhan dan ketersediaan, serta teknis eksploitasinya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Dalam memberikan arahan pemanfaatan sumber-sumber air baku, berikan juga tindakan pengamanan pada sumber-sumber tersebut agar kesinambungan ketersediaan air dan keseimbangan tata air tetap terjaga.
- 2) Untuk arahan pemanfaatan air yang mengambil dari sumber penggunaan lain seperti irigasi, industri dan lainnya, hitung dengan teliti agar tidak mengganggu sistem yang sudah ada.

2.4.5 Perkiraan daya tampung lahan



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk yang bisa ditampung di wilayah dan/atau kawasan, dengan pengertian masih dalam batas kemampuan lahan.

Sasaran

- 1) Memperoleh gambaran daya tampung lahan di wilayah dan/atau kawasan.
- 2) Memperoleh gambaran distribusi penduduk berdasarkan daya tampungnya.
- 3) Memperoleh persyaratan pengembangan penduduk untuk daerah yang melampaui daya tampung.

Langkah-langkah

- 1) Menghitung daya tampung berdasarkan ketersediaan air, kapasitas air yang bisa dimanfaatkan, dengan kebutuhan air per orang perharinya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada saat ini, atau misalnya rata-rata 100 l / jiwa/hari (tergantung standard yang digunakan).
- 2) Menghitung daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan dengan asumsi masing-masing arahan rasio tersebut dipenuhi maksimum, dan dengan anggapan luas lahan yang digunakan untuk permukiman hanya 50% dari luas lahan yang boleh tertutup (30% untuk fasilitas dan 20% untuk jaringan jalan serta utilitas lainnya). Kemudian dengan asumsi 1KK yang terdiri dari 5 orang memerlukan lahan seluas 100 m². Maka dapat diperoleh daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan ini sebagai berikut:

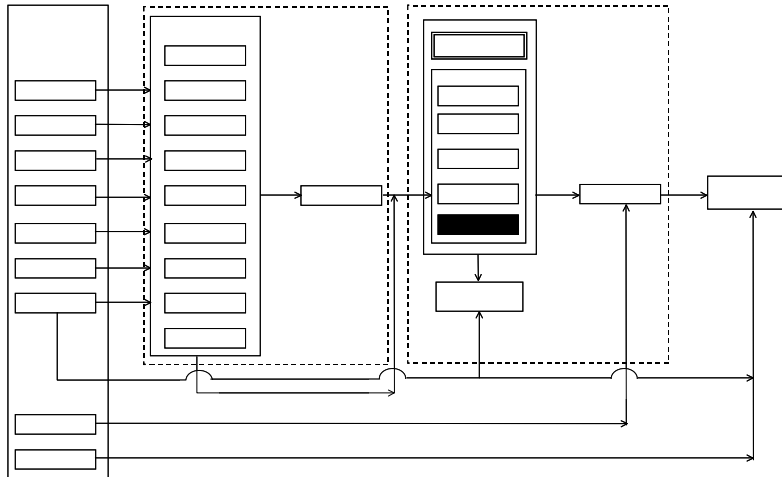
$$\text{Daya tampung (n)} = \frac{50\% \{n \% \times \text{luas lahan (m}^2\})}{100} \times 5 \text{ (jiwa)}$$

- 3) Membandingkan daya tampung ini dengan jumlah penduduk yang ada saat ini dan proyeksinya untuk waktu perencanaan. Untuk daerah yang melampaui daya tampung berikan persyaratan pengembangannya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Daya tampung ideal adalah dengan mengambil batasan minimal dari masing-masing perkiraan di atas.
- 2) Dalam kasus daya tampung ini dilampaui, maka arahan pengembangan disesuaikan dengan batasan daya tampung masing-masing seperti: perlunya tambahan air untuk keperluan penduduk pada daerah yang melampaui daya tampung berdasarkan ketersediaan air, dan pengembangan vertikal/bertingkat untuk daerah yang daya tampung berdasarkan rasio tutupan lahannya dilampaui.
- 3) Daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan didasarkan pada asumsi bahwa lahan permukiman adalah 50% dari daerah yang boleh ditutup. Bila ada angka yang lebih pasti tentunya persentase ini bisa diubah.

2.4.6 Persyaratan dan pembatasan pengembangan



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk mengetahui persyaratan dan pembatasan pengembangan pada masing-masing arahan peruntukan, sesuai dengan potensi dan kendala fisiknya.

Sasaran

- 1) Mengetahui persyaratan dan pembatas pengembangan pada masing-masing arahan peruntukan lahan.
- 2) Perolehan gambaran penanggulangan kendala fisik untuk perencanaan tata ruang.
- 3) Memperoleh gambaran proporsi pengembangan perkotaan sesuai dengan potensi dan kendala fisiknya.

Masukan

- 1) Semua Satuan Kemampuan Lahan,
- 2) Klasifikasi Kemampuan Lahan,
- 3) Arahan-arahan kesesuaian lahan.

Keluaran

- 1) Persyaratan pengembangan/pembangunan pada masing-masing arahan peruntukan lahan.
- 2) Batasan pengembangan pada masing-masing peruntukan lahan.

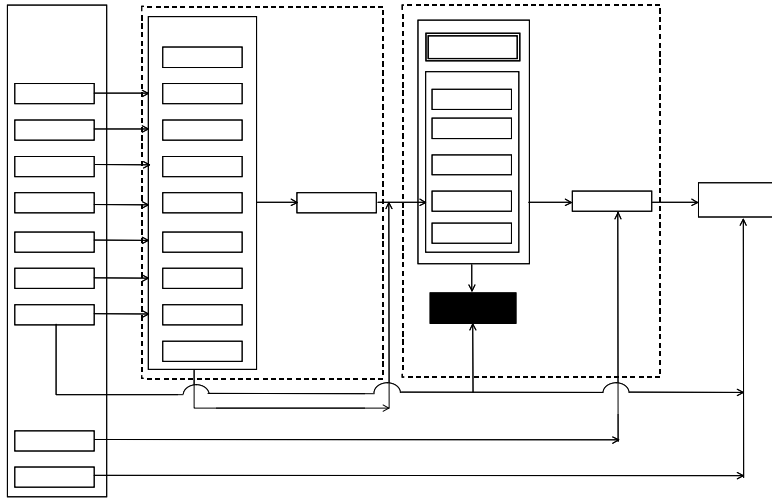
Langkah-langkah

- 1) Menginventarisasi kendala fisik masing-masing arahan peruntukan lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan dan satuan-satuan kemampuan lahan.
- 2) Menginventarisasi batasan-batasan pengembangan pada masing-masing arahan peruntukan lahan menurut arahan-arahan kesesuaian lahan, klasifikasi kemampuan lahan, serta satuan-satuan kemampuan lahan.
- 3) Menentukan persyaratan dan pembatas pengembangan/pembangunan pada masing-masing peruntukan lahan berdasarkan hasil inventarisasi tersebut di atas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Dalam memberikan persyaratan dan pembatas pembangunan ini hendaknya kendala dan potensi fisik pada masing-masing arahan peruntukan lahan terekam dengan jelas, karena persyaratan dan pembatas ini merupakan pemecahan masalah kendala fisik.
- 2) Usahakan memberikan persyaratan dan pembatas yang terinci agar dapat merupakan petunjuk praktis pada penerapannya.

2.4.7 Evaluasi penggunaan lahan yang ada terhadap kesesuaian lahan



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk mengetahui penyimpangan atau ketidaksesuaian penggunaan lahan yang ada saat ini dilihat dari hasil studi kesesuaian lahan ini.

Sasaran

- 1) Mengetahui penggunaan lahan yang ada saat ini yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lainnya.
- 2) Memperoleh gambaran penyesuaian penggunaan lahan yang ada saat ini dan pengembangannya dengan kemampuan dan kesesuaian lahan.

Masukan

- 1) Penggunaan Lahan yang ada saat ini,
- 2) Klasifikasi Kemampuan Lahan,
- 3) Satuan-satuan Kemampuan Lahan,
- 4) Arah-an Kesesuaian Lahan,
- 5) Persyaratan dan Pembatas Pembangunan.

Keluaran

- 1) Penyimpangan-penyimpangan penggunaan lahan yang ada saat ini dari kemampuan dan kesesuaian lahan.
- 2) Arahan-arahan penyesuaian dan pengembangan berikutnya.

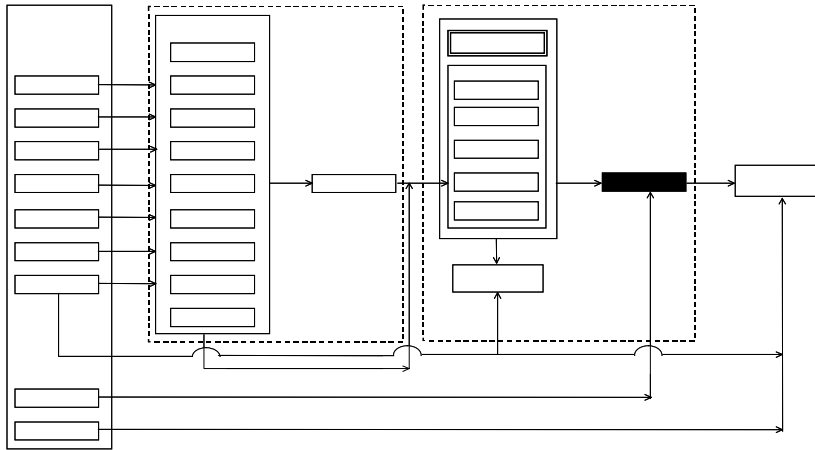
Langkah-langkah

- 1) Membandingkan penggunaan lahan yang ada dengan karakteristik fisik wilayah berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan, satuan-satuan kemampuan lahan, dan arahan-arahan kesesuaian lahan.
- 2) Memberikan arahan penyesuaian penggunaan lahan yang ada saat ini dan pengembangan selanjutnya berdasarkan persyaratan dan pembatas pembangunan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Teliti secermat mungkin penyimpangan ini, karena hal ini menyangkut konsistensi hasil studi dan toleransi penyimpangan yang diperkenankan.
- 2) Berikan penilaian yang tegas, terutama untuk hal-hal yang sangat berpengaruh seperti gangguan keseimbangan tata air, atau kestabilan lereng.
- 3) Berikan usulan penyelesaian yang jelas dan tuntas untuk masing-masing penyimpangan, serta diusahakan untuk tidak banyak merugikan.

2.4.8 Analisis kesesuaian lahan



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk mengetahui arahan-arahan kesesuaian lahan, sehingga diperoleh arahan kesesuaian peruntukan lahan untuk pengembangan kawasan berdasarkan karakteristik fisiknya.

Sasaran

- 1) Memperoleh gambaran peruntukan lahan secara umum berdasarkan kondisi fisik.
- 2) Mengetahui daerah-daerah yang benar-benar sesuai untuk perencanaan tata ruang daerah yang harus dikonservasikan, serta peruntukan lahan pada daerah-daerah di antara kedua peruntukan tersebut.

Masukan

- 1) Klasifikasi Kemampuan Lahan,
- 2) Arahan Rasio Tutupan Lahan,
- 3) Arahan Ketinggian Bangunan,
- 4) Arahan Pemanfaatan Air Baku,
- 5) Perkiraan Daya Tampung Lahan,
- 6) Persyaratan/Pembatas Pengembangan,
- 7) Evaluasi Penggunaan Lahan yang ada.

Keluaran

- 1) Peta Arahan Kesesuaian Peruntukan Lahan. Contoh Peta Arahan Kesesuaian Peruntukan Lahan dapat dilihat pada Gambar 2.27.
- 2) Deskripsi pada masing-masing arahan peruntukan.

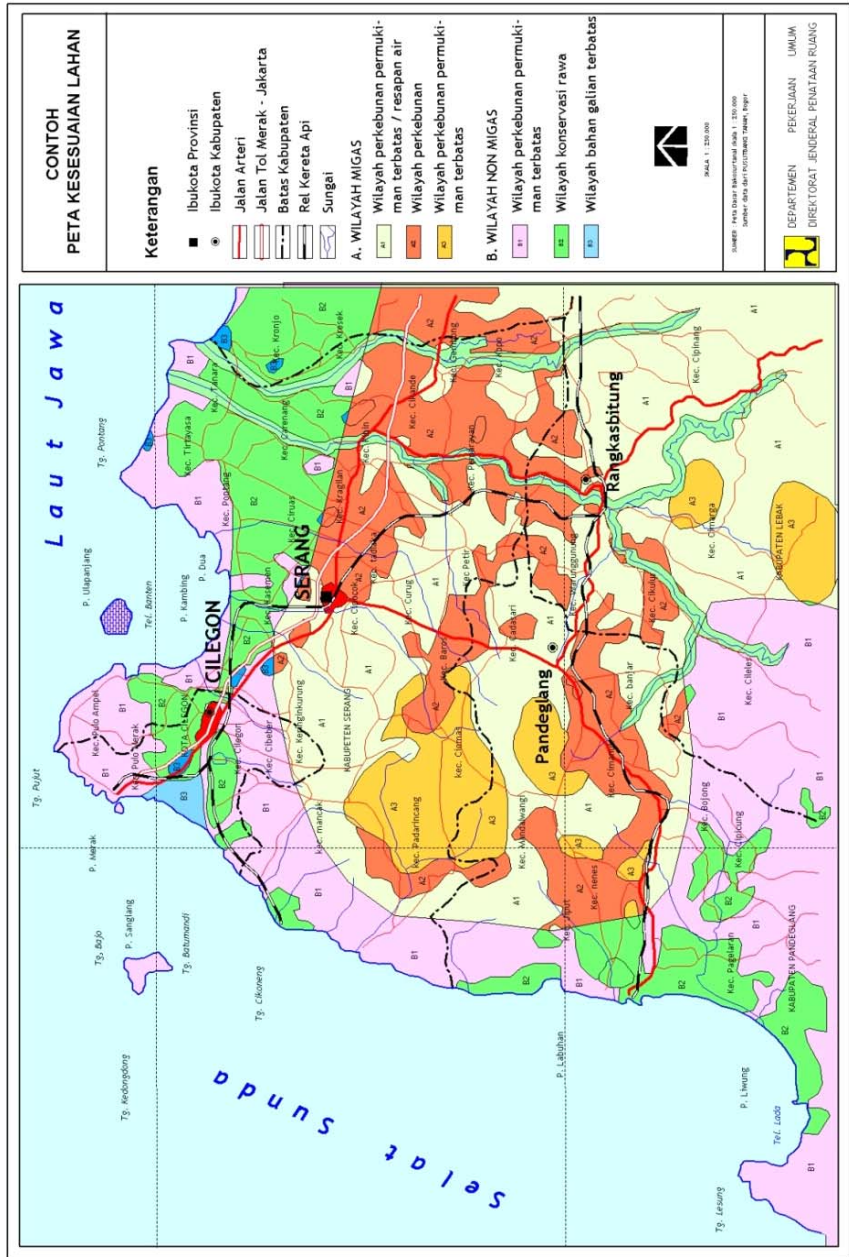
Langkah-langkah

- 1) Melakukan lebih dahulu analisis masing-masing arahan kesesuaian lahan untuk memperoleh arahan-arahan kesesuaian lahan yang merupakan masukan bagi analisis peruntukan lahan ini.
- 2) Menentukan arahan peruntukan lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan dan arahan-arahan kesesuaian lahan di atas.
- 3) Dalam penentuan arahan peruntukan lahan ini, mengarahkan pada kondisi ideal sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya, yang tentunya meliputi juga persyaratan/pembatas pengembangan, serta telah mengevaluasi penggunaan lahan yang ada saat ini.
- 4) Mempertajam arahan ini dengan memasukkan hasil studi fisik/lingkungan yang ada, seperti: studi pertanian, kehutanan, analisis dampak lingkungan, dan lainnya.
- 5) Mendeskripsikan masing-masing arahan peruntukan, termasuk persyaratan dan pembatas pengembangannya.

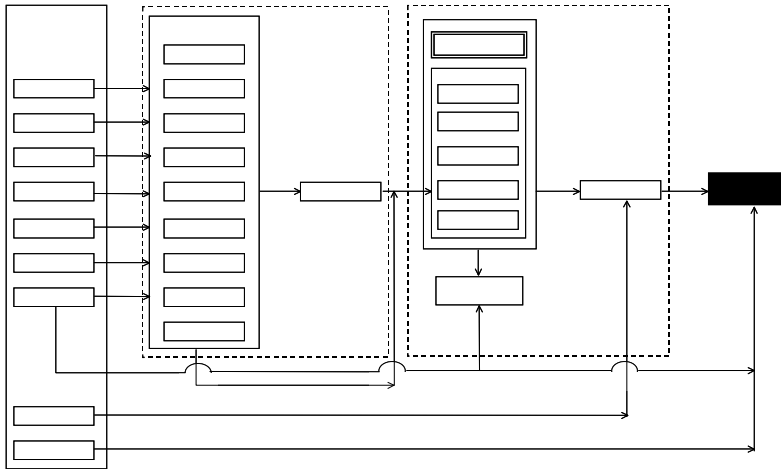
Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Arahan-arahan ini tidak mengikat, namun perencanaan sebaiknya diusahakan untuk bisa mengikuti arahan tersebut.
- 2) Untuk kondisi yang ada saat ini yang menyimpang dari arahan ini pengembangannya agar ditahan, dan bila terdapat kecenderungan akan terus berkembang, usahakan untuk memindahkan arah pengembangannya pada daerah yang lebih sesuai.

Gambar 2.27 Contoh peta kesesuaian lahan



2.5 Rekomendasi kesesuaian lahan



Lingkup pekerjaan

Merangkum semua hasil studi kesesuaian lahan dalam satu rekomendasi kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan, yang akan merupakan masukan bagi penyusunan rencana pengembangan kawasan (rencana tata ruang, rencana induk pengembangan kawasan).

Sasaran

- 1) Mengetahui gambaran umum arah perkembangan perkotaan yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah.
- 2) Mengetahui kapasitas pengembangan kawasan wilayah perencanaan.
- 3) Memperoleh gambaran peruntukan lahan bagi perencanaan tata ruang sesuai dengan potensi dan kendala fisiknya.
- 4) Memperoleh persyaratan dan pembatas pembangunan untuk perencanaan tata ruang selanjutnya.

Masukan

- 1) Arah kesesuaian peruntukan lahan,
- 2) Penggunaan lahan yang ada saat ini,

- 3) Kebijakan Pengembangan kota/wilayah yang ada baik dari pusat maupun daerah.

Keluaran

- 1) Peta Rekomendasi Kesesuaian Lahan. Contoh Peta Rekomendasi Kesesuaian Lahan dapat dilihat pada Gambar 2.28,
- 2) Kapasitas pengembangan lahan,
- 3) Deskripsi masing-masing arahan dalam rekomendasi tersebut termasuk persyaratan pengembangannya.

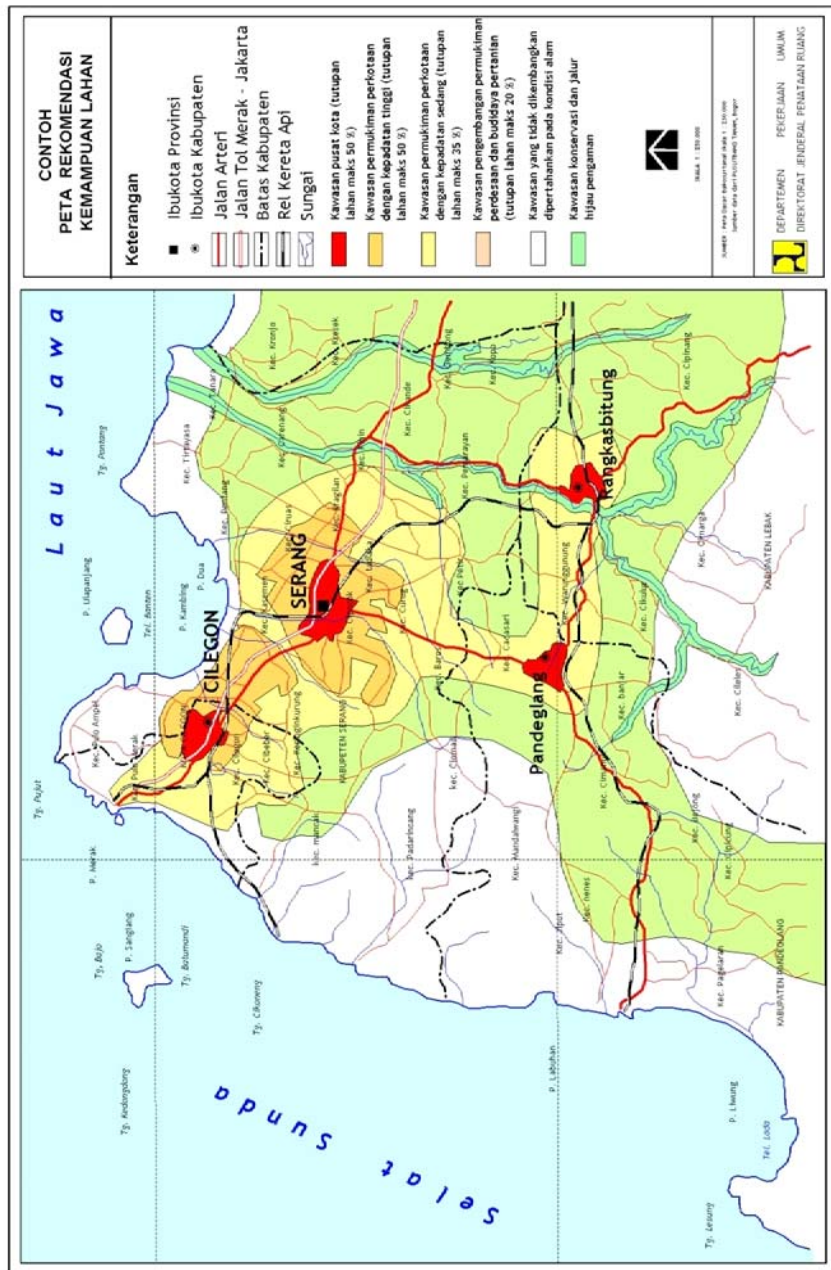
Langkah-langkah

- 1) Membandingkan kembali arahan peruntukan lahan dengan penggunaan lahan yang ada saat ini.
- 2) Menyesuaikan arahan tersebut dengan penggunaan lahan yang ada saat ini dan perkiraan kecenderungannya, sejauh tidak terlalu menyimpang.
- 3) Menyesuaikan arahan peruntukan tersebut dengan kebijaksanaan pengembangan yang ada baik kebijaksanaan pusat maupun daerah serta sektoral.
- 4) Menentukan persyaratan pengembangan pada masing-masing arahan yang direkomendasikan, terutama dalam mengikuti kebijaksanaan yang ada.
- 5) Menentukan kapasitas pengembangan wilayah perencanaan.
- 6) Memberikan deskripsi masing-masing arahan kesesuaian lahan yang telah direkomendasikan tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Rekomendasi sejauh mungkin disesuaikan dengan kebijaksanaan pengembangan. Untuk kasus kebijaksanaan yang bertentangan dengan kesesuaian lahannya, arahan kesesuaian lahan diusahakan mengikuti kebijaksanaan namun dilengkapi dengan persyaratan dan pembatas pengembangannya.
- 2) Untuk arahan kesesuaian lahan yang bertentangan dengan kebijaksanaan tersebut, dalam rekomendasi bila memungkinkan perhitungan biaya pembangunan bila mengikuti kebijaksanaan tersebut, sehingga ketidaksesuaian ini bisa diterjemahkan dalam bentuk biaya.

Gambar 2.28 Contoh peta rekomendasi kemampuan lahan



Bab III

Analisis aspek ekonomi

3.1 Umum

Salah satu tujuan penataan ruang wilayah dan/atau kawasan adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pada wilayah dan/atau kawasan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

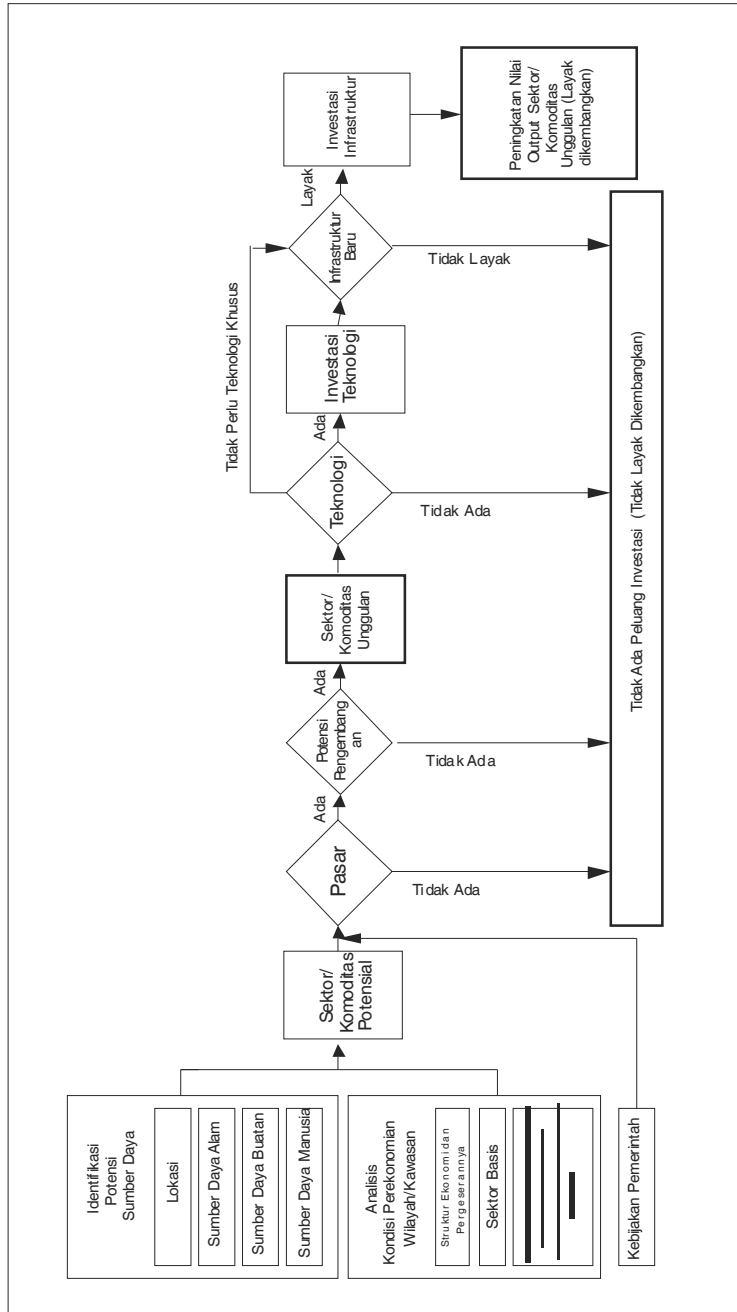
Penilaian ekonomi bagi pengembangan wilayah dan/atau kawasan adalah upaya untuk menemukenali potensi dan sektor-sektor yang dapat dipacu serta permasalahan perekonomian, khususnya untuk penilaian kemungkinan aktivitas ekonomi yang dapat dikembangkan pada wilayah dan/atau kawasan tersebut.

Hal yang mendasar dalam analisis ekonomi pengembangan wilayah dan/atau kawasan yaitu perlunya mengenali potensi lokasi, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, sehingga akan terjadi efisiensi tindakan. Dengan usaha yang minimum akan diperoleh hasil yang optimum yang kesemuanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, serta terjadinya investasi dan mobilisasi dana.

Suatu penelitian atau studi pada tahap awal yang dilakukan adalah pengumpulan data, dan identifikasi potensi sumber daya yang terdiri dari lokasi, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Identifikasi potensi adalah sebagai keluaran dari analisis melalui perumusan lingkup pekerjaan, sasaran, masukan, keluaran, dan langkah-langkah analisis.

Bagan alir tata cara analisis aspek ekonomi bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah maupun kawasan dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Bagan alir analisis aspek ekonomi



Masukan

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah perencanaan dan Provinsi. Contoh data Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah perencanaan dan Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.1,
- 2) Biaya Pembangunan dan Total Pengeluaran di wilayah dan/atau kawasan. Contoh data Biaya Pembangunan dan Total Pengeluaran di wilayah dan/atau kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.2,
- 3) Volume Ekspor dan Impor di wilayah dan/atau kawasan. Contoh Data Volume Ekspor dan Impor di wilayah dan/atau kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.3,
- 4) Sistem Permukiman dan Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana. Contoh Data Sistem Permukiman dan Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana dapat dilihat pada Tabel 3.4,
- 5) Penggunaan Lahan wilayah perencanaan yang menampilkan data lokasi penggunaan lahan sesuai rincian dalam tabel, serta menampilkan jaringan jalan/ transportasi primer yang melayani pusat-pusat kegiatan atau sistem kota-kotanya, contoh data dapat dilihat pada Tabel 3.5,
- 6) Kepadatan Penduduk per Kecamatan di wilayah dan/atau kawasan. Contoh data kepadatan penduduk dapat dilihat pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.1 Laju pertumbuhan ekonomi menurut daerah wilayah
(dalam harga konstan)**

Tahun	Wilayah perencanaan (dalam %)	Provinsi (dalam %)
t-4		
t-3		
t-2		
t-1		
T		
Rata – rata		

Sumber :

Tabel 3.2 Total biaya pembangunan dan total pengeluaran di wilayah dan/atau kawasan (dalam ribu rupiah dan harga berlaku)

Tahun	Rutin		Pembangunan		Pengeluaran	
	Rp.	Pertumb.	Rp.	Pertumb.	Rp.	Pertumb.
t-4						
t-3						
t-2						
t-1						
t						
rata-rata						

Sumber :

Tabel 3.3 Data volume ekspor dan impor di wilayah dan/atau kawasan

Tahun	Volume Impor		Volume Ekspor	
	Ton	Pertumbuhan	Ton	Pertumbuhan
t-4				
t-3				
t-2				
t-1				
t				
rata-rata				

Sumber :

Tabel 3.4 Tata jenjang pusat pengembangan/perkotaan di wilayah dan/atau kawasan

Lokasi (Nama Kota, Kecamatan / Desa Tercakup)	Ukuran Kota	Fungsi (PKN, PKW, PKL)
	Metropolitan (≥ 1.000.000 jiwa) Kota Besar (> 500.000 jiwa) Kota Sedang (100.000 – 500.000 jiwa) Kota Kecil (50.000 – 100.000 jiwa)	

Keterangan :

Kriteria Kawasan Perkotaan:

- Tingkat kepadatan : 50 jiwa/ha
- Tenaga kerja non pertanian : 75 %

Tabel 3.5 Luas setiap jenis penggunaan lahan wilayah perencanaan (ha)

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Tahun t	Tahun t-4	Perubahan t – (t-4)
1.	Hutan Produksi			
2.	Hutan Produksi Terbatas			
3.	Hutan Produksi Tetap			
4.	Hutan Produksi Konversi			
5.	Sawah Irigasi Teknis			
6.	Sawah Irigasi ½ Teknis			
7.	Sawah Tadah Hujan			
8.	Tanaman Pangan Lahan Kering			
9.	Tanaman Tahunan/Perkebunan			
10.	Peternakan			
11.	Perikanan			
12.	Pariwisata			
13.	Pertambangan			
14.	Sistem Perkotaan			
15.	Rawa			
16.	Hutan Lindung			
17.	Lain-lain			
	Jumlah			

Sumber :

Tabel 3.6 Kepadatan penduduk pada tahun t

Kecamatan	L u a s (ha)	Jumlah Penduduk	Tingkat Kepadatan
Seluruh Kawasan			

Sumber :

Keluaran

- 1) Indikasi adanya komoditas unggulan yang sudah dikembangkan.
- 2) Indikasi adanya komoditas unggulan yang belum dikembangkan secara optimal.
- 3) Mendapatkan angka - angka pertumbuhan sebagai pertimbangan dalam memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan kegiatan sektor, serta investasi.

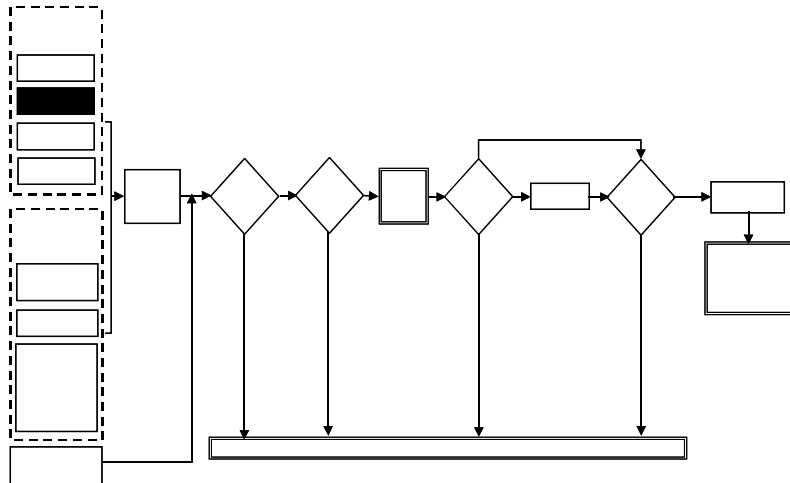
Langkah-langkah

- 1) Mengidentifikasi hubungan antar pusat pengembangan dalam lingkup nasional dan global.
- 2) Mengidentifikasi awal potensi lokasi bagi produksi komoditas unggulan dan ikutannya.
- 3) Mengidentifikasi konsentrasi lokasi yang menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi wilayah seperti tabel berikut:

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Potensi lokasi juga dapat dilihat dari kenyataan bahwa kawasan budi daya merupakan kombinasi/kumpulan lokasi berbagai kegiatan manusia yang saling berkaitan.
- 2) Dalam perkembangan secara alamiah kawasan budi daya akan menampilkan struktur tata ruang sebagai gambaran adanya potensi lokasi dari keseluruhan kinerja wilayah perencanaan.
- 3) Struktur ruang memperlihatkan pusat-pusat permukiman/kegiatan, terbentuknya pusat tersebut didukung oleh kegiatan pertanian atau oleh potensi sumber daya alam daerah belakangnya. Pada gilirannya menunjukkan bahwa pusat permukiman tersebut mempunyai fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi komoditas/jasa. Perkembangan selanjutnya karena pengaruh potensi sumber daya buatan dan sumber daya manusia terbentuklah struktur pusat permukiman yang berjenjang, atau dapat dikatakan pusat permukiman tersebut bertumbuh sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pusat pengembangan atau pusat kegiatan lokal.
- 4) Pusat-pusat Permukiman yang berfungsi sebagai Pusat-pusat Pengembangan Wilayah akan merupakan pintu gerbang terjadinya hubungan sinergi antar kawasan dalam lingkup regional, nasional dan global. Berkembangnya kota sebagai pusat pengembangan didukung oleh potensi lokasi yang berarti kegiatan ekonomi dapat dilakukan di kota tersebut secara efisien sesuai fungsinya yang tidak hanya fungsi distribusi namun juga produksi yang sebagian diartikan sebagai kegiatan industri. Efisiensi yang dikaitkan dengan potensi lokasi adalah efisiensi paling menguntungkan dengan usaha yang minimum termasuk biaya transportasi yang minimal dalam pergerakan manusia, barang produksi maupun bahan mentah.

3.2.2 Analisis aspek sumber daya alam



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis kondisi fisik wilayah dan/atau kawasan yang memiliki potensi menjadi sumber pendapatan kawasan. Potensi sumber daya alam idealnya secara general dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu sumber daya tanah, sumber daya hewan, sumber daya hutan dan sumber daya pertambangan.

Sasaran

- 1) Memperoleh gambaran mengenai keberadaan sumber daya alam yang sangat terkait dengan kehidupan masyarakat dan berperan penting dalam menentukan kegiatan primer yang produktif dari penduduk setempat sebagai bagian dari sumber pendapatan ekonomi wilayah / kawasan.
- 2) Menghitung hasil-hasil sumber daya alam yang memiliki sumbangan besar terhadap pendapatan ekonomi kawasan, produksi pangan yang dikonsumsi penduduk sendiri serta tingkat pemanfaatan sumber daya alam sebagai alat produksi.

Masukan

- 1) Produksi Pertanian di wilayah dan/atau kawasan. Data Produksi Pertanian di wilayah dan/atau kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.7,
- 2) Produksi Hasil Hutan. Data Produksi Hasil Hutan di wilayah dan/atau kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.8,
- 3) Populasi Ternak. Data Populasi Ternak di wilayah dan/atau kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.9,
- 4) Produksi Sumber Daya Laut. Data Produksi Sumber Daya Laut di wilayah dan/atau kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.10,
- 5) Produksi Sumber Daya Pertambangan. Data Produksi Sumber Daya Pertambangan di wilayah dan/atau kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Keluaran

- 1) Potensi sumber daya alam yang sudah dimanfaatkan maupun yang prospektif serta lokasinya.
- 2) Kuantitas dan kualitas produksi sumber daya alam sebagai bahan mentah untuk diolah atau sebagai komoditas yang dapat dipasarkan langsung keluar wilayah perencanaan.
- 3) Kepastian komoditas andalan dari sektor pertanian dan pertambangan.

Langkah-langkah

- 1) Menghitung produktivitas komoditas pertanian dan pertambangan sehingga dikenali komoditas unggulan karena mendominasi PDRB wilayah perencanaan.
- 2) Menghitung kebutuhan konsumsi produksi komoditas pertanian bagi penduduk wilayah Perencanaan.
- 3) Menganalisis komoditas pertanian dan komoditas pertambangan baik yang unggulan maupun yang bukan dalam kemungkinan kegiatan sambung (*linkage*), baik kegiatan sambung ke depan (*forward linkage effect*) dan atau kegiatan sambung ke belakang (*backward linkage effect*).
- 4) Menganalisis kebutuhan pasar dari komoditas yang berkaitan dengan produksi pertanian dan produksi pertambangan.

**Tabel 3.7 Produksi pertanian di wilayah dan/atau kawasan
pada tahun t**

Jenis Produksi	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton / ha)
1.Makanan Pokok 1.1 Padi 1.2 Jagung 1.3 Dst.			
2.Hortikultura 2.1 Kentang 2.2 Kubis 2.3 Bawang 2.4 Dst.			
3. Buah-buahan Pisang Nanas Dst.			
4. Tanaman Perkebunan 4.1 Kopi 4.2 Kakao 4.3 Karet 4.4 Dst.			

Sumber :

**Tabel 3.8 Produksi hasil hutan (dalam m3) di wilayah
dan/atau kawasan**

Jenis Produksi	Tahun t-3	Tahun t-2	Tahun t-1	Tahun t
Kayu Jati Kayu Lapis Dst.				

Sumber :

Tabel 3.9 Populasi ternak di wilayah dan/atau kawasan tahun t

Jenis Ternak	Populasi
Ayam Itik Kambing Sapi, dst	

Sumber :

Tabel 3.10 Produksi sumber daya laut pada tahun t di wilayah dan/atau kawasan

Jenis Produksi	Hasil Tangkapan (ton)	Nilai (Ribuan Rupiah)
1. Perikanan Laut		
1.1 Ikan		
1.2 Dst.		
2. Perikanan Tambak		
2.1 Bandeng		
2.2 Udang		
2.3 Dst		
3. Perikanan Air Tawar		
3.1 Ikan		
3.2 Dst		

Sumber :

Tabel 3.11 Produksi sumber daya pertambangan di wilayah dan/atau kawasan

Jenis Tambang	Deposit		Pengambilan Pada Tahun t	
	Kapasitas	Lokasi	Ton / m3	Nilai (Ribuan Rupiah)
1. Marmer				
2. Biji besi				
3. Batubara				
4. dst.				

Sumber :

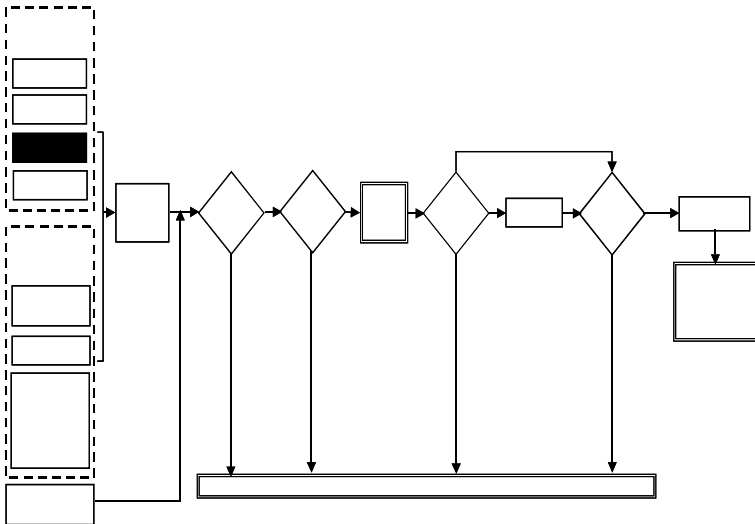
- 5) Melihat kemungkinan terjadinya kegiatan ikutan dan penunjang dari kegiatan produksi pertanian dan produksi pertambangan.
- 6) Merumuskan permasalahan dalam produksi komoditas pertanian maupun komoditas tambang misalnya masalah aksesibilitas, perlunya peremajaan tanaman perkebunan, penyerapan tenaga kerja, dan sebagainya.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1) Sumber daya alam merupakan salah satu modal utama yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara langsung maupun tidak langsung. Langsung berarti sumber daya alam itu

dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan, sedang tidak langsung artinya masyarakat mengkonsumsi sumber daya alam tadi dengan terlebih dahulu mengolahnya, dan/atau menukarnya dengan komoditas/jasa lain yang tidak dipunyai oleh masyarakat itu sendiri.

- 2) Kajian sumber daya alam ini sangat penting dilakukan karena merupakan potensi pengembangan ekonomi masyarakat yang dapat dipergunakan sebagai sarana kesejahteraan masyarakat.
- 3) Ada tiga kelompok sumber daya alam yang dapat disebutkan: sumber daya bahan galian, lahan, dan lokasi.
- 4) Bahan galian adalah sumber daya alam yang meliputi komoditas yang berasal dari bahan organik (seperti minyak bumi, batubara, batu kapur, dan sebagainya) dan bahan anorganik (seperti logam, batuan andesit, dan batuan lain yang berasal dari batuan beku) yang biasanya potensinya tidak dapat diperbaharui, sehingga memerlukan perencanaan pemanfaatan yang seksama.
- 5) Sumber daya lahan yang dapat dimanfaatkan kesuburannya untuk menanam berbagai tanaman alternatif sesuai dengan kesuburan lahan, elevasi, dan iklim yang melingkupinya. Sumber daya lahan ini dapat dipergunakan untuk memproduksi dan memperbaharui komoditas nabati secara langsung maupun untuk memproduksi dan memperbaharui komoditas hewani secara tidak langsung. Dengan demikian sumber daya ini sangat penting dan strategis.
- 6) Lokasi adalah sumber daya alam yang berwujud bentang alam yang mempunyai lingkungan geografis, iklim, lingkungan alam, potensi wisata, serta sarana dan prasarana, dan sebagainya; sehingga lokasi tersebut sangat cocok untuk memproduksi komoditas/jasa karena menjanjikan terjadinya efisiensi dan efektifitas proses produksi. Pemanfaatannya antara lain sebagai lokasi obyek wisata, pusat simpul jasa distribusi dan pusat kegiatan lainnya.



Melakukan analisis kondisi prasarana dan sarana yang ada dalam mendukung berhasilnya upaya pengembangan kawasan. Kondisi dilihat dari tingkat pelayanannya, instansi yang berprakarsa dalam pengembangannya atau pembangunan baru, serta keterkaitannya dengan sistem lintas wilayah.

- 1) Memperoleh gambaran kondisi, pelayanan, dan kuantitas prasarana dan sarana wilayah dalam menunjang pengembangan wilayah dan/atau kawasan.
- 2) Memperoleh gambaran kondisi, pelayanan, dan kuantitas prasarana dan sarana perkotaan yang termasuk dalam wilayah dan/atau kawasan.
- 3) Memperoleh gambaran kondisi, pelayanan, dan kuantitas prasarana perekonomian dalam wilayah dan/atau kawasan.

Masukan

- 1) Jenis Penggunaan Lahan Perkotaan di wilayah dan/atau kawasan, seperti yang disajikan pada Tabel 3.12,
- 2) Jaringan Transportasi Utama di wilayah dan/atau kawasan, seperti yang disajikan pada Tabel 3.13,
- 3) Penilaian Potensi Pengembangan dari Kondisi Jaringan Jalan, seperti yang disajikan pada Tabel 3.14,
- 4) Tabel Potensi Pelayanan Utilitas, seperti yang disajikan pada Tabel 3.15,
- 5) Analisis Potensi Pengembangan dari Keberadaan Prasarana dan Sarana Ekonomi, seperti yang disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.12 Luas setiap jenis penggunaan lahan perkotaan di wilayah dan/atau kawasan (pada tahun t)

Jenis Penggunaan Lahan	Kota - 1		Kota - 2		Kota - 3	
	ha	%	Ha	%	ha	%
1. Perumahan						
2. Perkantoran Pemerintah						
3. Sarana Pendidikan						
4. Fasilitas Kesehatan						
5. Olah Raga dan Taman						
6. Pariwisata / Budaya						
7. Pertokoan dan Pasar						
8. Pergudangan						
9. Industri Perbengkelan						
10. Pelabuhan dan Bandara						
Sub Total						
11. Pertanian Kota						
12. Konservasi						
13. Lain – lain						
Sub Total						
Jumlah						

Sumber :

Tabel 3.13 Panjang jaringan transportasi utama di wilayah perencanaan

Sistem Jaringan Transportasi	Panjang (Km)
Jalan Kereta Api Jalan Bebas Hambatan Jalan Arteri Primer	

Sumber :

Tabel 3.14 Penilaian potensi pengembangan dari kondisi jaringan jalan

Kondisi Jalan Fungsi	Prosentase Kondisi			Tingkat Pelayanan		
	Baik (B)	Rusak (R)	Rusak Berat (Rb)	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
				51-100 %(b) < 25 % (rb)	26- 50 % (b) 26 -50 % (rb)	< 25 % (b) > 50 % (rb)
Arteri Primer Kolektor Primer Lokal Primer						

Sumber : 1.....

2. Hasil Analisis

**Tabel 3.15 Potensi pelayanan utilitas di wilayah
dan/atau kawasan**

No	Jenis Utilitas	Keterangan	Kapasitas Pelayanan	Satuan	Nilai Daya Tarik		
					Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1.	AIR BERSIH	Terpasang Terpakai Pelanggan		L/detik L/detik Orang			
2.	ENERGI LISTRIK	PLTA PLTD Dst		MW MW MW			
3.	STO	Tersedia Terpasang		SS SS			
4.	DRAINASE	Luas Genangan Terlayani		Ha %			
5.	SAMPAH	TPA Terlayani		Unit %			
6.	AIR LIMBAH	IPAL IPLT Terlayani		Unit Unit %			
7.	KAPASITAS AIR BAKU	(sesuai rencana DAS)					
8.	RENCANA IRIGASI / PENCETAKAN SAWAH	(sesuai rencana DAS)					
9.	Dst.						

Sumber :

**Tabel 3.16 Analisis potensi pengembangan
dari keberadaan prasarana dan sarana ekonomi**

No	Lembaga Perekonomian	Unit	Keterangan	Tingkat Pelayanan		
				Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1.	Lembaga Perbankan Swasta Pemerintah					
2.	Perdagangan dan Koperasi Pengusaha kecil Pengusaha menengah Pengusaha besar Koperasi KUD Koperasi Non KUD					
3.	Jasa Konstruksi					
4.	Pasar					
5.	Perusahaan jasa Angkutan Udara Angkutan Laut Angkutan Darat Ekspedisi					
6.	Industri Industri kecil Industri menengah Industri besar					
7.	Asuransi					
8.	Penginapan & Hotel Hotel Wisma Penginapan					
8.	Restoran / Rumah makan					
9.	Obyek Wisata					
10.	Pergudangan Pemerintah Swasta					
11.	Pelabuhan Pelelangan Ikan					
13.	Bandara					
14.	Pelabuhan Laut					
15.	Dst.					

Sumber :

Keluaran

- 1) Mendapatkan tingkat pelayanan prasarana yang ada seperti: jalur kereta api, jaringan jalan, bandar udara, pelabuhan laut, pendaratan ikan, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan limbah, dan atau fasilitas pengolahan limbah, bangunan dan/atau jaringan irigasi, dan lain sebagainya.
- 2) Mendapatkan tingkat pelayanan sarana yang ada seperti: kereta api, stasiun, terminal, mobil dan kendaraan lainnya, pesawat terbang, berbagai jenis kapal, sawah, perumahan, perkantoran, rumah sakit, pasar, pertokoan, sekolah, kawasan industri, dan sebagainya.

Langkah-langkah

- 1) Menilai tingkat pelayanan sarana dan prasarana ekonomi yang ada di perkotaan maupun di permukiman desa, menyimpulkan jenis sarana dan lokasi yang memerlukan pengembangan atau pembuatan unit sarana baru. Penilaian ditentukan oleh kualitas dan kuantitas tampungannya, serta ditentukan pula oleh lokasinya. Semakin mudah dijangkau oleh calon pemanfaat, nilainya semakin tinggi.
- 2) Memproyeksikan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana baru, yang memperhitungkan pula perkembangan kegiatan yang akan terjadi di wilayah dan/atau kawasan.
- 3) Memproyeksikan tingkat kemungkinan realisasi pembangunan sarana dan prasarana (bisa dikaji dari adanya peningkatan pendapatan dan nilai *Incremental Capital Output Ratio/ICOR*).

Untuk melakukan perhitungan ICOR (*incremental capital output ratio*), menggunakan rumus sebagai berikut;

$$k = \frac{I}{y}$$

dimana :

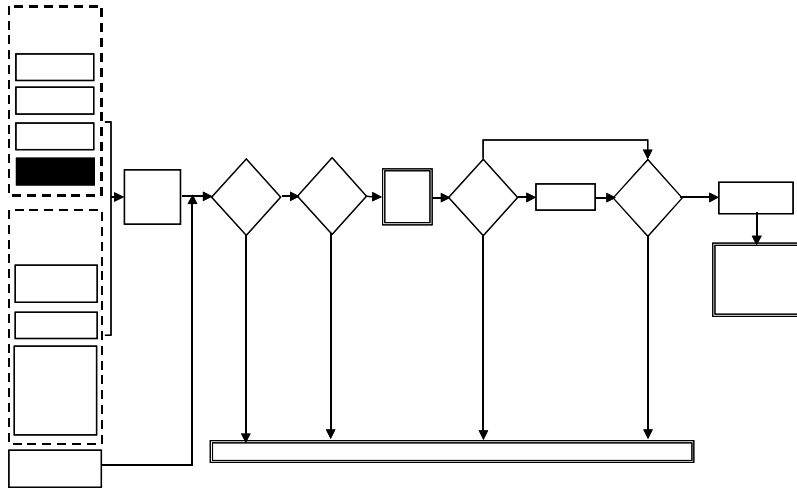
k	= nilai ICOR
I	= investasi
y	= tambahan pendapatan.

Dalam hal ini, persentase tingkat pertumbuhan pendapatan adalah ekuivalen dengan tabungan dibagi nilai ICOR; sehingga makin rendah nilai ICOR, maka tingkat pertumbuhan semakin cepat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Sumber daya buatan adalah prasarana dan sarana yang mendukung kawasan budi daya, lindung, atau kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- 2) Prasarana adalah: jalur kereta api, jaringan jalan, bandar udara, pelabuhan laut, pendaratan ikan, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan limbah, dan/atau fasilitas pengolahan limbah, bangunan dan atau jaringan irigasi, dan lain sebagainya. Sedangkan sarana adalah kereta api, stasiun, terminal, mobil dan kendaraan lainnya, pesawat terbang, berbagai jenis kapal, sawah, perumahan, perkantoran, rumah sakit, pasar, pertokoan, sekolah, bangunan industri, dan sebagainya.
- 3) Prasarana dan sarana yang terkait dengan pelestarian lingkungan dan sangat diperlukan oleh kegiatan permukiman, kegiatan primer dan kegiatan sekunder adalah pemanfaatan sumber air secara terpadu dan menyeluruh seperti: pengendalian banjir, irigasi, pembangkit listrik tenaga air, penyediaan air baku untuk keperluan domestik dan industri, rekreasi, perikanan dan drainase. Pengembangan prasarana dan sarana ini dipersiapkan dalam Rencana Pengembangan Daerah Aliran Sungai.

3.2.4 Analisis aspek sumber daya manusia



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk mengetahui potensi wilayah perencanaan dalam penyediaan lapangan pekerjaan, kualitas, dan kuantitas tenaga kerja pada saat dimulainya perencanaan untuk memenuhi kebutuhan prospektif.

Sasaran

- 1) Memperoleh angka beban tanggungan penduduk produktif/tenaga kerja baik di perkotaan maupun perdesaan.
- 2) Memperoleh angka pengganda pekerjaan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- 3) Memperoleh struktur lapangan pekerjaan serta proyeksi jangka waktu mendatang menurut kegiatan primer, sekunder dan tertier baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- 4) Memperoleh gambaran tingkat pendapatan rumah tangga pada masa kini maupun proyeksi waktu mendatang menurut tingkat pemerataannya baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- 5) Memperoleh gambaran kualitas sumber daya manusia sebagai wira usaha, tenaga ahli, dan tenaga terampil.

Masukan

- 1) Data Mata pencaharian Penduduk,
- 2) Data Perkembangan Industri,
- 3) Data Kemampuan Perkembangan Wira Usaha/Pedagang,
- 4) Data Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur,
- 5) Data Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan,
- 6) Data Tingkat Kesejahteraan yang Dicapai,
- 7) Data Distribusi Kuantil Pendapatan Rumah Tangga.

Contoh masukan data aspek sumber daya manusia dapat dilihat pada Tabel 3.17, Tabel 3.18, Tabel 3.19, Tabel 3.20, Tabel 3.21, Tabel 3.22 dan Tabel 3.23.

Tabel 3.17 Mata pencaharian penduduk wilayah perencanaan dan provinsi

Lokasi	Tahun	Petani & Nelayan		Industri		Pedagang		Jasa		Jumlah
			%		%		%		%	
Wilayah perencanaan	t-4									
	t									
Provinsi	t-4									
	t									

Sumber :

Tabel 3.18 Perkembangan keadaan industri di wilayah dan/atau kawasan

No.	Uraian	Tahun t - 4	Tahun t	Pertumbuhan (%)
A	ANEKA INDUSTRI a. Jumlah Perusahaan (unit) b. Tenaga Kerja (orang) c. Nilai Produksi (Rp. Juta) d. Nilai Ekspor (Rp. Juta)			
B	INDUSTRI MESIN LOGAM a. Jumlah Perusahaan (unit) b. Tenaga Kerja (orang) c. Nilai Produksi (Rp. Juta) d. Nilai Ekspor (Rp. Juta)			
C	INDUSTRI KIMIA DASAR a. Jumlah Perusahaan (unit) b. Tenaga Kerja (orang) c. Nilai Produksi (Rp. Juta) d. Nilai Ekspor (Rp. Juta)			
D	KELOMPOK INDUSTRI KECIL a. Jumlah Perusahaan (unit) b. Tenaga Kerja (orang) c. Nilai Produksi (Rp. Juta) d. Nilai Ekspor (Rp. Juta)			
	TOTAL SELURUH INDUSTRI a. Jumlah Perusahaan (unit) b. Tenaga Kerja (orang) c. Nilai Produksi (Rp. Juta) d. Nilai Ekspor (Rp. Juta)			

Sumber :

**Tabel 3.19 Kemampuan pengembangan
perdagangan/wiraswasta di wilayah dan/atau kawasan**

Tahun	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil	Jumlah
t-4 t-3 t-2 t-1 t				
Rata-rata Pertumbuhan				

Sumber :

**Tabel 3.20 Struktur penduduk menurut
kelompok umur di wilayah dan/atau kawasan**

Kelompok Umur	Jumlah Jiwa	Persentase
0 - 4 tahun 5 - 9 tahun 10 - 14 tahun Sub total 15 tahun keatas		
Jumlah		100 %

Sumber :

Tabel 3.21 Struktur penduduk menurut tingkat pendidikan di wilayah dan/atau kawasan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa	Persentase
Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA D-3 Sarjana / S2 / S3		
Jumlah		100 %

Sumber :

Tabel 3.22 Tingkat kesejahteraan yang telah dicapai

Keterangan	Kriteria	Persentase
Perkotaan	<p>Kondisi Bangunan Rumah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mewah • Permanen • Semi Permanen • Sementara <p>Luas Lingkungan Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Real Estate • Komplek • Kampung • Kumuh <p>Pemilikan Kendaraan / rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobil Mewah • Mobil Sederhana • Motor 	
Perdesaan	<p>Kondisi Bangunan Rumah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permanen • Semi Permanen • Sementara 	

Sumber :

**Tabel 3.23 Distribusi pendapatan per 20 % (kuantil)
kelompok rumah tangga**

20 % Kelompok Pendapatan	Ideal Indeks Gini < 0,3	Ketimpangan Berat Indeks Gini Sekitar 0,5	Perkotaan Wilayah Perencanaan Pada Th. T	Perdesaan Wilayah Perencanaan Pada Th. T
Tinggi	30 %	50 %		
Menengah Atas	25 %	20 %		
Menengah	20 %	15 %		
Menengah Bawah	15 %	10 %		
Rendah	10 %	5 %		

Sumber :

Keluaran

- 1) Memperoleh kepastian komoditas dan sektor unggulan yang didukung oleh analisis ketenagakerjaan.
- 2) Memperoleh kualitas wira usaha dan sumber daya manusia yang akan menentukan tingkat perubahan struktur tenaga kerja karena berkembangnya kegiatan ikutan, kegiatan penunjang, dan adanya diversifikasi yang lebih luas dalam sektor industri dan jasa.
- 3) Tersusunnya struktur tenaga kerja menurut kegiatan primer, sekunder dan tersier pada saat mulai dikembangkan Kawasan Andalan baik di perkotaan maupun perdesaan.
- 4) Memperoleh gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga perbaikan distribusi pendapatan.

Langkah-langkah

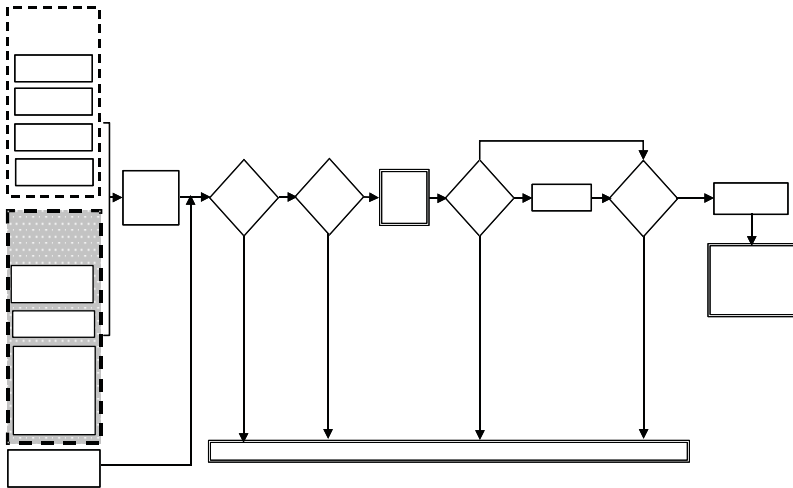
- 1) Menganalisis proporsi lapangan usaha wilayah perencanaan dan propinsi dengan metode analisis pergeseran dan *location quotients* sehingga dapat menetapkan komoditas unggulan.
- 2) Menganalisis optimalisasi produksi komoditas pertanian dan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi pasar.
- 3) Menganalisis kependudukan dan ketenagakerjaan di perkotaan dan perdesaan wilayah perencanaan.

- 4) Diversifikasi kegiatan industri dan jasa dengan melihat kegiatan sambung ke depan maupun ke belakang dari setiap produksi komoditas.
- 5) Menganalisis distribusi pendapatan rumah tangga baik di perdesaan maupun di perkotaan berdasarkan data nilai produksi dibagi jumlah tenaga kerja, serta membandingkan dengan tingkat kesejahteraan yang dicapai kalau dilihat dari kualitas kepemilikan barang berharga bagi setiap kelompok pendapatan.
- 6) Menganalisis kemungkinan terjadinya perbaikan dalam tingkat distribusi pendapatan, mungkin melalui peraturan Upah Minimum Regional (UMR), pembagian bonus atau pajak progresif.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Sumber daya manusia adalah masyarakat di kawasan itu sendiri yang diharapkan dapat mandiri dan berdaya, serta mampu memenuhi kebutuhannya secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Secara lokal penduduk/masyarakat tidak perlu mempunyai sumber daya secara menyeluruh, asalkan masyarakat yang bersangkutan dapat menerima dan bekerja sama dengan pendatang yang bertujuan ikut serta dalam pengembangan melalui partisipasi dalam produksi.
- 3) Kajian sumber daya manusia ini sangat penting, karena pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan akan efektif dan efisien bila ditangani oleh sumber daya manusia yang tepat, sehingga dapat dicapai perkembangan yang optimal.
- 4) Kajian sumber daya manusia meliputi wira usaha, tenaga ahli dan tenaga terampil.
- 5) Kuantitas dan kualitas wira usaha, serta tingkat kemudahan wira usaha bukan lokal yang kemudian dapat berpartisipasi dalam pengembangan kawasan.
- 6) Wira usaha harus mempunyai sifat-sifat :
 - a. Memiliki kemampuan untuk mengenal peluang pasar,
 - b. Memiliki kemampuan dalam tindakan alternatif, misalnya bila cara yang satu gagal, maka harus dapat cepat menggunakan cara yang lain,
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengkombinir elemen-elemen yang rasional dan irasional dalam keputusannya.
- 7) Tenaga ahli sangat diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengembangan. Kemudahan atau kemungkinan berpartisipasinya tenaga ahli dalam pengembangan sangat diperlukan.

- ### 3.3 Analisis perekonomian



Melakukan analisis untuk menemukan potensi dan permasalahan perekonomian yang dimiliki oleh wilayah dan/atau kawasan pada saat ini.

Deskripsi dan analisis kondisi perekonomian di dalam wilayah dan/atau kawasan pada saat ini.

Masukan

Masukan yang dibutuhkan untuk pencapaian masing-masing keluaran berbeda-beda, sehingga rincian kebutuhan untuk masing-masing keluaran akan dijabarkan terpilah-pilah.

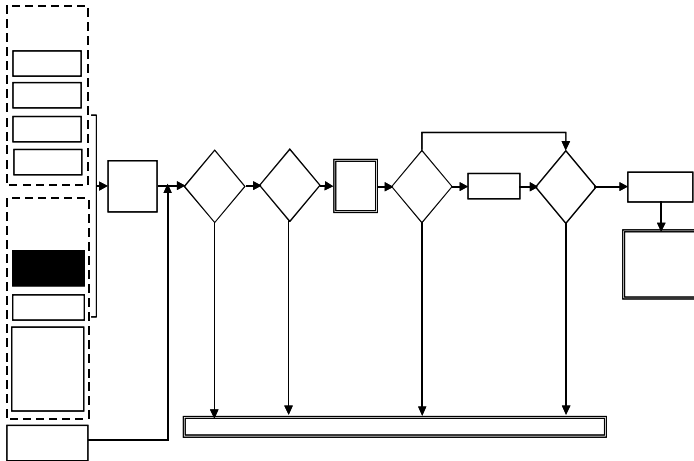
Keluaran

- 1) Struktur Ekonomi dan pergeserannya.
- 2) Sektor Basis.
- 3) Komoditi Sektor Basis yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor.

Langkah-langkah

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah masukan menjadi keluaran serta beberapa hal yang harus diperhatikan akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian masing-masing keluaran.

3.3.1 Struktur Ekonomi Dan Pergeserannya



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk menemukenali struktur ekonomi di dalam wilayah dan/ atau kawasan perencanaan saat ini.

Sasaran

- 1) Mengetahui tingkat PDRB pada suatu wilayah dan/atau kawasan yang dirinci berdasarkan lapangan usaha.
- 2) Mengidentifikasi struktur ekonomi dan pergeserannya di dalam wilayah dan/atau kawasan perencanaan pada saat ini.

Masukan

Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) tiap wilayah administrasi yang termasuk dalam wilayah perencanaan dirinci berdasarkan lapangan usahanya.

Keluaran

- 1) PDRB kawasan yang dirinci berdasarkan lapangan usaha.
- 2) Struktur Ekonomi dan pergeserannya di dalam wilayah dan/atau kawasan.

Langkah-langkah

- 1) Menjumlahkan besaran PDRB yang dirinci tiap sektor dari tiap wilayah administrasi yang termasuk dalam wilayah perencanaan untuk mendapatkan PDRB wilayah perencanaan yang dirinci tiap sektor.
- 2) Menghitung Persentase (%) PDRB masing-masing sektor terhadap PDRB total wilayah perencanaan untuk mengetahui kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB wilayah dan/atau kawasan.
- 3) Menentukan struktur ekonomi wilayah dan/atau kawasan dengan mengurutkan sektor-sektor dari yang terbesar kontribusinya terhadap PDRB wilayah dan/atau kawasan.
- 4) Melakukan analisis pergeseran struktur ekonomi wilayah dan/atau kawasan dengan menggunakan metode analisis yang sesuai.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Tabel PDRB yang digunakan adalah berdasarkan harga konstan.
- 2) Untuk menganalisis pergeseran struktur ekonomi kawasan dapat digunakan beberapa metode, seperti :
 - Metode *Shift-Share*.
 - Menggunakan data series atau tidak membatasi struktur ekonomi pada periode tertentu saja (memiliki pengertian yang dinamis), sehingga terlihat perubahan struktur ekonominya.
Cara ini lebih sederhana, namun *output* yang dihasilkan terbatas pada proses pergeserannya saja, tidak dapat dinilai kinerja ekonomi dan sektor unggulannya.

Keluaran

- 1) Penyerapan tenaga kerja masing-masing sektor.
- 2) Luas usaha dan produktivitas masing-masing sektor.
- 3) Sektor basis wilayah dan/atau kawasan perencanaan.

Langkah-langkah

- 1) Menganalisis jumlah tenaga kerja tiap sektor bidang usaha dalam struktur ekonomi untuk mengetahui distribusi penyerapan tenaga kerja masing-masing sektor.
- 2) Mensarikan kontribusi tiap-tiap sektor terhadap PDRB wilayah dan/atau kawasan perencanaan.
- 3) Menganalisis jumlah produksi masing-masing sektor.
- 4) Menganalisis luas usaha masing-masing sektor.
- 5) Menghitung produktivitas masing-masing sektor dengan membagi jumlah produksi sektor dengan luas usaha sektor.
- 6) Menentukan sektor-sektor yang dominan berdasarkan besarnya penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap PDRB wilayah dan/atau kawasan perencanaan.
- 7) Menentukan sektor basis dengan menggunakan metode analisis ekonomi yang sesuai.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Tabel PDRB yang digunakan adalah berdasarkan harga konstan.
- 2) Untuk menetapkan sektor basis dapat digunakan metode *Location Quotient* (LQ).

Metode location quotient (LQ)

Location quotient dapat dipergunakan sebagai alat ukur untuk mengukur spesialisasi relatif suatu daerah/kabupaten pada sektor-sektor tertentu. LQ ini mempunyai penggunaan yang luas sehingga satuan pengukuran apa saja dapat dipergunakan untuk menghitungnya.

Rumus umum yang biasa dipakai adalah sebagai berikut:

$$LQ = S_i \cdot N/N_i \cdot S$$

dimana

S_i = jumlah komoditas wilayah perencanaan;

N_i = jumlah komoditas di wilayah yang lebih luas;

S = jumlah komoditas total di wilayah dan/atau kawasan;

N = jumlah komoditas total di wilayah yang lebih luas.

Besarnya nilai LQ dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$LQ > 1$: wilayah perencanaan mempunyai spesialisasi dalam sektor tertentu dibandingkan wilayah yang lebih luas.

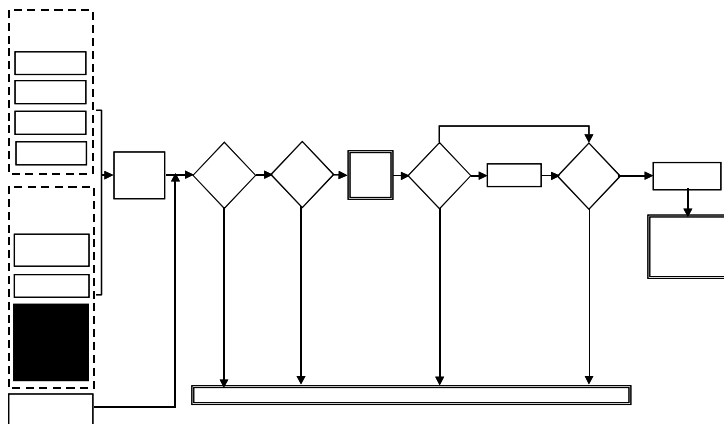
$LQ = 1$: tingkat spesialisasi wilayah perencanaan dalam sektor tertentu sama dengan wilayah yang lebih luas.

$LQ < 1$: dalam sektor tertentu, tingkat spesialisasi wilayah berada di bawah wilayah yang lebih luas.

- 3) Dalam menentukan wilayah pembanding, perlu diperhatikan perbedaan jenjang antara wilayah pembanding dengan satuan wilayah dan/atau kawasan perencanaan agar proporsional.

Contoh : Jika suatu wilayah atau kawasan perencanaan mencakup lebih dari 1 (satu) wilayah administratif, maka yang menjadi wilayah pembandingnya adalah Produk Domestik Bruto (PDB).

3.3.3 Komoditi sektor basis yang memiliki keunggulan dan komparatif berpotensi ekspor



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk menemukan sektor basis wilayah dan/atau kawasan yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor.

Sasaran

Mengetahui sektor-sektor di suatu wilayah dan/atau kawasan yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor.

Masukan

- 1) Sektor-Sektor Basis Yang Telah Ditetapkan Pada Bagian Sebelumnya,
- 2) Volume ekspor tiap-tiap komoditi dari masing-masing sektor basis di wilayah dan/atau kawasan perencanaan,
- 3) Untuk menggunakan metoda ini dibutuhkan data volume ekspor komoditi-komoditi yang sama di wilayah pembandingan.

Keluaran

- 1) Perbandingan volume ekspor komoditi yang sama dengan wilayah lain.
- 2) Keunggulan komparatif dan potensi ekspor komoditi.

Langkah-langkah

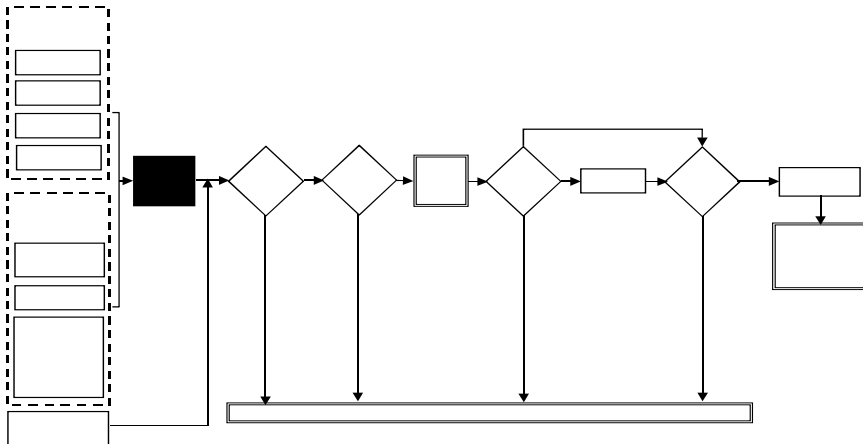
- 1) Mengidentifikasi komoditi dari sektor-sektor basis.
- 2) Menganalisis volume ekspor dari tiap komoditi di tiap sektor di wilayah dan/atau kawasan perencanaan.
- 3) Membandingkan volume ekspor tersebut dengan volume ekspor komoditi yang sama di wilayah lain sebagai pembandingan, sehingga dapat diketahui keunggulan komparatif dan potensi ekspor komoditi tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Untuk menentukan komoditi unggulan dapat digunakan Metode Revealed Comparative Advantages (RCA), yaitu rasio perbandingan volume produksi komoditi di wilayah dan/atau kawasan dengan wilayah pembandingnya.

- 2) Komoditi unggulan adalah komoditi dengan $RCA > 1$.
- 3) Dalam menentukan wilayah pembanding, perlu diperhatikan perbedaan jenjang antara wilayah pembanding dengan satuan wilayah dan/atau kawasan pengamatan agar proporsional.

3.4 Penentuan sektor/komoditas potensial



Pengertian sektor/komoditas potensial adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, sehingga dapat tercipta kemandirian pembangunan wilayah dan/atau kawasan. Sektor/komoditas potensial terdiri dari kegiatan ekonomi primer, sekunder dan tersier di wilayah dan/atau kawasan.

Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi primer, sekunder, dan tersier di wilayah dan/atau kawasan.

Sasaran

Teridentifikasikannya kegiatan ekonomi primer, sekunder dan tersier di wilayah dan/atau kawasan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi wilayah.

Masukan

- 1) Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Terhadap Perekonomian Wilayah,
- 2) Nilai *Location Quotient*,
- 3) Penyerapan tenaga kerja,
- 4) Nilai *forward* dan *backward linkage*.

Keluaran

- 1) Kegiatan ekonomi primer wilayah dan/atau kawasan.
- 2) Kegiatan ekonomi sekunder wilayah dan/atau kawasan.
- 3) Kegiatan ekonomi tersier wilayah dan/atau kawasan.

Langkah-langkah

A. Kegiatan ekonomi primer

Kegiatan ekonomi primer prinsipnya merupakan kegiatan produktif yang tumbuh karena potensi sumber daya alam atau kegiatan yang belum melakukan proses pengolahan terhadap hasil pengambilan potensi tersebut. Kegiatan ekonomi primer kawasan antara lain berupa hasil bumi seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan.

Langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan kegiatan ekonomi primer adalah membandingkan sektor perekonomian primer wilayah kabupaten/kota dibandingkan dengan total PDRB wilayah kabupaten/kota maupun provinsi atau dibandingkan terhadap keseluruhan sektor primer di tingkat provinsi. Contoh data PDRB dapat dilihat pada Tabel 3.24.

**Tabel 3.24 PDRB kegiatan sektor ekonomi primer
wilayah kabupaten/kota dan provinsi**

No	Lapangan Usaha	PDRB TH.. (Juta Rupiah)		Persentase Sektor Dalam Wilayah Kabupaten/Kota ...	Persentase Per Sektor Dalam Regional...
		Wilayah Kabupaten/Kota ...	Propinsi ...		
1	Tanaman Bahan Makanan	-	-	-	-
2	Tanaman Perkebunan	-	-	-	-
3	Peternakan & hasil-hasilnya	-	-	-	-
4	Kehutanan	-	-	-	-
5	Perikanan	-	-	-	-
6	Minyak Bumi	-	-	-	-
7	Penggalian	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-

Sumber :

B Kegiatan ekonomi sekunder

Kegiatan ekonomi sekunder sebagai kegiatan yang melayani sektor primer atau kegiatan yang tumbuh untuk mengolah hasil alam agar menjadi nilai tambah bagi daerah. Sektor yang menjadi kegiatan ekonomi sekunder adalah industri baik migas dan non-migas, perangkutan, dan perdagangan.

Langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan kegiatan ekonomi sekunder adalah :

- 1) Untuk mengetahui dominasi kegiatan ekonomi pada suatu wilayah dan/atau kawasan maka hasil identifikasi kegiatan ekonomi sekunder akan dibandingkan dengan ekonomi primernya.
- 2) Menghitung kontribusi nilai PDRB kegiatan ekonomi sekunder terhadap PDRB wilayah berikut nilai persentasenya. Seperti yang disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25 Kontribusi nilai PDRB pada kegiatan sektor ekonomi sekunder di wilayah kabupaten/kota dan provinsi

No	Lapangan Usaha	PDRB TH.. (Juta Rupiah)		Persentase Sektor Dalam Wilayah Kabupaten/Kota ...	Persentase Per Sektor Dalam Regional...
		Wilayah Kabupaten/Kota ...	Propinsi ...		
1	Industri Migas	-	-	-	-
2	Industri Non Migas	-	-	-	-
3	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-
4	Perangkutan	-	-	-	-
JUMLAH					

Sumber :

C Kegiatan ekonomi tersier

Kegiatan ekonomi tersier merupakan kegiatan yang tumbuh untuk melayani kegiatan sektor sekunder agar dapat meningkatkan nilai tambah bagi daerah sebagai wujud eksternalitas dari kegiatan sekunder. Kegiatan ekonomi tersier adalah komunikasi, hotel, rumah makan, dan jasa-jasa perkotaan lainnya.

Langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan kegiatan ekonomi tersier adalah :

- 1) Menghitung kontribusi kegiatan ekonomi tersier terhadap perekonomian wilayah.
- 2) Mengidentifikasi sektor mana saja yang mempunyai peranan dalam perkembangan wilayah.

Contoh tabel beberapa kegiatan sektor tersier wilayah dan/atau kawasan, dapat dilihat pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26 Kontribusi nilai PDRB pada kegiatan sektor ekonomi tersier di wilayah kabupaten/kota dan provinsi

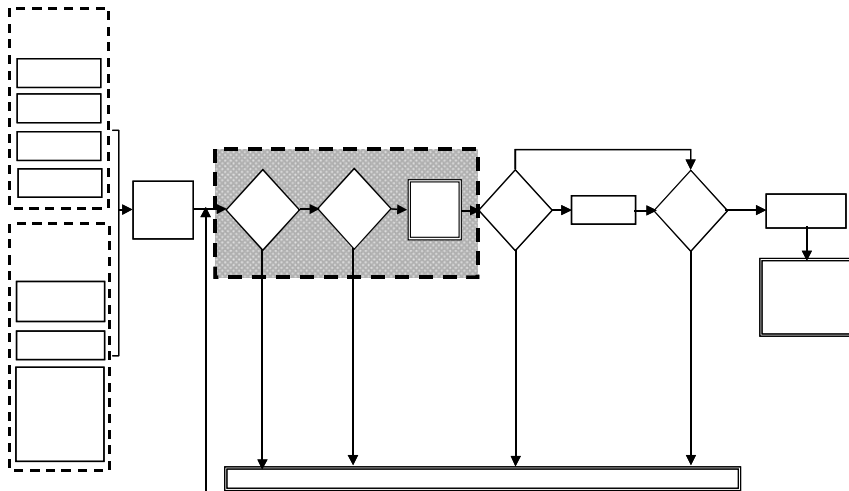
No	Lapangan Usaha	PDRB TH.. (Juta Rupiah)		Persentase Sektor Dalam Wilayah Kab/Kota ...	Persentase Per Sektor Dalam Regional...
		Wilayah Kab/Kota...	Propinsi...		
1	Listrik	-	-	-	-
2	Air Bersih	-	-	-	-
3	Bangunan	-	-	-	-
4	Hotel	-	-	-	-
5	Restaurant	-	-	-	-
6	Komunikasi	-	-	-	-
7	Bank	-	-	-	-
8	Lem. Keuangan non Bank	-	-	-	-
9	Sewa Bangunan	-	-	-	-
10	Jasa Perusahaan	-	-	-	-
11	Pemerintahan Umum	-	-	-	-
12	Swasta	-	-	-	-
JUMLAH					

Sumber :

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Kegiatan primer dan kegiatan sekunder adalah merupakan kegiatan *basic*. Kegiatan *basic* ini menggunakan sumber daya lokal saja atau sebagian juga mempergunakan kapital impor yang dapat memberikan peluang untuk ekspor ke luar kawasan; dan selanjutnya dapat memberikan kekayaan kawasan dan peluang kerja yang disebut sebagai kegiatan ikutan atau kegiatan tersier dan biasanya merupakan kegiatan jasa dan perdagangan.
- 2) Apabila suatu kawasan mempunyai kegiatan ekonomi sekunder yang tinggi, mengindikasikan adanya inovasi teknologi sehingga dapat lebih cepat menambah akselerasi pengembangan wilayah.
- 3) Apabila suatu kawasan mempunyai kegiatan ekonomi tersier yang cukup tinggi, mengindikasikan bahwa kawasan/daerah tersebut mempunyai sistem perekonomian wilayah yang semakin modern dan mendunia.

3.5 Penentuan sektor/komoditas unggulan



Pengertian sektor unggulan adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, sehingga dapat tercipta kemandirian pembangunan wilayah.

Sektor unggulan dapat pula diartikan sebagai sektor yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang ditunjukkan dengan parameter-parameter, seperti :

- 1) Sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup tinggi,
- 2) Komoditas yang mempunyai *multiplier effect* yang cukup tinggi,
- 3) Komoditas dengan kandungan deposit yang melimpah,
- 4) Memiliki potensi *value added* yang cukup baik.

Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis untuk memilih komoditas/sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah dan/atau kawasan.

Sasaran

Teridentifikasikannya sektor/komoditas unggulan yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi wilayah.

Masukan

- 1) Kondisi makro ekonomi regional dikaitkan dengan wilayah dan/atau kawasan.
- 2) Kondisi kinerja ekonomi wilayah dan/atau kawasan.

Keluaran

- 1) Identifikasi sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya.
- 2) Perumusan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan/atau kawasan sekitar.

Langkah-langkah

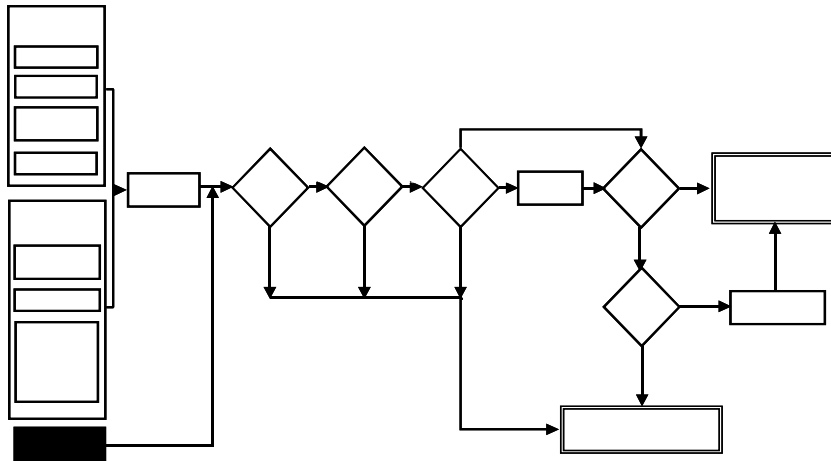
- 1) Memilih variabel kinerja sektor perekonomian yang dianggap dapat mempresentasikan unggulnya suatu sektor.
- 2) Menyeragamkan definisi sektor yang dipakai.
- 3) Menyusun matriks sektor terhadap variabel-variabel terpilih.
- 4) Memilih sektor yang benar-benar unggul berdasarkan perbandingan nilai variabel-variabel tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Sektor unggulan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Sektor unggulan, yang mempunyai nilai sangat dominan, yang dapat diinterpretasikan sebagai sektor perekonomian yang mempunyai keunggulan dalam kontribusi produksi, baik sektoral maupun total, daya persebaran dan derajat kepekaan yang kuat, serta mempunyai basis ekonomi yang kuat.
- 2) Sektor potensial, merupakan sektor-sektor yang tidak dominan, sehingga masih bisa dikembangkan.

3.5.1 Analisis pengaruh kebijakan pemerintah



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap pengembangan komoditas potensial di wilayah dan/atau kawasan.

Sasaran

Teridentifikasikannya pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengembangan komoditas unggulan di wilayah dan/atau kawasan.

Masukan

- 1) Undang-undang terkait, antara lain, Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Undang-Undang tentang Perpajakan, dan Undang-Undang tentang Investasi.
- 2) Kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut kebijakan pembangunan nasional di berbagai bidang termasuk kebijakan sektoral, daerah, dan sebagainya.
- 3) Prospek potensi perekonomian wilayah dan/atau kawasan.

Keluaran

Rumusan sektor/komoditas potensial yang terpengaruh oleh kebijakan pemerintah sehingga diharapkan dapat menjadi sektor/komoditas unggulan.

Langkah-langkah

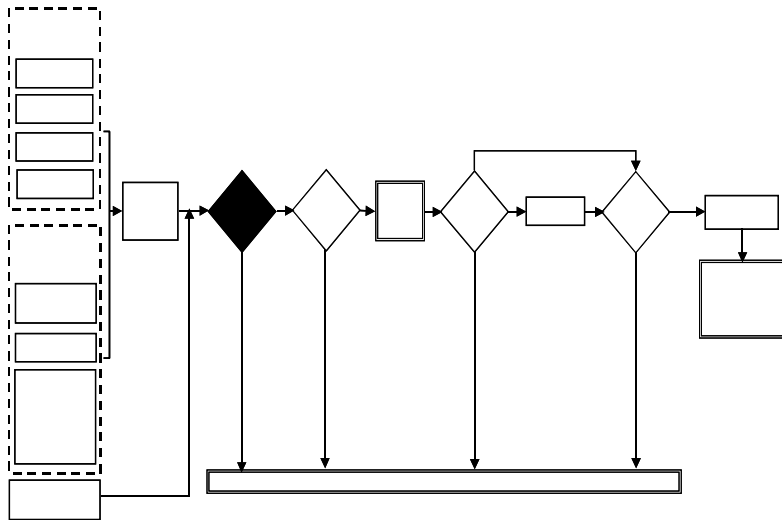
- 1) Menginventarisasi kebijakan yang menyangkut penetapan kawasan yang mempunyai potensi ekonomi sebagai upaya untuk memberi arahan dalam pengembangan ekonomi wilayah dan/atau kawasan.
- 2) Menginventarisasi kebijakan yang menyangkut kerjasama ekonomi inter dan intra wilayah dan/atau kawasan sebagai proses tindak lanjut terhadap pemerataan program pembangunan nasional yang merupakan tujuan dalam mencapai masyarakat ekonomi yang madani dan sejahtera dalam lingkup zona maupun regional.
- 3) Menginventarisasi kebijakan yang mengatur pembagian peran *stakeholder* yang seimbang antara masyarakat, pemerintah, dan swasta sebagai alat dalam menumbuhkembangkan dan menyukseskan rencana pembangunan ekonomi wilayah dan/atau kawasan.
- 4) Mengidentifikasi kebijakan yang mengarah pada bentuk-bentuk '*growth driven*', untuk menciptakan peluang-peluang pasar dan menciptakan prakondisi yang menarik bagi para investor apalagi bila dilengkapi dengan input teknologi sebagai sarana dalam menjaring pasar regional, nasional, dan global.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Kebijakan pemerintah yang perlu diperhatikan, antara lain :

- 1) Kebijakan pengembangan wilayah.
- 2) Kebijakan sektoral yang terkait dengan kawasan/wilayah perencanaan.
- 3) Kebijakan otonomi daerah.

3.5.2 Analisis pasar unggulan (*market trend*) dan pola aliran komoditas unggulan



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis pasar unggulan (*market trend*) dan pola aliran komoditas unggulan.

Sasaran

Teridentifikasikannya pasar unggulan dan pola aliran komoditas unggulan.

Masukan

- 1) Data asal bahan baku yang digunakan untuk memproduksi komoditas unggulan.
- 2) Data daerah-daerah yang menjadi pasar untuk memasarkan komoditas unggulan tersebut.
- 3) Tabel Input Output Nasional.
- 4) Data jaringan jalan yang mendukung distribusi komoditas unggulan.
- 5) Data titik-titik yang menjadi inlet-outlet komoditas unggulan, misalnya pelabuhan, bandara, atau terminal khusus barang.

Keluaran

- 1) Identifikasi potensi pasar untuk komoditas unggulan.
- 2) Identifikasi pola aliran komoditas unggulan.

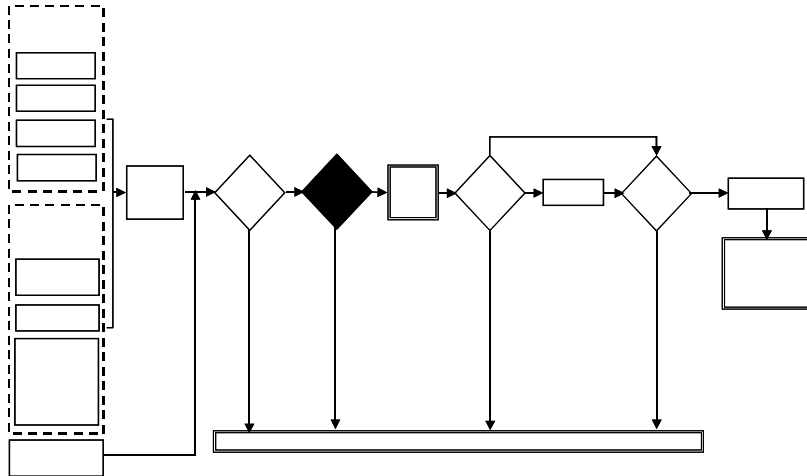
Langkah-langkah

- 1) Mengidentifikasi asal impor bahan baku.
- 2) Menginventarisasi wilayah-wilayah tujuan produksi pasar.
- 3) Menganalisis keterkaitan antarsektor (*forward and backward linkages*), baik di dalam wilayah/dan atau kawasan, maupun antara wilayah dan/atau kawasan dengan wilayah dan/atau kawasan lainnya berdasarkan keterkaitan bahan baku dan daerah pemasaran (pasar). Keterkaitan ini ditunjukkan dalam bentuk besarnya komoditas (dalam ton atau satuan-satuan lainnya).
- 4) Menentukan pasar unggulan berdasarkan besarnya keterkaitan.
- 5) Menganalisis ruas-ruas jalan yang digunakan untuk mendistribusikan masing-masing komoditi unggulan, sehingga diketahui pola alirannya dan besarnya.
- 6) Menganalisis besarnya komoditas unggulan yang harus ditampung di masing-masing inlet dan outlet berdasarkan pola aliran tersebut.
- 7) Mengidentifikasi kemampuan masing-masing inlet-outlet untuk menampung distribusi komoditas unggulan sehingga dapat diketahui apakah pola aliran yang terjadi telah didukung oleh prasarana transportasi yang ada.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Kajian peluang pasar yang lebih luas bahkan sampai tingkat global harus melalui penelitian-penelitian yang berkordinasi dengan lembaga yang terkait.
- 2) Lembaga tersebut antara lain: kamar dagang dan industri, lembaga Litbang yang melakukan kajian produk baru dan pencarian pasar baru, pusat informasi terpadu masyarakat dunia usaha, sistem pemasaran bersama, dan lain sebagainya.

3.5.3 Analisis potensi pengembangan kegiatan/komoditas unggulan



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis potensi pengembangan bagi kegiatan/komoditas unggulan di kawasan dan/atau wilayah.

Sasaran

Terumuskannya potensi pengembangan bagi kegiatan/komoditas unggulan di kawasan dan/atau wilayah perencanaan.

Masukan

- 1) Deposit sumber daya alam yang dimiliki dan lokasinya.
- 2) Kemampuan Lahan.
- 3) Kemampuan/daya tampung sumber daya buatan.
- 4) Kemampuan sumber daya manusia.

Keluaran

- 1) Potensi sumber daya (alam, lahan, buatan dan manusia) untuk pengembangan kegiatan ekonomi primer.

- 2) Potensi sumber daya (alam, lahan, buatan dan manusia) untuk pengembangan kegiatan ekonomi sekunder.
- 3) Potensi sumber daya (alam, lahan, buatan dan manusia) untuk pengembangan kegiatan ekonomi tersier.

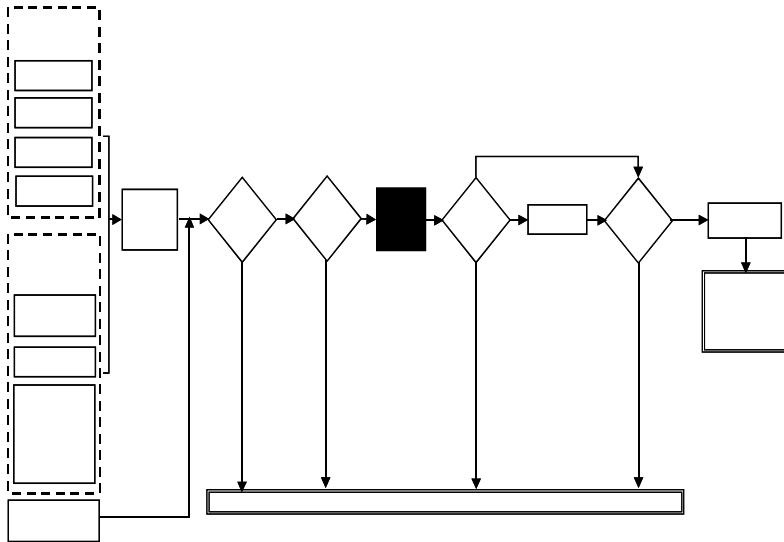
Langkah-langkah

- 1) Menganalisis potensi pengembangan dari komoditas yang berkaitan dengan produksi pertanian dan produksi pertambangan.
- 2) Melihat kemungkinan terjadinya kegiatan ikutan dan penunjang dari kegiatan produksi pertanian dan produksi pertambangan.
- 3) Merumuskan permasalahan dalam produksi komoditas pertanian maupun tambang misalnya masalah aksesibilitas, perlunya peremajaan tanaman perkebunan, penyerapan tenaga kerja, dan sebagainya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Suatu penelitian atau studi pada tahap awal yang dilakukan adalah pengumpulan data dan identifikasi potensi sumber daya yang terdiri dari lokasi, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia.
- 2) Identifikasi potensi adalah sebagai output dari analisis yang dilakukan melalui tahapan kompilasi data berupa tabel, peta atau informasi lainnya serta perumusan langkah-langkah proses analisis.
- 3) Komoditas/jasa unggulan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan adalah komoditas yang kegiatan sambungnya cukup panjang dibandingkan yang bukan unggulan, baik kegiatan sambung ke depan dan atau kegiatan sambung ke belakang. Kegiatan sambung ke depan disebut derajat kepekaan, dan kegiatan sambung ke belakang disebut derajat penyebaran. Kegiatan sambung dapat digambarkan melalui pohon industri.

3.5.4 Analisis pemilihan sektor/komoditas unggulan



Lingkup pekerjaan

Menentukan sektor/komoditas utama yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi kawasan dan/atau wilayah perencanaan yang dalam pelaksanaannya dapat berfungsi sebagai salah satu sektor prioritas dalam program-program maupun alokasi dana pembangunan dan juga sebagai tempat investasi dari kalangan swasta yang ingin berusaha di wilayah tersebut. Dengan demikian, diharapkan nantinya dapat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja di kawasan dan/atau wilayah.

Sasaran

- 1) Tergambarkannya posisi relatif perekonomian wilayah dalam konstelasi regional.
- 2) Terjabarkannya sektor-sektor potensial kawasan dan/atau wilayah.
- 3) Teridentifikasinya sektor-sektor unggulan.
- 4) Terumuskannya sektor-sektor unggulan yang prioritas di kawasan dan/atau wilayah perencanaan.

Masukan

- 1) Sektor/komoditas potensial terdiri dari kegiatan ekonomi primer, sekunder, dan tersier di kawasan dan/atau wilayah.
- 2) Sektor/komoditas potensial yang terpengaruh oleh kebijakan pemerintah sehingga diharapkan dapat menjadi sektor/komoditas unggulan.
- 3) Potensi pasar untuk komoditas unggulan.
- 4) Pola aliran komoditas unggulan.
- 5) Potensi sumber daya (alam, lahan, buatan, dan manusia) untuk pengembangan kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier.

Keluaran

Sektor/komoditas unggulan yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi wilayah yang dalam pelaksanaannya dapat berfungsi sebagai salah satu sektor prioritas dalam program-program maupun alokasi dana pembangunan dan juga sebagai tempat investasi dari kalangan swasta yang ingin berusaha di wilayah tersebut.

Langkah-langkah

Menentukan keunggulan suatu sektor berdasarkan parameter sebagai berikut:

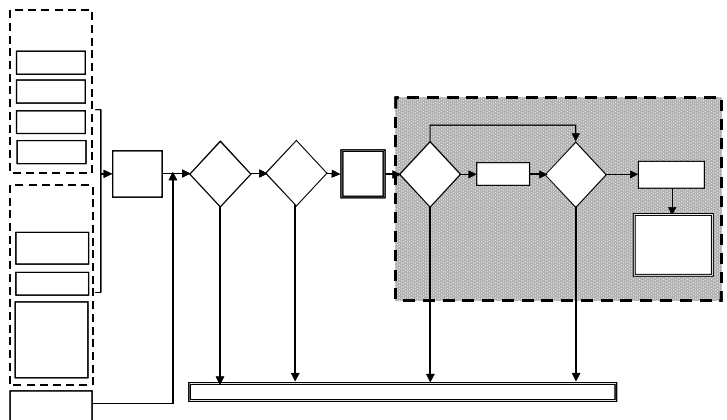
- 1) Tingkat proporsi sektor terhadap PDRB wilayah yang tertinggi dengan nilai acuan minimum di atas nilai rata-rata dan selang nilainya dengan sektor yang di bawah cukup signifikan jauhnya.
- 2) Tingkat proporsi sektor terhadap PDRB wilayah yang tertinggi dengan nilai acuan minimum di atas nilai rata-rata dan selang nilainya dengan sektor yang di bawah cukup signifikan jauhnya.
- 3) Tingkat persentase sektor terhadap PDRB Sektoral Provinsi yang terbesar, dengan nilai acuan minimum, di atas 50%.
- 4) Nilai LQ (*Location Quotient*) di atas satu ($LQ > 1$), artinya sektor yang dapat dimasukkan kategori unggul adalah sektor yang mempunyai nilai LQ lebih dari satu karena dapat diinterpretasikan bahwa dengan nilai tersebut, berarti sektor tersebut sudah tidak hanya melayani kepentingan lokal, tetapi juga sudah berorientasi keluar.

- 5) Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja paling besar, artinya sektor tersebut mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak sehingga lebih cepat dalam melakukan pemerataan pendapatan ekonomi.
- 6) Tingkat keterlibatan dunia usaha kecil dan menengah terbanyak, artinya sektor tersebut lebih mengakar pondasi ekonominya sehingga peluang keberlanjutannya lebih besar karena kaya akan investasi lokal.
- 7) Mempunyai nilai ekspor terbesar, baik dari nilai rupiah maupun volume, serta frekuensinya sehingga dapat lebih memberikan nilai tambah bagi daerah.
- 8) Sektor yang mempunyai *forward* dan *backward linkage* terbesar, artinya sektor tersebut mempunyai proses pengolahan yang panjang, artinya *value added* yang berputar di kawasan tersebut makin besar, karena mampu mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomis pendukung.
- 9) Terdapat peluang pasar dan minat investasi.

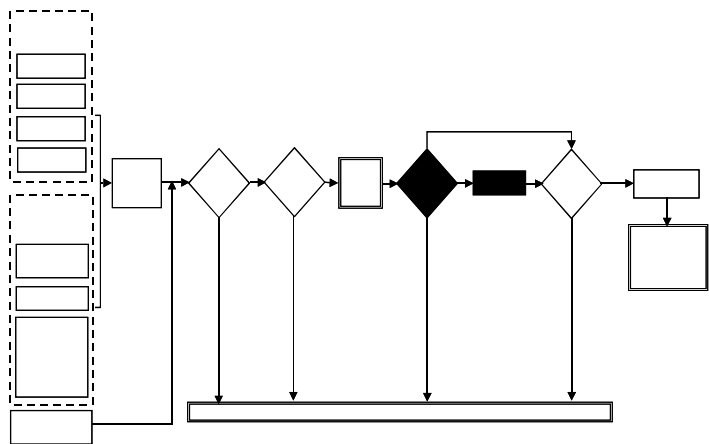
Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Walaupun sebenarnya belum ada variabel yang baku dan representatif secara menyeluruh dalam menentukan sektor unggulan, tetapi pada prinsipnya kriteria yang dapat dipilih untuk mengukur keunggulan suatu sektor, yaitu dari aspek PDRB, Sektor Basis (LQ), Tenaga Kerja, investasi, keterlibatan usaha kecil dan menengah, tingginya nilai ekspor, dan Input-Output.
- 2) Variabel-variabel tersebut kemudian diturunkan menjadi parameter keunggulan sektor-sektor tersebut dengan menyatakan bahwa nilai dari masing-masing variabel tersebut adalah paling besar.
- 3) Untuk menyeragamkan satuan perhitungan dalam penentuan sektor unggulan ini, maka yang digunakan sebagai acuan adalah sub-sektor atau lapangan usaha seperti yang dicantumkan dalam terminologi PDRB.
- 4) Klasifikasi lapangan usaha dipakai dalam penentuan ini karena di samping kemudahan data dalam menganalisis data, juga lapangan usaha bisa diwakilkan dari sekian banyak variabel karena sifatnya yang tidak kaku dan kemudian untuk menelurkan komoditas unggulannya apa akan lebih spesifik dan terfokus pada suatu kegiatan produksi.

3.6. Penilaian kelayakan pengembangan komoditas unggulan



3.6.1 Analisis kebutuhan teknologi untuk mengolah komoditas unggulan



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis terhadap kebutuhan dan ketersediaan teknologi untuk mengolah komoditas unggulan yang siap dipasarkan.

Sasaran

- 1) Teridentifikasikannya teknologi yang diperlukan untuk mengolah komoditas unggulan dari wilayah dan/atau kawasan, sehingga siap untuk dipasarkan.
- 2) Penilaian kelayakan investasi teknologi untuk mengolah produk unggulan yang siap dipasarkan.

Masukan

- 1) Data sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya.
- 2) Data identifikasi sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar.
- 3) Data pohon industri untuk komoditas unggulan.

Keluaran

- 1) Identifikasi teknologi yang diperlukan untuk mengolah komoditas unggulan.
- 2) Penilaian kelayakan investasi teknologi

Langkah-langkah

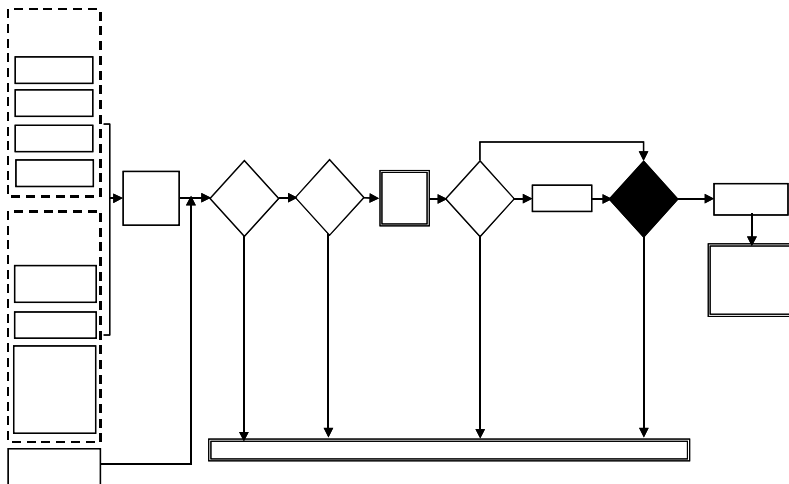
- 1) Mengidentifikasi produk komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 2) Mengidentifikasi kebutuhan teknologi untuk mengolah bahan baku sehingga menjadi produk yang siap dipasarkan.
- 3) Melakukan analisis terhadap kebutuhan dan ketersediaan teknologi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dipasarkan.
- 4) Melakukan analisis kelayakan untuk investasi teknologi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Produk komoditas yang dibutuhkan pasar, terutama pasar global harus melalui penelitian-penelitian yang berkordinasi dengan lembaga yang terkait.
- 2) Lembaga tersebut antara lain: kamar dagang dan industri daerah, lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan kajian produk baru dan pencarian pasar baru, pusat informasi terpadu masyarakat dunia usaha, riset dan teknologi, lembaga pendidikan tinggi, dan lain sebagainya.

- 3) Indikator yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi investasi teknologi adalah :
- a. Indikator **Financial Internal Rate of Return (FIRR)**
Untuk investasi komponen-komponen yang *cost recovery*, maka nilai indikator FIRR harus lebih besar dari biaya modal.
 - b. Indikator **Economic Internal Rate of Return (EIRR)**
Untuk investasi komponen-komponen yang *non-cost recovery*, maka perhitungan indikator EIRR harus lebih besar dari 10%.
 - c. **Net Present Value (NPV)**
Untuk keseluruhan investasi yang ditanamkan dalam pengembangan kawasan harus memiliki nilai NPV lebih besar dari 0.
 - d. Penerapan tarif rata-rata untuk komponen-komponen yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan membeli.

3.6.2 Analisis kebutuhan infrastruktur untuk pengembangan komoditas unggulan



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis terhadap kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur untuk pengembangan dan pemasaran komoditas unggulan.

Sasaran

- 1) Teridentifikasikannya infrastruktur untuk pengembangan dan pemasaran komoditas unggulan.
- 2) Penilaian kelayakan investasi infrastruktur untuk pengembangan dan pemasaran produk unggulan.

Masukan

- 1) Data sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya.
- 2) Data identifikasi sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar.
- 3) Data pohon industri untuk komoditas unggulan.
- 4) Data ketersediaan infrastruktur di wilayah dan/atau kawasan atau wilayah-wilayah yang terkait.

Keluaran

- 1) Identifikasi infrastruktur yang diperlukan untuk mengembangkan komoditas unggulan.
- 2) Penilaian kelayakan investasi infrastruktur.

Langkah-langkah

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur untuk mengembangkan dan memasarkan komoditas unggulan.
- 2) Melakukan analisis terhadap kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur untuk mengembangkan dan memasarkan produk/komoditas unggulan.
- 3) Melakukan analisis kelayakan untuk investasi infrastruktur.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Ketersediaan infrastruktur yang sudah terbangun dan yang direncanakan untuk dibangun.
- 2) Kajian kebutuhan infrastruktur dapat dilakukan sekaligus untuk beberapa komoditas, baik komoditas unggulan maupun bukan unggulan (prospektif).

- 3) Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi investasi infrastruktur adalah :
- a. Indikator **FIRR**
Untuk investasi komponen-komponen yang *cost recovery*, maka nilai indikator FIRR harus lebih besar dari biaya modal.
 - b. Indikator **EIRR**
Untuk investasi komponen-komponen yang *non-cost recovery*, maka perhitungan indikator EIRR harus lebih besar dari 10%.
 - c. **NPV** untuk keseluruhan investasi yang ditanamkan dalam pengembangan kawasan harus memiliki nilai NPV lebih besar dari 0.
 - d. Penerapan tarif rata-rata untuk komponen-komponen yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan membeli.

Bab IV

Analisis aspek sosial budaya

4.1 Umum

Dalam upaya untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penilaian/analisis aspek sosial budaya di wilayah dan/atau kawasan. Penilaian/analisis aspek sosial budaya dapat diperoleh melalui hasil pengukuran beberapa indikator sosial (*urban social indicator*) misalnya struktur sosial budaya, pelayanan sarana dan prasarana budaya, potensi sosial budaya masyarakat, atau kesiapan masyarakat terhadap suatu pengembangan.

Tujuan analisis aspek sosial budaya adalah mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung atau menghambat pengembangan wilayah dan/atau kawasan, serta memiliki fungsi antara lain:

- 1) Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah dan/atau kawasan serta pembangunan sosial budaya masyarakat.
- 2) Mengidentifikasi struktur sosial budaya masyarakat .
- 3) Menilai pelayanan sarana dan prasarana sosial budaya yang mendukung pengembangan wilayah dan/atau kawasan.
- 4) Menentukan prioritas-prioritas utama dalam formulasi kebijakan pembangunan sosial budaya masyarakat.
- 5) Memberikan gambaran situasi dan kondisi objektif dalam proses perencanaan.
- 6) Sebagai acuan pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan penilaian program-program pembangunan sosial budaya secara integratif.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan analisis aspek sosial budaya antara lain:

- 1) Teridentifikasinya struktur sosial dan budaya yang terbentuk di wilayah dan/atau kawasan.
- 2) Terumuskannya potensi dan kondisi sosial budaya, meliputi pasar tenaga kerja, keragaman sosial budaya penduduk, serta jumlah dan pertumbuhan penduduk.

- 3) Penilaian pelayanan sarana dan prasarana sosial budaya yang mendukung pengembangan wilayah dan/atau kawasan.

4.1.1 Pengumpulan data

Data yang dibutuhkan untuk analisis sosial budaya wilayah dan/atau kawasan ini antara lain meliputi:

- 1) Data makro, yang diperoleh dari BPS Pusat dan Daerah atau data yang diperoleh dari Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya.
- 2) Data mikro, yang diperoleh dari hasil-hasil studi sosial budaya di wilayah dan/atau kawasan.

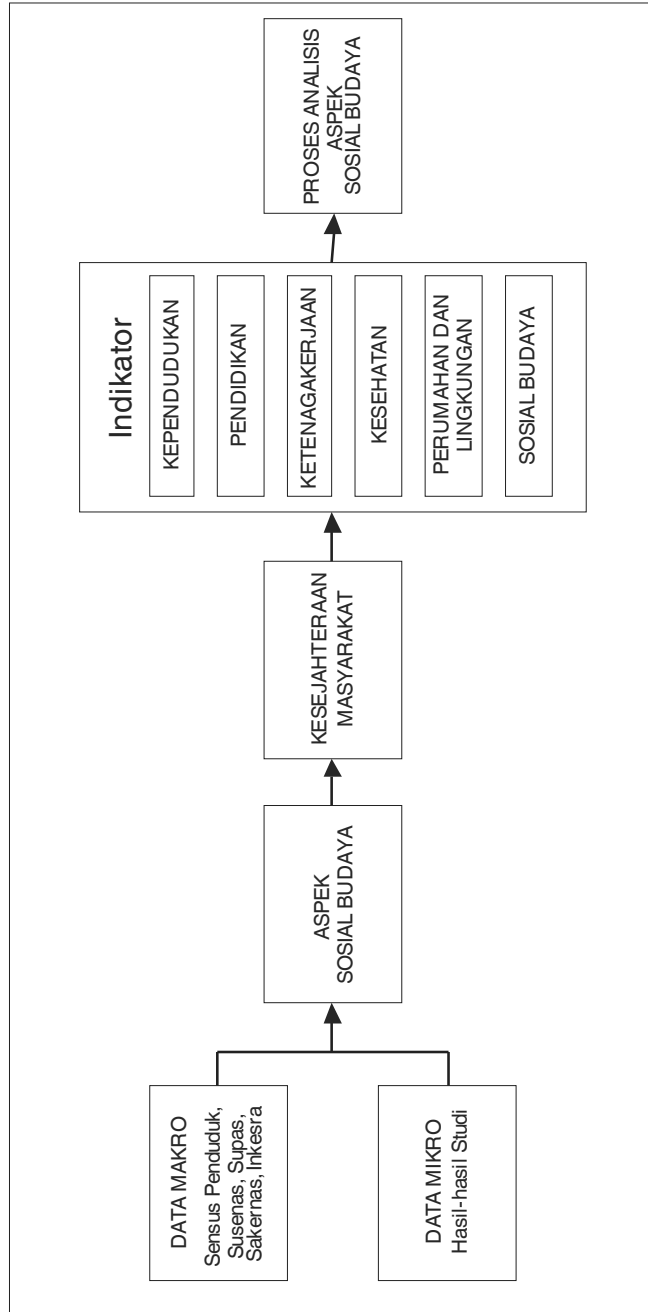
Pengumpulan data analisis sosial budaya ini bersifat sekunder atau '*desk study*', yaitu mengkaji referensi yang relevan dengan objek penelitian, dengan menggunakan data *existing* suatu wilayah dan/atau kawasan dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis masalah. Data yang dibutuhkan dipilih sesuai kebutuhan yaitu meliputi aspek sosial budaya yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah dan/atau kawasan. Proses pengumpulan data untuk analisis aspek sosial budaya dapat dilihat pada Gambar 4.1.

4.2 Indikator sosial budaya

Pada hakekatnya pengukuran indikator sosial budaya tidak berdiri sendiri melainkan terkait erat dengan kegiatan lainnya, yaitu aspek ekonomi dan kelembagaan. Seringkali sulit untuk menemukan indikator yang sederhana dan hanya mengukur satu aspek saja karena keberhasilan pengembangan suatu kawasan sangat ditentukan oleh kinerja sektoral dan berbagai pelaku utama pembangunan (*stakeholders*) seperti Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat sendiri.

Dalam penyusunan indikator ini perlu digunakan prinsip '*parsimony*' yang artinya semakin sedikit indikator yang digunakan semakin baik, untuk itu harus dipilih indikator-indikator yang paling efisien. Suatu wilayah dan/atau kawasan perencanaan mungkin terdiri dari dua wilayah otonom atau lebih maka pemilihan indikator bersifat umum dapat digunakan pada semua kelompok penduduk tanpa dibedakan.

Gambar 4.1 Bagan alir proses pengumpulan data aspek sosial budaya



Jenis indikator yang disajikan dalam pedoman ini tidak hanya berupa indikator input dan proses, tetapi juga indikator *output/outcome* yang disebut ‘indikator keberhasilan’ atau indikator dampak (*impact indicators*). Indikator keberhasilan digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu keadaan telah dicapai sesuai ukuran tertentu yang telah ditetapkan. Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu contoh, yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan di bidang pendidikan.

Salah satu indikator yang dipakai pada pedoman ini adalah ‘indikator komposit objektif’ yaitu indikator tunggal yang merupakan gabungan dari beberapa indikator kesejahteraan rakyat dari berbagai data sensus dan survei. Indikator komposit dipakai untuk membandingkan tingkat indikator tertentu atau tingkat kesejahteraan rakyat antar daerah di wilayah dan/atau kawasan. Indikator komposit objektif yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ *Human Development Index (HDI)* yang merupakan gabungan dari tiga indikator tunggal yaitu angka harapan hidup (*life expectancy*), angka melek huruf (*adult literacy rate*) dan rata-rata lamanya pendidikan yang diperoleh (*mean years of schooling*).

Indikator komposit objektif lainnya yang dapat digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life Index/PQLI*) yang merupakan gabungan dari indikator angka kematian bayi (IMR), angka harapan hidup pada umur satu tahun dan angka melek huruf penduduk dewasa (persentase penduduk dewasa berumur 15 tahun ke atas). Baik Indeks Pembangunan Manusia maupun Indeks Mutu Hidup dapat menggambarkan keseluruhan hasil pembangunan sosial ekonomi.

Indikator angka kematian bayi dan angka harapan hidup umur satu tahun merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kemajuan sosial karena keduanya menyajikan dampak dari keadaan gizi, kesehatan, pendapatan, dan lingkungan umum dari suatu masyarakat. Pada saat yang sama kedua indikator tersebut secara terpisah merefleksikan aspek-aspek interaksi sosial yang cukup berbeda, jika angka kematian bayi secara peka menggambarkan taraf ketersediaan air bersih, kondisi di dalam rumah, dan kesejahteraan ibu, maka angka harapan hidup umur satu tahun merefleksikan taraf gizi dan keadaan lingkungan luas di luar rumah.

Indikator angka melek huruf juga merupakan indikator yang penting karena merupakan ukuran kesejahteraan dan taraf keterampilan yang diperlukan dalam proses pembangunan. Tingkat melek huruf tidak dapat berkembang tanpa kemajuan yang memadai dalam masyarakat yang membuatnya sebagai suatu keterampilan yang secara luas diinginkan. Tingkat melek huruf dari kelompok penduduk miskin dapat memperlihatkan tingkat sumbangan yang mampu mereka berikan dalam pertumbuhan ekonomi atau dapat memberikan indikasi posisi wanita dalam masyarakat (Inkesra, 1994). Meskipun banyak indikator sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu wilayah, tetapi dalam pedoman kelayakan sosial budaya ini hanya akan digunakan beberapa indikator yang dianggap dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Kelompok indikator sektoral tersebut meliputi Kependudukan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Perumahan, dan Lingkungan serta Sosial Budaya.

4.2.1 Indikator sosial budaya

Indikator sektoral tersebut untuk menggambarkan secara garis besar keadaan, tingkat dan perkembangan masyarakat. Perbandingan tingkat indikator antar beberapa daerah otonom diberikan dalam bentuk indikator komposit, dapat berupa uraian tabel, tabel-tabel atau gambar/grafik.

Data bersumber dari Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Inkesra (Indikator Kesejahteraan Rakyat), Supas atau Surkesnas. Semua sumber data tersebut telah dikumpulkan dan diolah oleh BPS. Data BPS tersebut sebenarnya mempunyai keterbatasan. Pengumpulan data Sensus Penduduk dilakukan sepuluh tahun sekali; Susenas meskipun dilakukan setiap tahun tapi pengumpulan datanya serupa setiap tiga tahun; sedangkan Sakernas meskipun dilakukan empat kali dalam setahun tetapi jumlah sampelnya relatif kecil sehingga jika ditampilkan menurut provinsi seringkali tidak akurat.

Selain menggunakan data BPS, pengisian pedoman juga dapat menggunakan data yang berasal dari luar BPS; misalnya Laporan dari Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, BKKBN, Laporan kegiatan Departemen/Non Departemen serta studi lainnya yang bersifat mikro.

4.3 Analisis aspek sosial budaya

Analisis aspek sosial budaya pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kawasan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya menyangkut aspek yang bersifat lahiriah atau material tetapi juga bersifat batiniah atau spiritual. Sedemikian luasnya aspek-aspek yang terkandung dalam istilah tersebut tetapi tidak berarti semuanya dapat menggambarkan secara utuh makna kesejahteraan rakyat .

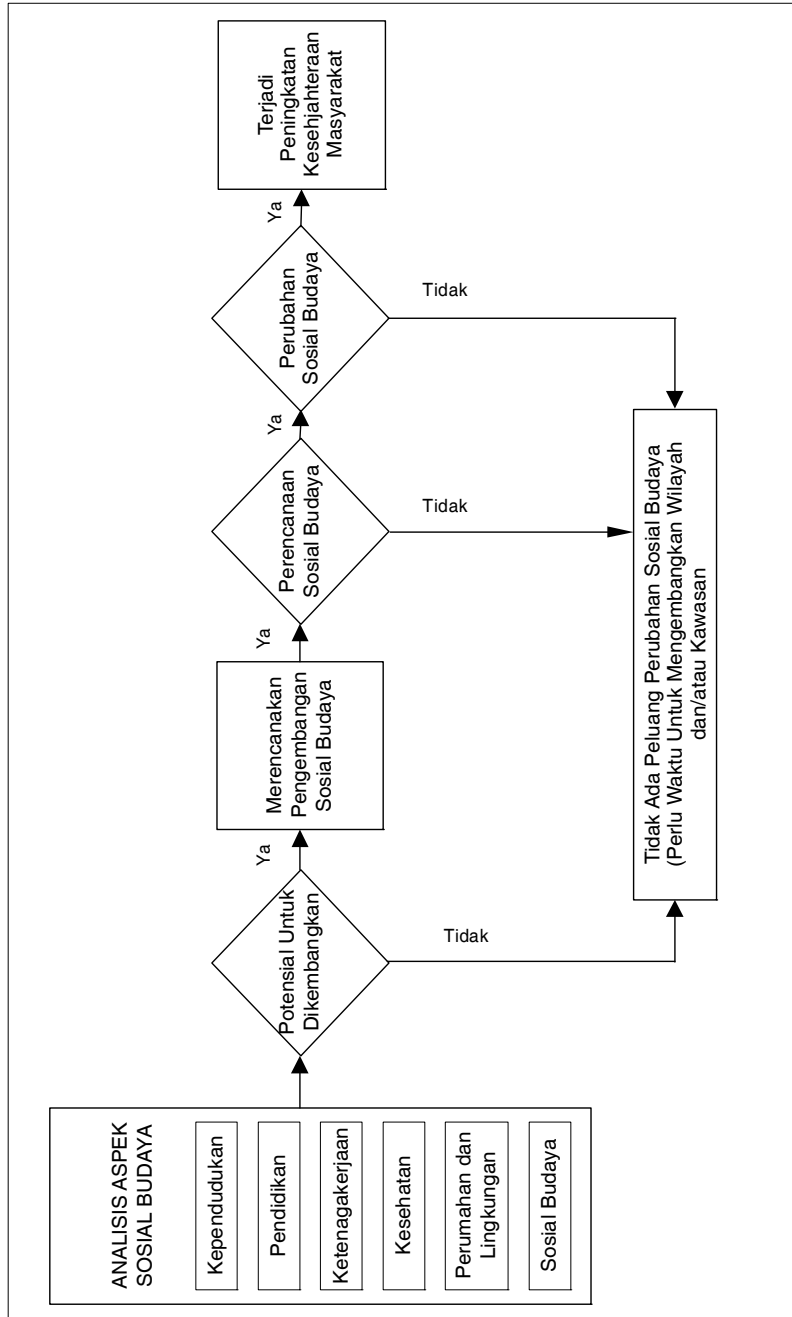
Di beberapa daerah peningkatan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang telah mulai dirasakan. Peningkatan tersebut antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pendapatan, dan bidang sosial budaya lainnya. Sedangkan masalah kependudukan seperti tingginya laju pertumbuhan penduduk, persebaran yang tidak merata dan struktur umur penduduk yang relatif muda masih merupakan faktor penghambat usaha peningkatan kesejahteraan rakyat.

Analisis aspek sosial budaya ini terdiri dari berbagai macam indikator sosial budaya yang dipilih sehingga dapat memberikan gambaran baik secara langsung atau tidak langsung mengenai kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah dan/atau kawasan.

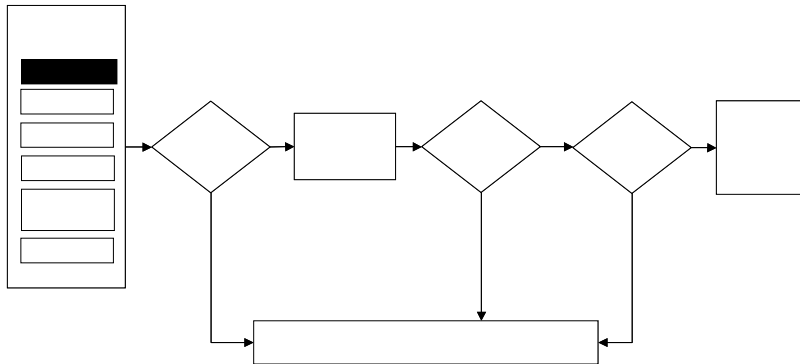
Berdasarkan analisis indikator sosial budaya dapat diperoleh gambaran apakah suatu wilayah dan/atau kawasan cukup potensial untuk dikembangkan atau tidak. Jika wilayah dan/atau kawasan potensial untuk dikembangkan barulah dilakukan perencanaan pengembangan sosial budaya melalui berbagai program perencanaan sosial.

Tujuan utama perencanaan sosial adalah manusia, artinya yang menjadi objek sekaligus subjek adalah manusia. Penyediaan sarana-sarana sosial antara lain yang mencakup pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain adalah dalam upaya memberikan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perubahan yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga wilayah dan/atau kawasan memang layak dikembangkan. Adapun bagan alir analisis aspek sosial budaya dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Bagan alir analisis aspek sosial budaya



4.3.1 Analisis kependudukan



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis potensi kependudukan di wilayah dan/atau kawasan.

Sasaran

- 1) Memperoleh gambaran potensi penduduk.
- 2) Sebagai acuan dalam menentukan kebijakan penyebaran penduduk.
- 3) Memperoleh gambaran situasi dan kondisi objektif dari perencanaan pengembangan/pemberdayaan masyarakat.

Masukan

- 1) Data Jumlah Penduduk,
- 2) Data Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif,
- 3) Data Penduduk Menurut Daerah Tempat Tinggal,
- 4) Data Penduduk Menurut Daerah Asal,
- 5) Data Banyak dan Laju pertumbuhan penduduk,
- 6) Data Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk,
- 7) Data Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur,
- 8) Data Estimasi Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Tidak Produktif.

Contoh masukan data dapat dilihat pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3, Tabel 4.4 dan Tabel 4.5.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk, jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif, penduduk menurut daerah tempat tinggal, penduduk menurut daerah asal

Indikator	T a h u n		
	1991	1992	1993
Jumlah penduduk			
- Laki-laki			
- Perempuan			
Jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif			
- Usia Muda (0-14)			
- Usia Produktif (15 – 64)			
- Usia Lanjut (65+)			
Penduduk menurut daerah tempat tinggal			
- % Penduduk Kota			
- % Penduduk Desa			
Penduduk menurut daerah asal			
- % Penduduk asli			
- % Penduduk pendatang			

Sumber :

Tabel 4.2 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990.

Wilayah	Jumlah Penduduk (000)				Laju Pertumbuhan Penduduk		
	1961	1971	1980	1990	61-71	71-80	80-90
Kabupaten							
-							
-							
-							
Jumlah							

Sumber :

Tabel 4.3 Luas daerah dan kepadatan penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990

Wilayah	Luas Daerah	Kepadatan Penduduk Pper Km ²			
		1961	1971	1980	1990
Kabupaten					
—					
—					
—					
Jumlah					

Sumber :

Tabel 4.4 Proyeksi penduduk menurut kelompok umur tahun 1993 – 1996

Kelompok Umur (th)	Wilayah	Jumlah Penduduk (000)							
		1993		1994		1995		1996	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Kabupaten									
- 0 – 4 tahun									
- 5 – 9 tahun									
- 10 – 14 tahun									
- 15 – 19 tahun									
- 20 – 24 tahun									
- 25 – 29 tahun									
- 30 – 34 tahun									
↓									
- 75+									
Jumlah									

Sumber :

Tabel 4.5 Estimasi proporsi penduduk menurut kelompok usia produktif dan tidak produktif

Wilayah	Kelompok Umur / Tahun					
	0 - 14 tahun		15 - 64 tahun		+ 65 tahun	
	1990	1995	1990	1995	1990	1995
Kabupaten						
—						
—						
—						
Jumlah						

Sumber :

Keluaran

- 1) Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin saat ini dan yang akan datang.
- 2) Proyeksi jumlah penduduk yang digunakan untuk merencanakan penyediaan fasilitas bagi masyarakat seperti fasilitas pendidikan, penyediaan lapangan kerja, kesehatan, penyediaan kebutuhan pangan, dan sebagainya.

Langkah-langkah

- 1) Menghitung/mengelompokkan setiap indikator menurut jenis kelamin sehingga dapat menjelaskan totalitas perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
- 2) Mengidentifikasi penduduk menurut kelompok usia muda, usia produktif, dan usia lanjut dalam ranking yang tidak berbeda jauh.
- 3) Mengidentifikasi penduduk usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun yang dianggap penduduk tidak produktif secara ekonomi. Makin besar kelompok usia tidak produktif berarti makin tinggi beban tanggungan penduduk produktif dan semakin banyak sumber daya yang harus dibagikan kepada kelompok tidak produktif.
- 4) Menyajikan data, sebaiknya dalam periode 5 tahun atau minimal 3 tahun.

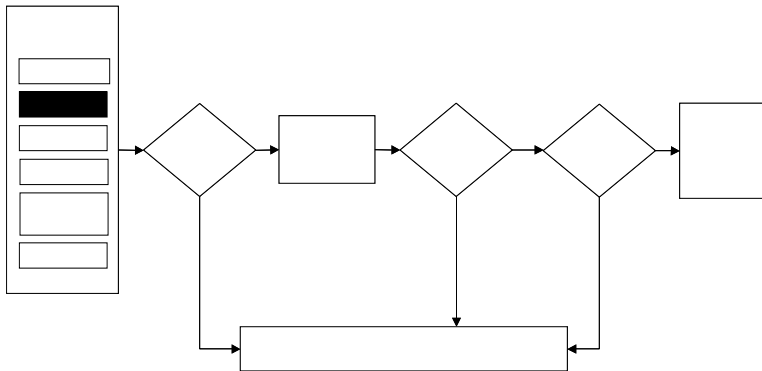
Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Menggunakan indikator kependudukan yang bersifat umum sehingga dapat dipakai pada semua kelompok penduduk tanpa dibedakan.
- 2) Penduduk usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun dianggap penduduk tidak produktif.
- 3) Semakin besar kelompok usia tidak produktif semakin tinggi beban tanggungan penduduk produktif.
- 4) Data kependudukan dapat diperoleh dari berbagai sumber baik makro maupun mikro. Data makro misalnya Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten. Data mikro misalnya data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian.
- 5) Sensus Penduduk dilakukan oleh BPS dalam kurun waktu 10 tahun sekali. Biasanya tidak termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap.
- 6) Saat ini persentase penduduk di beberapa provinsi tidak dapat dibandingkan dengan keadaan pada tahun sebelumnya karena perubahan luas wilayah

atau perubahan batas provinsi.

- 7) Sampai saat ini persebaran penduduk baik antar pulau maupun antar daerah pedesaan/perkotaan masih timpang. Dengan makin meratanya pembangunan di seluruh daerah disertai dengan usaha pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk diharapkan penyebaran penduduk relatif makin merata.
- 8) Indikator penduduk menurut daerah asal saat ini penting disajikan mengingat makin gencarnya “jargon putera daerah” di berbagai daerah akhir-akhir ini. Indikator ini dapat menjelaskan pula potensi penduduk asli dan pendatang sehingga dapat memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi objektif dari perencanaan pengembangan/pemberdayaan masyarakat di wilayah dan/atau kawasan.

4.3.2 Analisis pendidikan



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis potensi pendidikan dalam usaha meningkatkan kecerdasan dan keterampilan penduduk di wilayah dan/atau kawasan.

Sasaran

- 1) Memperoleh gambaran keadaan pendidikan penduduk.
- 2) Sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pendidikan penduduk.
- 3) Sebagai acuan bagi pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Masukan

- 1) Data Partisipasi Pendidikan Penduduk,
- 2) Data Banyaknya Murid,
- 3) Data Rasio Jumlah Guru per 10.000 Penduduk
- 4) Data Rasio Murid-Guru,
- 5) Data Rasio Murid-Kelas,
- 6) Data Tingkat Melek Huruf,
- 7) Data Penduduk Yang Buta Huruf,
- 8) Data Pendidikan Yang Ditamatkan.

Contoh masukan data analisis pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.6, Tabel 4.7, Tabel 4.8 dan Tabel 4.9.

**Tabel 4.6 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas
Menurut partisipasi sekolah**

Wilayah/Kawasan Perencanaan	Partisipasi Sekolah			
	Tdk/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tdk Sekolah Lagi	Jumlah
Kabupaten				
—				
—				
—				

Sumber :

Tabel 4.7 Perbandingan banyak murid, rasio jumlah guru, rasio murid-guru, rasio murid-kelas dalam beberapa tahun

Indikator	T a h u n		
	1980	1990	2000
Banyaknya murid			
– SD			
– SLTP			
– SMU			
– Perguruan Tinggi			
– Rasio Jumlah Guru per 10.000 penduduk			
– SD			
– SLTP			
– SMU			
Rasio Murid – Guru (%)			
– SD			
– SLTP			
– SMU			
Rasio Murid – Kelas (%)			
– SD			
– SLTP			
– SLTA			
Tingkat Melek Huruf (%)			
– Laki-laki			
– Perempuan			

Sumber :

Tabel 4.8 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf menurut daerah tempat tinggal, tahun 1987, 1990, 1993

Wilayah/Kawasan Perencanaan	Perkotaan			Perdesaan		
	1987	1990	1993	1987	1990	1993
Kabupaten						
–						
–						
–						
Jumlah						

Sumber :

Tabel 4.9 Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut daerah tempat tinggal dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, tahun*)

Daerah Tempat Tinggal	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan						
	Tdk/Blm Pernah Sekolah Dan Tdk/Blm Tamat SD	SD	SMP	SMU	Akademi/ Diploma I/II/III	Universitas	Jumlah
– Perkotaan							
– Perdesaan							
– Perkotaan + Perdesaan							

Sumber :

Ket : *) tahun data yang digunakan pada tabel

Keluaran

Identifikasi Data Pendidikan di Wilayah Dan/Atau Kawasan sehingga dapat direncanakan berbagai fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Langkah-langkah

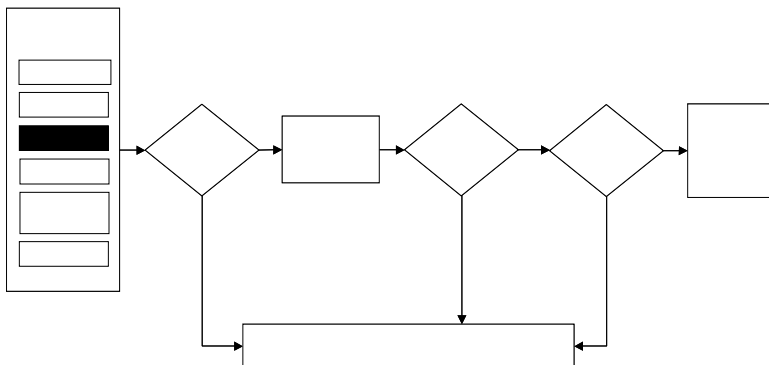
- 1) Mengidentifikasi jumlah penduduk menurut partisipasi sekolah.
- 2) Mengidentifikasi perbandingan banyak murid, banyak guru, rasio murid-guru, rasio murid-kelas dalam beberapa tahun.
- 3) Mengidentifikasi penduduk buta huruf menurut daerah tempat tinggal.
- 4) Mengidentifikasi jumlah penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Pendidikan adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Dengan adanya pemerataan pendidikan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk.
- 2) Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pendidikan adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

- 3) Indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan adalah berkurangnya tingkat buta huruf penduduk berumur 10 tahun ke atas. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indikator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Dengan kata lain kemampuan baca-tulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.
- 4) Indikator lain yang sering digunakan untuk melihat peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan adalah data penduduk 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
- 5) Data untuk melengkapi tabel-tabel di atas dapat diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Sensus Penduduk.

4.3.3 Analisis ketenagakerjaan



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis potensi ketenagakerjaan dalam usaha mengatasi masalah kesempatan kerja penduduk di wilayah dan/atau kawasan

Sasaran

- 1) Memperoleh gambaran keadaan ketenagakerjaan.
- 2) Memperoleh gambaran distribusi/penyebaran tenaga kerja penduduk.
- 3) Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam menentukan kebijakan penyediaan lapangan kerja.

Masukan

- 1) Tabel Penduduk Yang Bekerja,
- 2) Tabel Penduduk Yang Mencari Pekerjaan,
- 3) Tabel Penduduk Bukan Angkatan Kerja,
- 4) Tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja,
- 5) Tabel Angka Beban Tanggungan Angkatan Kerja,
- 6) Tabel Status dan Lapangan Pekerjaan,

Contoh masukan data untuk analisis ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.10, Tabel 4.11, Tabel 4.12 dan Tabel 4.13.

Keluaran

- 1) Identifikasi data ketenagakerjaan untuk merencanakan penyediaan lapangan kerja baik formal maupun informal.
- 2) Identifikasi data angkatan kerja untuk merencanakan penyediaan fasilitas yang bersifat meningkatkan kemampuan kerja.

Langkah-langkah

- 1) Mengidentifikasi penduduk yang bekerja, mencari pekerjaan, dan bukan angkatan kerja.
- 2) Mengidentifikasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut umur, daerah tempat tinggal, status pekerjaan, dan lapangan pekerjaan utama.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Indikator ketenagakerjaan terkait erat dengan indikator kependudukan terutama tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Pertambahan penduduk usia kerja akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tentunya harus tertampung dalam lapangan kerja baik formal maupun informal. Namun dalam kenyataannya tidak semua angkatan kerja dapat tertampung pada lapangan kerja yang tersedia.
- 2) Meningkatnya jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas setiap tahun mengakibatkan meningkatnya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Tabel 4.10 Penduduk yang bekerja, penduduk yang mencari pekerjaan, penduduk bukan angkatan kerja

Indikator	T a h u n		
	1991	1992	1993
Bekerja			
- Laki-laki			
- Perempuan			
Mencari Pekerjaan			
- Laki-laki			
- Perempuan			
Bukan Angkatan Kerja			
- Laki-laki			
- Perempuan			

Sumber :

Tabel 4.11 Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut golongan umur dan daerah tempat tinggal tahun 1991 – 1993

Daerah Tempat Tinggal	Golongan Umur								Jumlah
	10-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Perkotaan									
1991									
1992									
1993									
Perdesaan									
1991									
1992									
1993									
Perkotaan +									
Perdesaan									
1991									
1992									
1993									

Sumber :

Tabel 4.12 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut daerah tempat tinggal dan status pekerjaan, tahun*)

Daerah Tempat Tinggal	Status Pekerjaan					Jumlah (000)
	1	2	3	4	5	
Perkotaan						
Perdesaan						
Perkotaan + Perdesaan						

Sumber :

Ket : *) tahun data yang digunakan pada tabel

Tabel 4.13 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut daerah tempat tinggal dan lapangan pekerjaan utama, tahun*)

Daerah Tempat Tinggal	Lapangan Pekerjaan Utama					Jumlah (000)
	1	2	3	4	5	
Perkotaan						
Perdesaan						
Perkotaan + Perdesaan						

Sumber :

Ket : *) tahun data yang digunakan pada tabel

- 3) Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk menghitung persentase angkatan kerja berdasar jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kenaikan atau penurunan angkatan kerja berkaitan erat dengan peningkatan usia sekolah dan semakin terbukanya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 4) TPAK tertinggi terdapat pada golongan umur 35-44 tahun karena pada usia tersebut tanggung jawab seseorang terhadap ekonomi keluarga semakin besar.
- 5) Sumber data TPAK dapat diperoleh dari survei BPS tentang Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia yang dilakukan setiap tahun.

- 6) Indikator yang menggambarkan perkiraan banyaknya penduduk yang tidak produktif (berumur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dan harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) adalah indikator Angka Beban Tanggungan Angkatan Kerja. Indikator ini hampir sama dengan Estimasi Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Usia Produktif dan Tidak Produktif (lihat Tabel 4.5).
- 7) Pola struktur umur penduduk yang muda tentu akan mempengaruhi tingginya angka beban tanggungan di suatu negara.
- 8) Indikator ketenagakerjaan lainnya adalah yang berhubungan dengan Status Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan Utama.

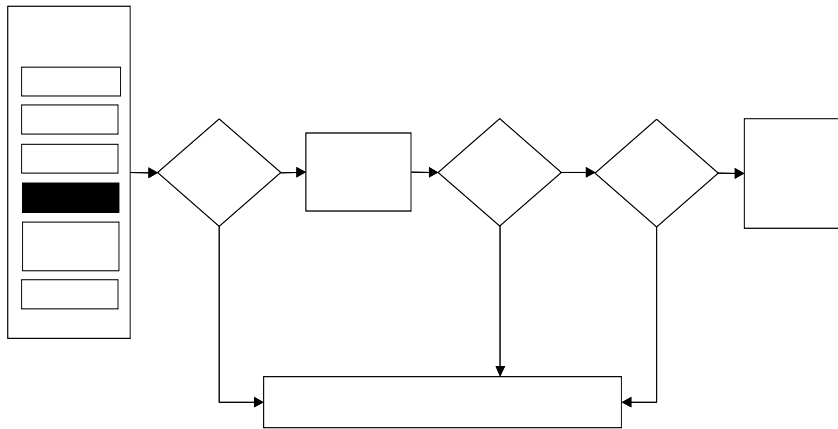
Status pekerjaan biasanya dikelompokkan dalam 5 kelompok, yaitu :

- a. Berusaha sendiri tanpa bantuan,
- b. Berusaha dengan buruh tidak tetap / pekerja keluarga,
- c. Berusaha dengan buruh tetap,
- d. Buruh/karyawan,
- e. Pekerja Keluarga.

Lapangan pekerjaan utama juga dikelompokkan dalam 5 kelompok, yaitu:

- a. Pertanian,
- b. Industri,
- c. Perdagangan,
- d. Jasa-jasa (Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan, dan Jasa Kemasyarakatan),
- e. Lainnya (misalnya Pertambangan/Penggalan, Listrik, Gas dan Air, Bangunan).

4.3.4 Analisis kesehatan



Lingkup pekerjaan

Melakukan analisis terhadap kondisi kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah dan/atau kawasan.

Sasaran

- 1) Memperoleh gambaran derajat kesehatan dan kondisi pelayanan kesehatan masyarakat.
- 2) Memberikan arahan kepada pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- 3) Memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi objektif yang diperlukan dalam proses perencanaan kesehatan.

Masukan

- 1) Data Angka Kematian Bayi dan Balita.
- 2) Data Angka Harapan Hidup.
- 3) Data Sarana dan Prasarana Kesehatan.
- 4) Data Banyaknya Rumah Sakit, Tempat Tidur, Puskesmas, dan Apotek.
- 5) Data Banyaknya Jenis Tenaga Kesehatan.

Contoh masukan data untuk analisis kesehatan dapat dilihat pada Tabel 4.14, Tabel 4.15, Tabel 4.16, Tabel 4.17, dan Tabel 4.18.

**Tabel 4.14 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran
menurut jenis kelamin dan wilayah/kawasan perencanaan,
tahun 1971, 1980 Dan 1990**

Wilayah/Kawasan	1971		1980		1990	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR
Kabupaten						
—						
—						
—						

Sumber :

**Tabel 4.15 Angka kematian balita per 1000 kelahiran
menurut jenis kelamin dan wilayah/kawasan
tahun 1971, 1980 dan 1990**

Wilayah/Kawasan	1971		1980		1990	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR
Kabupaten						
—						
—						
—						

Sumber :

**Tabel 4.16 Angka harapan hidup pada waktu lahir
menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal,
tahun 1971, 1980 dan 1990**

Daerah Tempat Tinggal	1971		1980		1990	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR
Kabupaten						
Perkotaan						
Perdesaan						
Perkotaan + Perdesaan						

Sumber :

Tabel 4.17 Banyaknya rumah sakit, tempat tidur, puskesmas dan apotik

Fasilitas Kesehatan		1973	1978	1983
1.	Rumah Sakit Umum Banyaknya Tempat tidur per 100.000 orang			
2.	Puskesmas Banyaknya Per 1.000.000 orang			
3.	Puskesmas Pembantu Banyaknya Per 1.000.000 orang			
4.	Apotik Banyaknya Per 1.000.000 orang			

Sumber :

Tabel 4.18 Banyaknya jenis tenaga kesehatan

Tenaga Kesehatan		1973	1978	1983
1.	Dokter Per 1.000.000 orang			
2.	Perawat Kesehatan Per 1.000.000 orang			
3.	Paramedis non perawat dan Pekerja kesehatan Per 1.000.000 orang			
4.	Tenaga Akademis Bidang Kesehatan Per 1.000.000 orang			

Sumber :

Keluaran

- 1) Identifikasi indikator kesehatan yang mencerminkan tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat.
- 2) Identifikasi rendahnya derajat kesehatan masyarakat akibat kurangnya sarana dan prasarana kesehatan serta sistem pelayanan kesehatan yang buruk.

Langkah-langkah

- 1) Mengidentifikasi indikator kesehatan yang diperlukan dalam proses perencanaan kesehatan.
- 2) Mengidentifikasi angka kematian bayi dan balita dan angka harapan hidup waktu lahir yang merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat.

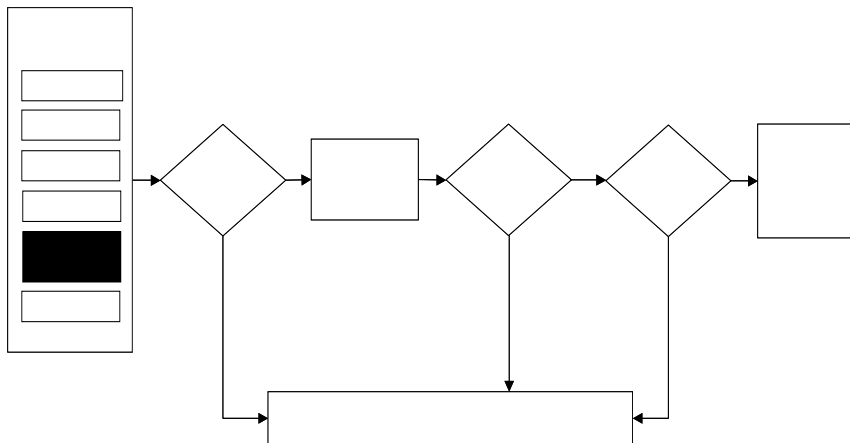
Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Angka kematian bayi merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat karena kematian bayi berkaitan erat dengan tingkat pendidikan keluarga, keadaan sosial ekonomi keluarga, sistem nilai dan adat istiadat, kebersihan, dan kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan yang tersedia. Semakin tinggi angka kematian bayi maka upaya pembangunan kesehatan semakin perlu ditingkatkan.
- 2) Beberapa faktor yang dapat memperburuk derajat kesehatan masyarakat antara lain rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan, dan keadaan sanitasi serta lingkungan yang tidak memadai.
- 3) Angka harapan hidup waktu lahir merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat secara umum. Angka ini dapat memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat karena dapat dipandang sebagai bentuk dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat diperkirakan sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup masyarakat.
- 4) Adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik pula.
- 5) Sumber data angka kematian bayi dan balita adalah Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS setiap sepuluh tahun sekali. Penghitungan data tersebut dengan menggunakan metode *Trusell (West)*.
- 6) Sarana dan prasarana kesehatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Di beberapa kota besar telah diusahakan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, tetapi di daerah-daerah perdesaan dirasakan masih sangat kurang bahkan di

daerah-daerah terpencil dan transmigrasi. Itulah sebabnya perbedaan derajat kesehatan masyarakat antara satu provinsi dengan provinsi lainnya seringkali sangat besar, begitu pula perbedaan derajat kesehatan antara penduduk perkotaan dengan perdesaan atau daerah terpencil juga sangat besar.

- 7) Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di berbagai wilayah dan/atau kawasan maka pembangunan sarana dan prasarana kesehatan perlu dilakukan, antara lain Rumah Sakit Umum, berbagai jenis Puskesmas (Puskesmas biasa, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dengan tempat tidur), Apotek, Tenaga Kesehatan (dokter, perawat, paramedis non perawat dan tenaga akademis bidang kesehatan).

4.3.5 Analisis perumahan dan lingkungan



Lingkup pekerjaan

Menyusun indikator perumahan dan lingkungan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah dan/atau kawasan.

Sasaran

Memperoleh gambaran tentang tingkat kesejahteraan rumah tangga dan tingkat kesejahteraan masyarakat umumnya di wilayah dan/atau kawasan.

Masukan

- 1) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Dan Daerah Tempat Tinggal seperti yang disajikan pada Tabel 4.19,
- 2) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Penerangan Yang Digunakan seperti yang disajikan pada Tabel 4.20,
- 3) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Sumber Penerangan seperti yang disajikan pada Tabel 4.21.
- 4) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Sumber Air Minum seperti yang disajikan pada Tabel 4.22,
- 5) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Fasilitas Air Minum seperti yang disajikan pada Tabel 4.23,
- 6) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Tempat Buang Air Besar seperti yang disajikan pada Tabel 4.24,
- 7) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak seperti yang disajikan pada Tabel 4.25,
- 8) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Luas Lantai seperti yang disajikan Tabel 4.26,
- 9) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Dinding Terbanyak seperti yang disajikan pada Tabel 4.27,
- 10) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Atap Terbanyak seperti yang disajikan pada Tabel 4.28,
- 11) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Lantai Terluas seperti yang disajikan pada Tabel 4.29.

Tabel 4.19 Persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas perumahan dan daerah tempat tinggal

Fasilitas Perumahan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
1. Penerangan Listrik			
2. Sumber Air Minum			
3. Tempat Mandi Sendiri			
4. Kakus Sendiri Dengan Tangki Septik			
5. Luas Lantai (Area $\geq 30 \text{ M}^2$)			

Sumber :

Tabel 4.20 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis penerangan yang digunakan

Daerah Tempat Tinggal	Listrik	Petromak	Lampu Minyak Tanah	Lainnya	Jumlah
Kabupaten					
Perkotaan					
Perdesaan					
Perkotaan + Perdesaan					

Sumber :

Tabel 4.21 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan sumber penerangan

Daerah Tempat Tinggal	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Petromak	Pelita/ Sentir/ Obor	Lainnya	Tidak Terjawab	Jumlah
Kabupaten							
Perkotaan							
Perdesaan							
Perkotaan + Perdesaan							

Sumber :

Tabel 4.22 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan sumber air minum

Daerah Tempat Tinggal	Ledeng	Pompa	Sumur	Lainnya	Jumlah
Perkotaan					
Perdesaan					
Perkotaan + Perdesaan					

Sumber :

Tabel 4.23 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan fasilitas air minum

Daerah Tempat Tinggal	Sendiri	Bersama	Umum	Membeli	Lainnya	Tidak Tahu	Jumlah
Perkotaan							
Perdesaan							
Perkotaan + Perdesaan							

Sumber :

Tabel 4.24 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan tempat buang air besar

Daerah Tempat Tinggal	Kakus Sendiri Dengan Tangki Septik	Kakus Sendiri Tanpa Tangki Septik	Kakus Bersama/ Umum/Lainnya	Jumlah
Perkotaan				
Perdesaan				
Perkotaan + Perdesaan				

Sumber :

Tabel 4.25 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis bahan bakar untuk memasak

Daerah Tempat Tinggal	Listrik/ Gas	Minyak Tanah	Kayu/ Arang	Lainnya	Jumlah
Perkotaan					
Perdesaan					
Perkotaan + Perdesaan					

Sumber :

Tabel 4.26 Persentase rumah tangga menurut tempat tinggal dan luas lantai

Daerah Tempat Tinggal	≤49 M ²	50-99 M ²	100-149 M ²	>150 M ²	Tidak Terjawab
Perkotaan					
Perdesaan					
Perkotaan + Perdesaan					

Sumber :

Tabel 4.27 Persentase banyaknya rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis dinding terbanyak

Daerah Tempat Tinggal	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya	Jumlah
Perkotaan					
Perdesaan					
Perkotaan + Perdesaan					

Sumber :

Tabel 4.28 Persentase banyaknya rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis atap terbanyak

Daerah Tempat Tinggal	Beton	Kayu	Seng/ Asbes	Genteng	Ijuk	Daun ² an	Lainnya	Jumlah
Perkotaan								
Perdesaan								
Perkotaan + Perdesaan								

Sumber :

Tabel 4.29 Persentase banyaknya rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis lantai terluas

Daerah Tempat Tinggal	Marmmer/ Keramik	Ubin/ Tegel/ Teraso	Semen/ Bata Merah	Kayu	Bambu	Tanah	Lainya	Jumlah
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan								

Sumber :

Keluaran

Identifikasi sarana dan fasilitas lingkungan rumah di wilayah dan/atau kawasan.

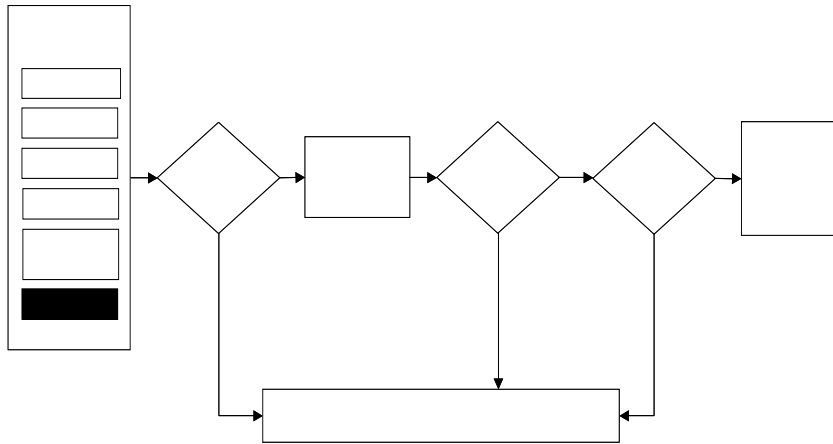
Langkah-langkah

- 1) Mengidentifikasi sarana dan fasilitas lingkungan rumah.
- 2) Memproyeksikan kebutuhan sarana dan fasilitas lingkungan rumah sesuai dengan perkembangan kegiatan di wilayah dan/atau kawasan.
- 3) Mengidentifikasi angka kematian bayi dan balita dan angka harapan hidup waktu lahir yang merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan rakyat yang berhubungan dengan kesehatan adalah sarana dan fasilitas lingkungan rumah karena masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki rumah yang layak tinggal dan memenuhi syarat-syarat kesehatan.
- 2) Rumah yang layak tinggal adalah rumah dengan perbandingan luas lantai seimbang dengan jumlah penghuninya serta memiliki sarana perumahan seperti listrik, air bersih, tempat mandi, dan tempat buang air besar dengan tangki septik.
- 3) Jarak rumah sebaiknya tidak terlalu jauh dari fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, dan pasar. Kondisi seperti itu dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan tentunya tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

4.3.6 Analisis sosial budaya



Lingkup pekerjaan

Mengidentifikasi kondisi sosial budaya untuk mengetahui sampai seberapa jauh tingkat pengetahuan masyarakat di di wilayah dan/atau kawasan.

Sasaran

- 1) Memperoleh gambaran tentang tingkat pengetahuan umum masyarakat.
- 2) Untuk melihat sampai seberapa jauh masyarakat telah menggunakan media informasi elektronik dan media cetak.
- 3) Memperoleh gambaran tingkat kriminalitas di wilayah dan/atau kawasan.

Masukan

- 1) Data Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Mendengarkan Radio, Menonton Televisi, Membaca Surat Kabar Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Daerah Tempat, seperti yang disajikan pada Tabel 4.30,
- 2) Data Persentase Penduduk Yang Menjadi Korban Menurut Daerah Tempat Tinggal, seperti yang disajikan pada Tabel 4.31.

Tabel 4.30 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mendengarkan radio, menonton televisi, membaca surat kabar selama seminggu yang lalu menurut daerah tempat tinggal tahun*)

Daerah Tempat Tinggal	Mendengarkan Radio		Menonton TV		Membaca Surat Kabar	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996
– Perkotaan						
– Perdesaan						
– Perkotaan + Perdesaan						

Sumber :

Ket : *) tahun data yang digunakan pada tabel

Tabel 4.31 Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan menurut daerah tempat tinggal

Wilayah/Kawasan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
Kabupaten			
–			
–			
–			

Sumber :

Keluaran

- 1) Sarana komunikasi dan informasi yang digunakan masyarakat.
- 2) Tingkat kriminalitas dan peristiwa kejahatan di wilayah dan/atau kawasan.

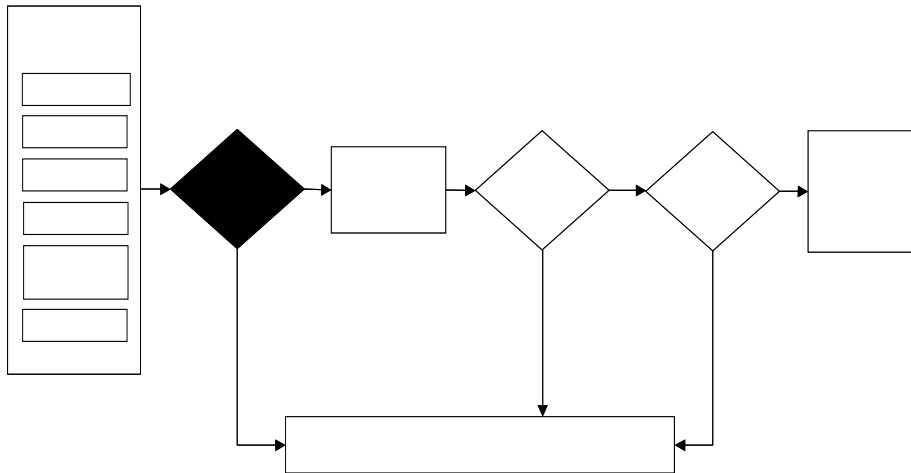
Langkah-langkah

- 1) Mengidentifikasi sarana komunikasi dan informasi yang digunakan masyarakat.
- 2) Mengidentifikasi tingkat kriminalitas/kejahatan dalam masyarakat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Kemajuan teknologi informasi saat ini semakin pesat menyebabkan makin cepatnya informasi diterima oleh masyarakat baik yang berada di kota besar maupun di pelosok daerah. Arus informasi yang terus mengalir membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya antara lain akan membuka cakrawala pemikiran masyarakat untuk menerima hal-hal yang baru, sedangkan dampak negatifnya seringkali suatu informasi dapat mengubah budaya dan tradisi yang sudah dilestarikan masyarakat setempat.
- 2) Beberapa teknologi dan media informasi yang dimiliki masyarakat luas antara lain radio, televisi, dan media cetak seperti surat kabar atau majalah. Aktivitas masyarakat dalam menerima informasi melalui media informasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarannya. Di daerah perkotaan radio dan televisi sudah merupakan kebutuhan sehari-hari sehingga aktivitas mendengarkan radio dan televisi merupakan hal yang biasa dilakukan. Sedangkan surat kabar meskipun bukan barang mahal tetapi kebutuhannya belum dirasakan benar apalagi penyebarannya tidak sampai ke pelosok daerah.
- 3) Tingkat kriminalitas suatu wilayah akan sangat mempengaruhi perencanaan pengembangan wilayah tersebut karena semakin tinggi tingkat kriminalitas suatu daerah maka semakin sulit untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu bahkan kemungkinan pihak swasta atau investor yang semula berminat mengembangkan usahanya akan mengundurkan niatnya.

4.4. Analisis potensi pengembangan wilayah dan/atau kawasan berdasarkan aspek sosial budaya



Lingkup pekerjaan

Merangkum semua hasil kajian/analisis aspek sosial budaya dalam satu rekomendasi kelayakan sosial budaya yang akan menjadi masukan bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah dan/atau kawasan.

Sasaran

- 1) Memperoleh indikator sosial budaya yang potensial digunakan dalam pengembangan sumberdaya manusia di wilayah dan/atau kawasan, disebut indikator komposit.
- 2) Memperoleh gambaran sarana dan prasarana sosial budaya yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah dan/atau kawasan.

Masukan

Masukan data untuk analisis potensi pengembangan wilayah dan/atau kawasan berdasarkan aspek sosial budaya adalah data indeks pembangunan manusia (IPM) seperti yang disajikan pada Tabel 4.32.

Tabel 4.32 Indeks pembangunan manusia di wilayah dan/atau kawasan, tahun

Wilayah	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-Rata Lama Pendidikan Yang Diperoleh	IPM
Kabupaten				
—				
—				
—				

Sumber :

Rumus penghitungan IPM tersebut adalah sebagai berikut :

IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3)

X1 adalah angka harapan hidup

X2 adalah angka melek huruf

X3 adalah rata-rata lama pendidikan yang diperoleh

Index $X_{(i,j)} = (X_{(i,j)} - X_{(i-min)}) / (X_{(i-max)} - X_{(i-min)})$

$X_{(i,j)}$: Indikator ke i daerah ke j

$X_{(i-min)}$: Nilai minimum dari X_i

$X_{(i-max)}$: Nilai Maksimum dari X_i

Indikator X1, X2, X3 dapat diganti dengan indikator lain yang setara misalnya indikator tingkat kehidupan yang layak dan sebagainya. Tabel indeks IPM tersebut dapat pula ditambah kolomnya dengan kolom Ranking IPM untuk membandingkan IPM suatu kawasan dengan kawasan yang lain.

Keluaran

- 1) Rencana pengembangan sosial budaya sesuai kebutuhan masyarakat.
- 2) Rencana rekayasa sosial budaya dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.

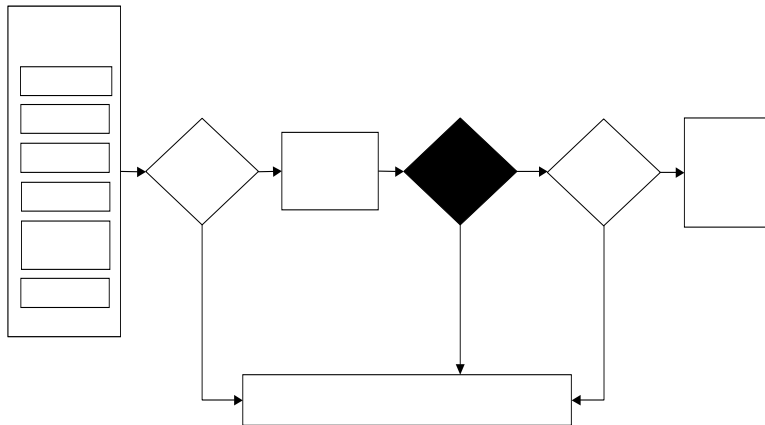
Langkah-langkah

- 1) Mengidentifikasi indikator sosial budaya masyarakat.
- 2) Menganalisis indikator sosial budaya yang potensial untuk dikembangkan.
- 3) Merencanakan pengembangan sosial budaya masyarakat.
- 4) Menganalisis kemungkinan dilakukannya rekayasa sosial budaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Menganalisis kemungkinan terjadinya perubahan sosial budaya dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Indikator komposit yaitu suatu indikator tunggal yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, misal data kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.
- 2) Indikator komposit yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lamanya pendidikan yang diperoleh. IPM tersebut dipakai untuk membandingkan tingkat kesejahteraan rakyat antar daerah di wilayah dan/atau kawasan.
- 3) Indikator komposit cocok untuk tujuan perbandingan wilayah karena memenuhi beberapa kriteria yaitu:
 - a. Tidak mengasumsikan hanya ada satu pola pembangunan.
 - b. Menghindari standar-standar yang merefleksikan nilai-nilai spesifik dalam masyarakat atau nilai-nilai kesukuan.
 - c. Mengukur hasil (*result*) bukan masukan (*input*).
 - d. Menggambarkan tingkat dan sebaran yang mudah dipahami.
 - e. Sederhana cara menyusunnya serta mudah dipahami.
 - f. Cocok untuk perbandingan secara regional dan internasional.

4.5 Pemilihan rencana tindak pengembangan wilayah dan/atau kawasan berkaitan dengan aspek sosial budaya



Lingkup pekerjaan

Merangkum hasil analisis data yang berasal dari indikator sosial budaya wilayah dan/atau kawasan seperti telah diuraikan di atas. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dikaji untuk diselaraskan dengan kebutuhan pemerintah daerah di wilayah dan/atau kawasan.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada tahap ini adalah :

- 1) Memperoleh gambaran tentang struktur sosial budaya di wilayah dan/atau kawasan.
- 2) Memperoleh gambaran potensi dan kondisi sosial budaya wilayah dan/atau kawasan baik secara lintas kabupaten maupun se kabupaten/kota.
- 3) Memperoleh gambaran kebutuhan sarana dan prasarana sosial budaya di wilayah dan/atau kawasan

Masukan

- 1) Data indikator sosial budaya.
- 2) Tinjauan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan sosial budaya masyarakat.

- 3) Kebijakan-kebijakan pengembangan wilayah dan/atau kawasan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Keluaran

- 1) Hasil analisis potensi indikator sosial budaya wilayah dan/atau kawasan.
- 2) Perumusan kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasannya. Berbagai kebijakan di bidang sosial budaya seperti rekomendasi kepada para pengambil keputusan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan/penyuluhan kepada masyarakat dapat dibuat berdasarkan analisis kondisi sosial budaya yang diperoleh.
- 3) Rumusan alternatif perencanaan pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana sosial budaya di wilayah dan/atau kawasan.

Langkah-langkah

- 1) Menganalisis data indikator sosial budaya yang telah dikumpulkan. Berdasarkan analisis indikator sosial budaya dapat diperoleh gambaran apakah suatu wilayah dan/atau kawasan cukup potensial untuk dikembangkan atau tidak.
- 2) Melakukan perencanaan pengembangan sosial budaya atau sering disebut sebagai perencanaan sosial, jika cukup potensial untuk dikembangkan. Suatu perencanaan sosial dapat menghasilkan atau tidak menghasilkan perubahan. Perubahan yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah dan/atau kawasan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Data indikator yang digunakan dalam pedoman analisis ini sebagian besar diperoleh oleh dua pelaku utama pembangunan yaitu Pemerintah dan Masyarakat. Peranan pelaku utama lainnya yaitu Swasta tidak banyak dapat diungkapkan dalam penyusunan indikator. Untuk memperoleh analisis atau kajian yang komprehensif tentang pengembangan wilayah dan/atau kawasan serta memahami lebih jauh masalah yang dihadapi pemerintah daerah maka analisis indikator sosial budaya ini dapat disempurnakan dengan menggunakan data mikro berupa hasil-hasil studi di wilayah dan/atau kawasan yang berhubungan dengan masalah sosial budaya.

4.6 Rekomendasi pengembangan sosial budaya melalui pemberdayaan masyarakat

Lingkup pekerjaan

- 1) Merencanakan suatu perubahan dalam masyarakat, bukan perubahan secara individu atau dalam kelompok tertentu saja tetapi perubahan seluruh masyarakat sebagai suatu sistem.
- 2) Mengusahakan agar anggota masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan berswadaya lebih mampu mengatasi masalah yang dihadapi terutama di bidang sosial ekonomi.
- 3) Mengusahakan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Sasaran

- 1) Memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya.
- 2) Menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Masukan

- 1) Tinjauan peraturan perundang-undangan, berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan rencana pembangunan sosial budaya.
- 2) Konsep-konsep tentang Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Hasil Analisis Kelayakan Sosial Budaya wilayah dan/atau kawasan yang potensial untuk dikembangkan.

Keluaran

- 1) Merumuskan alternatif pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- 2) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.

- 3) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata.
- 4) Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan mendukung kepentingan masyarakat lemah.

Langkah-langkah

- 1) Merencanakan kegiatan dengan prinsip keterpaduan dengan program masyarakat, kepercayaan, kebersamaan, dan kemandirian.
- 2) Bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau kelompok formal/informal yang ada.
- 3) Bekerja sama dengan lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang telah melakukan program pelayanan di daerah dan mengambil peran melengkapi atau mengisi program yang telah berjalan.
- 4) Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat .
- 5) Memberikan pendampingan kepada masyarakat yang diberdayakan.
- 6) Memberdayakan lembaga pendukung lainnya, seperti LKMD.
- 7) Menawarkan program pelatihan bagi tenaga-tenaga motivator, fasilitator (pelatihan, pembimbing latihan), dan membina lembaga-lembaga pengembangan masyarakat (swasta maupun pemerintah), dengan harapan setelah mereka kembali ke daerah atau tempat tugas/tempat tinggalnya mampu menumbuhkan program pemberdayaan masyarakat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan membutuhkan strategi pendekatan yang menyeluruh.
- 2) Paradigma pembangunan dari teknokrasi yang bertumpu pada rasio menjadi sosio demokrasi yang menekankan partisipasi masyarakat.
- 3) Mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.
- 4) Wawasan pembangunan berubah dari berdasarkan sektoral menjadi berdasarkan kewilayahan.
- 5) Sifat pembangunan dari rasional, teknikal, dan sistematis menjadi partisipatif, psikososial dan adaptif.

- 6) Sumber inisiatif manajemen publik berubah dari gagasan para pakar dan perencana pembangunan menjadi isu dan peluang pembangunan.
- 7) Fungsi birokrasi pemerintah berubah dari pelaku utama pembangunan menjadi fasilitator pembangunan.
- 8) Penganggaran pembangunan dari sesuai mata anggaran (*line item budgeting*) menjadi sesuai kegiatan program (*program budgeting*).

**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG**

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Telp./Faks.: (021) 7236009, 7267762

Website: www.penataanruang.net; www.pu.go.id